



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Program Studi
Hubungan Internasional

Mengintegrasikan Indonesia dan Dunia Islam

Arah, Kerangka, dan Peta Jalan





KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Program Studi
Hubungan Internasional

Hasil Kemitraan Antara

**Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia**

dan

**Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Islam Indonesia**



2025

Mengintegrasikan Indonesia dan Dunia Islam: Arah, Kerangka, dan Peta Jalan

Disusun oleh:

Jurusan/Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Islam Indonesia

Pengarah:

Karina Utami Dewi dan Enggar Furi Herdianto

Tim Peneliti:

Irawan Jati, Hasbi Aswar, Hadza Min Fadhli Robby,
Masitoh Nur Rohma, Mohamad Rezky Utama,
Rizki Dian Nursita, Imam Khairul Muslim Hawari, dan Nasta Ayu

Diterbitkan oleh:

Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat 10110, Indonesia
Email: aspasaf.bskln@kemlu.go.id

Pembina/Pengarah:

Muhammad Takdir
(Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri)

Pimpinan/Penanggung Jawab:

Vahd Nabyl Achmad Mulachela
(Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika)

Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola

Kemitraan *Policy Output*:

Akhmad Masbukhin, Karin Aramitha Iswari, Nuruzahra,
Liana Diah Astari, Mona Aprilia Syafira, Krisnoaji Pamungkas,
Rivaldo Harviansyah

Editor: Akhmad Masbukhin dan Karin Aramitha Iswari

Desain Sampul: Andhika Saedya Priyadi

Tata Letak: Andhika Saedya Priyadi

©2025 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit. Kutipan terbatas untuk kepentingan akademik diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

Buku ini merupakan hasil kerja sama antara Jurusan/Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia dan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Isi laporan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak selalu mencerminkan posisi resmi Pemerintah Republik Indonesia.

Cetakan Pertama, 2025

Dicetak oleh: Universitas Islam Indonesia

Ukuran: [14,8 x 21 cm]

Jumlah halaman: [xiii + 127 hlm.]

Daftar Isi

Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Singkatan	vi
Kata Pengantar	vii
Ringkasan Eksekutif	xii
Pendahuluan	1
Bagian I Integrasi dan Diskursus Dunia Islam	6
Integrasi	7
Diskursus Dunia Islam	9
Dunia Islam dalam Perspektif Teori	11
Memahami Dunia Islam	13
Krisis Tatahan Liberal	19
Dunia Islam sebagai Tatahan Global Multipleks	22
Bagian II Indonesia sebagai Episentrum Dunia Islam	27
Pemikiran dan Perencanaan Strategis Ke-Indonesiaan, dan Azam Kebijakan Luar Negeri Indonesia	28
Konteks Historis	28
Konteks Legal	30
Doktrin Kebijakan dan Strategi Luar Negeri	31
Aspek Geopolitik Indonesia	32
Geografi, Sejarah, Demografi dan Budaya	32
Kapabilitas Ekonomi, Teknologi, dan Militer	36
Konteks Perbandingan	42
Operasionalisasi Sentralitas Indonesia di Dunia Muslim	44
Posisi Indonesia di Dunia Muslim dalam	
Kontestasi Hegemonik	44
Bagian III Rancangan Peta Jalan	51
Proses	52
Tujuan Peta Jalan	53
Kondisi Faktual	54
<i>Strength</i> (Kekuatan)	54
<i>Intangible Strength</i>	61
<i>Opportunities</i> (Kesempatan)	63
<i>Aspirations</i> (Aspirasi/harapan)	65
<i>Results</i> (Hasil)	67

<i>Required Capabilities</i>	70
Kapabilitas Aktor Pemerintah	71
Kapabilitas Aktor Non Pemerintah	77
Pilihan dan Implementasi Kebijakan	79
Pencapaian Kunci (<i>Key Milestones</i>)	103
Penutup	104
Daftar Pustaka	106

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Integrasi	7
Gambar 1.2 Enam Dinasti Besar Islam	10
Gambar 1.3 Pandangan Dunia Islam	12
Gambar 1.4 Pendekatan Memahami Dunia Islam	14
Gambar 2.1 Aspek Geografi dan Demografi Indonesia	33
Gambar 2.2 Dimensi Budaya Islam di Indonesia	35
Gambar 2.3 Kapasitas Ekonomi Indonesia	37
Gambar 2.4 Kekuatan Militer Indonesia	40
Gambar 3.1 Proses Perumusan Peta Jalan	53
Gambar 3.2 Persentase Populasi Muslim di Indonesia 2010-2025	54
Gambar 3.3 Nilai Ekspor Produk Halal Indonesia	56
Gambar 3.4 Komposisi Ekspor Produk Halal Indonesia	56
Gambar 3.5 <i>Democracy Index</i> 2024	68
Gambar 3.6 Peringkat <i>Global Islamic Economic Index</i> 2024/2025	69
Gambar 3.7 Penetrasi Internet di Kawasan Dunia Islam Tahun 2025	76
Gambar 3.8 <i>Regional Focal Points</i>	81
Gambar 3.9 <i>Issue Focal Points</i>	86
Gambar 3.10 Analisis SOAR dan Pilihan Kebijakan	101
Gambar 3.11 Capaian Kunci 2029-2045	103

Daftar Singkatan

APEC	: Asia-Pacific Economic Cooperation
APJII	: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRI	: Belt and Road Initiative
BRICS	: Brazil, Russia, India, China, South Africa (plus new members)
BSKLN	: Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CGFM	: Core Group on Fisheries Management
CRIF	: Credit Bureau Reporting and Business Information
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GDP	: Gross Domestic Product
GATT	: General Agreement on Tariffs and Trade
G20	: Group of Twenty
IMF	: International Monetary Fund
IORA	: Indian Ocean Rim Association
Kemlu RI	: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
Lemhannas	: Lembaga Ketahanan Nasional
OKI	: Organisasi Kerja Sama Islam
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PPP	: Purchasing Power Parity
PT	: Perseroan Terbatas
QRIS	: Quick Response Code Indonesian Standard
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SGIE	: State of the Global Islamic Economy
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPP	: Trans-Pacific Partnership
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugees
VOC	: Vereenigde Oostindische Compagnie (Perusahaan Hindia Timur Belanda)
WGBE	: Working Group on the Blue Economy
WTO	: World Trade Organization

Kata Pengantar

Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia



Dunia kini berada pada masa transisi besar, ketika tatanan lama tidak lagi efektif memecahkan berbagai persoalan sementara tatanan baru belum hadir. Dalam momentum ketidakpastian global seperti ini, bangsa yang memiliki peta jalan yang jelas akan mampu menavigasi perubahan, sekaligus memberi arah bagi terwujudnya tata dunia yang lebih damai dan berkeadilan.

Buku *Mengintegrasikan Indonesia dan Dunia Islam: Arah, Kerangka, dan Peta Jalan* disusun dalam semangat tersebut. Buku bukan hanya kumpulan gagasan kebijakan, tetapi kerangka strategis agar Indonesia dapat memperkuat posisinya dan berkontribusi secara konstruktif di tengah dinamika global.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh Indonesia adalah memperdalam integrasi dengan Dunia Islam. Sebagai negara Muslim terbesar, Indonesia memiliki tanggung jawab dan kepentingan untuk mendorong kemajuan dan kapasitas Dunia Islam melalui diplomasi yang inklusif, transformatif, dan berorientasi pada kemanusiaan. Sebagai contoh, peran Indonesia dalam isu Islamofobia di PBB dan berbagai inisiatif dialog lintas iman menunjukkan bahwa kepemimpinan kita berdiri di atas nilai, bukan kekuasaan.

Di bidang ekonomi, Indonesia juga terus memperkuat ekosistem kerja sama Dunia Islam, mulai dari industri halal hingga keuangan

syariah. Keseluruhan upaya ini memerlukan visi jangka panjang dan institusi yang solid agar menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri dan Jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII) yang telah bekerja penuh dedikasi menyelesaikan dokumen strategis ini. Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi merupakan fondasi penting dalam memperkaya pemikiran dan memastikan bahwa arah diplomasi Indonesia dibangun di atas kajian yang kuat dan perspektif yang luas.

Semoga karya ini menjadi kontribusi bermakna bagi upaya kita menata langkah Indonesia di tengah perubahan zaman, serta memperkuat peran kita dalam membangun masa depan yang lebih damai dan berkeadilan bagi seluruh umat manusia.

Jakarta, November 2025

Muhammad Anis Matta

Kata Pengantar

Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia



Bismillahirrahmanirrahim

Saya ingin memulai pengantar ini dengan ucapan atas berkat rahmat Allah SWT, dan dengan didorongkan oleh keinginan mulia, kita berhasil menyelesaikan buku ini. Buku tentang mengintegrasikan Indonesia dan Dunia Islam: Arah, Kerangka dan Peta Jalan merupakan testamen penting yang mendudukan Islam dalam konteks cara pandang kontemporer kebijakan luar negeri Indonesia.

Dengan *background* satu dekade terakhir, negara-negara dengan populasi Muslim terbesar telah muncul sebagai salah satu poros baru pertumbuhan ekonomi dunia. Meski negara-negara ini tidak diikat oleh singularitas sistem hukum, tetapi negara-negara tersebut memiliki kesamaan demografis dan nilai-nilai sosial yang menekankan keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan. Potensi kolektif yang dimiliki oleh negara-negara tersebut sangat signifikan, baik dari sisi pasar, sumber daya manusia, maupun kekuatan moral untuk membangun tatanan ekonomi yang lebih berimbang.

Indonesia berada di posisi strategis untuk mengambil peran utama dalam ekosistem ini. Dengan kapasitas ekonomi yang kuat dan jaringan diplomasi yang luas, Indonesia berpeluang menjadi konektor jika peran ini berhasil dimainkan maka Indonesia dapat mempertemukan kepentingan ekonomi negara-negara

berpenduduk Muslim di Asia, Timur Tengah, dan Afrika.

Data yang dihimpun Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) menunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia ke negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada tahun 2024 mencapai USD 33,63 miliar. Sementara Indonesia sendiri mengimpor dari negara-negara anggota OKI dengan nilai impor yang tercatat sebesar USD 27,53 miliar. Angka ini menggambarkan peningkatan signifikan dibandingkan lima tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa kawasan berpenduduk Muslim kini menjadi mitra dagang utama dan strategis bagi perekonomian nasional.

Malaysia menjadi mitra ekspor terbesar dengan nilai USD 12,02 miliar atau 35,8 persen dari total ekspor ke OKI. Disusul oleh Pakistan (USD 3,52 miliar), Persatuan Emirat Arab (USD 3,06 miliar), Bangladesh (USD 3,02 miliar), dan Arab Saudi (USD 2,57 miliar). Komposisi ini memperlihatkan kuatnya peran Asia Selatan dan Timur Tengah dalam rantai nilai destinasi ekspor Indonesia.

Sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, saya melihat bahwa peran Indonesia di tengah komunitas negara-negara berpenduduk Muslim tidak cukup hanya diukur melalui neraca perdagangan. Indonesia harus muncul dalam pusaran pemanfaatan relasi dengan dunia Islam dengan ditopang oleh strategi kebijakan luar negeri yang menyatukan diplomasi ekonomi, pengembangan industri halal, dan kerja sama investasi lintas kawasan. BSKLN berperan dalam mengonversi data dan tren ekonomi semacam ini menjadi arah kebijakan konkret, baik bagi perumusan prioritas kerja sama, maupun untuk mendukung diplomasi ekonomi yang berkelanjutan serta mengambil manfaat besar dari integrasi isu manapun.

Sektor pariwisata halal menjadi salah satu fokus penting dalam rekomendasi strategis BSKLN. Data tahun 2024 menunjukkan

peningkatan signifikan jumlah wisatawan dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim ke Indonesia, dari 1,06 juta pada tahun 2020 menjadi 2,68 juta pada tahun 2024. Mayoritas berasal dari Malaysia, Arab Saudi, dan Turki. Fakta ini membuka peluang pengembangan infrastruktur pariwisata halal lintas negara yang terintegrasi dan berdaya saing global.

Dalam bidang investasi, kontribusi negara-negara berpenduduk Muslim terhadap ekonomi nasional juga terus meningkat. Pada 2024, investasi dari negara anggota OKI ke Indonesia mencapai USD 4,36 miliar, hampir empat kali lipat dibanding tahun 2020. Malaysia menjadi investor terbesar dengan USD 4,24 miliar, disusul oleh Uni Emirat Arab, Turki, dan Yaman. Angka ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan Dunia Islam stabilitas ekonomi Indonesia.

Dari perspektif kebijakan, BSKLN berupaya memastikan agar diplomasi Indonesia di dunia Islam berjalan dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis rasional. Kami menekankan pentingnya *policy coherence* antara diplomasi ekonomi, promosi investasi, dan kerja sama pembangunan. Dunia Islam harus dilihat bukan sebagai ruang kompetisi, tetapi sebagai ekosistem kolaborasi yang menumbuhkan kesejahteraan bersama.

Buku Mengintegrasikan Indonesia dan Dunia Islam: Arah, Kerangka, dan Peta Jalan menjadi bagian dari upaya membangun kerangka kebijakan luar negeri yang lebih strategis dan implementatif. Ia menegaskan bahwa diplomasi Indonesia di antara negara-negara berpenduduk Muslim harus diarahkan pada penciptaan nilai tambah ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan posisi Indonesia sebagai mitra yang kredibel dan visioner.

Jakarta, November 2025

Muhammad Takdir

Ringkasan Eksekutif

Penelitian tentang integrasi Indonesia dan Dunia Islam ini merupakan inisiatif Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) bekerja sama dengan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (Prodi HI UII). Penelitian ini meninjau arah dan peta jalan bagi Indonesia untuk berintegrasi dengan Dunia Islam. Kontribusi orisinal penelitian ini adalah mengidentifikasi, menjelaskan, dan menawarkan gagasan tentang integrasi Indonesia dengan Dunia Islam serta bagaimana Indonesia dapat menjadi episentrum dalam Dunia Islam.

Selain itu, penelitian ini memaknai integrasi sebagai interkoneksi (*interconnectedness*), proyeksi pengaruh (*projection of influence*), dan pengakuan (*acknowledgement*). Dengan menggunakan multi-pendekatan, penelitian ini menawarkan interpretasi dan konstruksi Indonesia dalam dan/atau dengan Dunia Islam. Dalam penelitian ini, Dunia Islam dapat dipahami dari pendekatan sosio-politik, pendekatan geopolitik, pendekatan organisasional, pendekatan konstruksi genealogis, dan pendekatan nilai-nilai kontekstual. Penggunaan metode multi-pendekatan ini bertujuan untuk merangkum dan merangkai diskursus Dunia Islam yang tidak dapat disimplifikasi hanya dari satu perspektif. Salah satu hal penting yang dieksplorasi dalam penelitian ini adalah kontribusi global Dunia Islam dan dialektika sentuhannya dengan Indonesia atau sebaliknya. Tujuannya tentu adalah bagaimana inspirasi pemikiran Indonesia dapat menjadikan wajah Dunia Islam sebagai alternatif tatanan dunia baru pasca surutnya tatanan liberal global di bawah hegemoni Amerika Serikat yang sangat unipolaristik.

Dalam melihat potensi Indonesia sebagai episentrum di Dunia Islam, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti

konteks historis, legal, dinamika geopolitik seiring dengan kontestasi hegemonik yang terus berlangsung. Faktor lain yang juga menarik diobservasi dalam konteks ini adalah masukan variabel statis dan variabel dinamis yang terdiri dari berbagai elemen, seperti geografi, sejarah, budaya, demografis, kapasitas teknologi, kapasitas ekonomi dan militer.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki beberapa elemen yang cukup aksentuatif dilihat dari sudut aspek geografi, budaya, demografi, sejarah, serta kapasitas potensi ekonomi syariah untuk mengembangkan status Indonesia sebagai poros baru dalam Dunia Islam. Laporan ini mencoba merekonstruksi probabilitas Indonesia untuk dapat mencapai status sentral sebagai episentrum dalam dinamika politik global Islam dengan beberapa prasyarat penting yang dipenuhi, seperti kemampuan dalam menentukan prioritas engagement dengan negara-negara Dunia Islam dan *beyond* serta kejelian memetakan isu-isu kunci yang dapat digunakan dalam penguatan hubungan dengan negara-negara Dunia Islam maupun di luar perimeter tersebut.



Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Majelis Umum PBB, New York.

22 September 2025.



Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Multilateral Meeting on the Middle East di ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York.

23 September 2025.

PENDAHULUAN

PENDA
AHULU
PENDAHU
PENDAH

Pendahuluan

Identitas Islam dan Indonesia bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Dalam kajian sejarah, Islam telah hadir di wilayah Nusantara jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya. Eksistensi Islam di Indonesia terefleksikan dalam ragam rupa, seperti ekspresi budaya, nilai, dan norma di masyarakat. Semua akumulasi pengalaman dan ekspresi kebudayaan ini kemudian membentuk identitas bangsa Indonesia. Dengan pengalaman dan akumulasi identitas tersebut, Indonesia dikenal dalam beragam kredensial, seperti ‘negara Muslim (Suni) terbesar di dunia’ dan ‘negara Muslim demokratis terbesar di dunia’.

Kredensial yang tak kalah penting adalah status Indonesia sebagai negara pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Dalam aspek ekonomi, laporan dari *The Global Islamic Economy* pada April 2024 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan *strongest economic ecosystem*, setelah Malaysia dan Arab Saudi. Pada tahun yang sama, Indonesia juga berhasil mendapat predikat sebagai “*Top Muslim Friendly Destination of the Year*”. Tentunya, semua kredensial ini menjadi momentum yang membangun narasi Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki posisi penting dan strategis di Dunia Islam. Tidak hanya pengaruh yang dapat dibangun dari dialektika dan interaksi Indonesia dengan dunia Islam, melainkan juga bagaimana tatanan dunia Islam yang terbentuk itu menjadi alternatif tatanan baru terhadap sistem global saat ini yang rapuh.

Dalam konteks hubungan luar negeri, Indonesia menjalin hubungan yang baik dan komprehensif dengan negara-negara di Dunia Islam serta sering kali dianggap menjadi representasi dunia Islam – meskipun bukan negara Islam – di negara-negara Barat ataupun non-Islam. Malek Bennabi, seorang filsuf kawakan dari kawasan Maghribi, pernah menarasikan Indonesia sebagai poros baru dalam Dunia Islam yang memiliki potensi besar sebagai pembeda. Bennabi menyatakan dalam bukunya yang berjudul *al-Fikrah al-Afrīqiyyah al-Āsiyawīyyah* bahwa gagasan Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi Bandung yang dimotori oleh Indonesia menjadi harapan baru bagi kebangkitan Dunia Islam dan negara-negara di dunia Selatan dalam menghadapi modernitas yang Barat-sentris. Inisiatif Indonesia ini juga ditunjukkan dengan keterlibatan Indonesia intensif Jakarta sejak awal sebagai negara anggota Organisasi

Kerja Sama Islam (OKI) ketika organisasi itu berdiri tahun 1969. Bersama negara anggota OKI, Indonesia selalu aktif dalam mempromosikan perdamaian untuk Palestina, dan mendorong penyelesaian konflik di negara Islam lainnya. Peranan sentral Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina telah diakui tidak hanya di antara komunitas negara Islam melainkan juga oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di tengah suburnya Islam sebagai modal bagi Indonesia dalam membangun kekuatan di Dunia Islam, peran dari elemen masyarakat seperti organisasi masyarakat dan pemuka agama dalam diplomasi Indonesia juga semakin menguat. Gagasan Islam *wasathiyah* dan “Islam jalan tengah” kerap menjadi narasi yang digunakan untuk membangun jejaring dengan negara-negara di Dunia Islam dan *beyond*. Islam telah menjadi modal utama bagi Indonesia untuk misalnya berperan dalam upaya rekonsiliasi konflik yang terjadi di Bosnia-Herzegovina, Filipina, Palestina, Thailand, dan Afghanistan.

Dengan kondisi dan pengalaman Indonesia yang begitu kaya dan beragam, Indonesia seharusnya dapat menjadi aktor kunci dalam kerja sama antar negara-negara Islam, bahkan poros utama Dunia Islam dan *beyond*. Sayangnya, saat ini Indonesia masih belum menjadi poros utama Dunia Islam yang secara *reliable* dapat menjadi jembatan penghubung dengan komunitas internasional lainnya. Hal ini disebabkan karena Indonesia belum memiliki arahan strategis yang jelas dalam kebijakan di Dunia Islam. Inilah yang mendasari urgensi diperlukannya suatu kajian akademik yang dapat membantu identifikasi masalah dan tantangan, dan memberikan rekomendasi arah kebijakan untuk mendukung upaya menjadikan Indonesia sebagai negara poros dalam percaturan sosial, politik dan ekonomi di Dunia Islam yang berpengaruh.

Secara substantif dan praktis bagi kepentingan *posturing* Indonesia dalam dunia internasional, terdapat urgensi agar integrasi Indonesia dengan Dunia Islam dinavigasi lebih jauh untuk kepentingan lebih besar. Langkah awal yang mungkin dapat dilakukan adalah menggagas kajian akademik untuk menggali dan menganalisis informasi yang menjadi sumber data fundamental bagi kepentingan tesis riset ini. Penelitian ini sendiri berupaya mengkaji kompleksitas aspek integrasi Indonesia dalam Dunia Islam, terutama dalam perspektif sosial, budaya, dan politik.

Wujud akhir yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebuah dokumen *policy output* yang memuat arah peta jalan integrasi ini. Untuk ini, Kemlu RI melalui Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) menggandeng Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia (Prodi HI UII) untuk melakukan penelitian tersebut.

Pembahasan dalam laporan penelitian ini akan dibagi dalam tiga bagian utama. Bagian pertama merupakan kajian konseptual yang membahas tentang konsep integrasi, diskursus umum Dunia Islam, dan peluang Dunia Islam sebagai tatanan global multipleks. Bagian kedua akan mengkaji perkembangan dunia Islam kontemporer. Bagian ini akan melihat tantangan globalisasi terhadap Islam, perspektif Indonesia sebagai bagian Dunia Islam, dan titik hubung utama antara Indonesia dan Dunia Islam. Bagian akhir laporan ini memberikan penjelasan tentang rancangan peta jalan integrasi Indonesia dengan Dunia Islam. Pembahasan dalam bagian ini akan memetakan kapabilitas, kekuatan dan sumber daya yang dapat digunakan oleh Kemlu RI untuk mengoptimalkan implementasi peta jalan integrasi Indonesia dengan Dunia Islam.



Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan kembali dukungan teguh Indonesia terhadap *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri mengenai UNRWA yang berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-80.

25 September 2025.



Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dalam Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Palestina yang diselenggarakan di Istanbul, Turki.

3 November 2025.

BAGIAN 1

**INTEGRASI DAN
DISKURSUS DUNIA ISLAM**

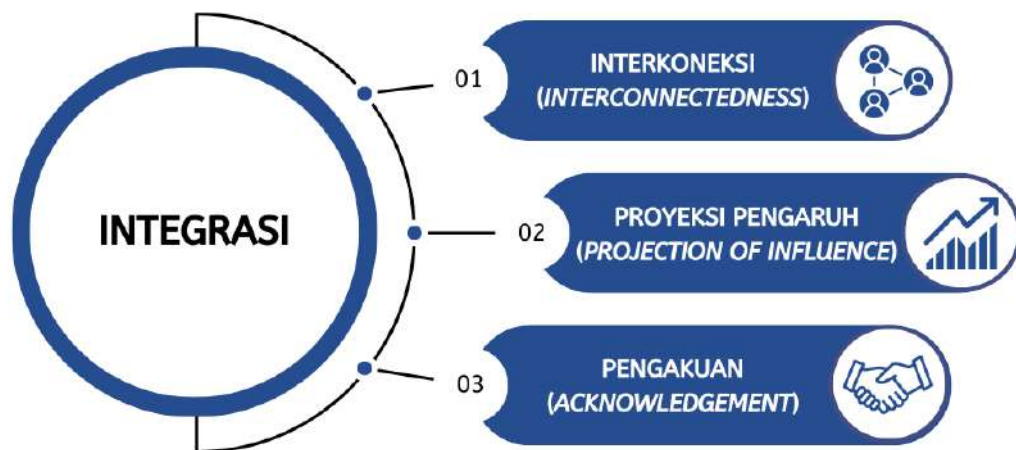
BAGIAN I

INTEGRASI DAN DISKURSUS DUNIA ISLAM

Bagian ini diawali dengan pembahasan singkat tentang konteks ‘integrasi’ yang dipahami dalam penelitian ini. Penelitian ini memberikan keluwesan makna integrasi, yang tidak hanya bermakna pembauran tetapi juga berarti menginkorporasikan sesuatu ke dalam satu sistem *belief* yang kuat. Selanjutnya, pembahasan akan fokus pada diskursus Dunia Islam, termasuk wacana nilai-nilai universalitas Islam.

Diskursus fundamental itu juga akan membahas pemahaman Dunia Islam, perkembangan Dunia Islam dari perspektif historis, pandangan Dunia Islam sebagai diskursus melampaui Timur Tengah, dan bagaimana Dunia Islam dalam konteks sistem dunia. Diskursus ini dielaborasi dari beragam literatur relevan dan akademik dalam payung kajian ilmu ekonomi maupun sosial politik.

Integrasi



Gambar 1.1 Konsep Integrasi

Salah satu konsep penting yang digunakan dalam rancang bangun peta jalan ini adalah konsep integrasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi diartikan *pertama*, ‘sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan

yang utuh dan bulat’. *Kedua*, integrasi juga diartikan ‘sebagai penggabungan aktivitas, program, atau komponen yang berbeda ke dalam satu unit fungsional’. Kamus *Cambridge* mengartikan integrasi sebagai ‘tindakan atau proses menggabungkan dua atau lebih hal dengan cara yang efektif’. Beberapa pengertian berbasis ‘bahasa’ tersebut memberikan indikasi bahwa integrasi memerlukan dua atau beberapa aspek yang menyatu.

Dalam pengertian kamus tersebut, tidak dijelaskan lebih lanjut apakah beberapa aspek yang berbeda itu melebur atau tetap mempertahankan karakteristiknya ketika menyatu. Namun demikian, pemahaman ‘integrasi’ dalam peta jalan ini dimaknai dalam konteks yang lebih jauh lagi. Integrasi dimaknai sebagai interkoneksi (*interconnectedness*), proyeksi pengaruh (*projection of influence*), dan pengakuan (*acknowledgement*).

Interkoneksi bermakna bahwa Indonesia dan Dunia Islam saling terhubung dalam banyak kanal. Interkoneksi ini lebih dari sekadar pola hubungan ‘politik’ atau ‘diplomatik’ antara Indonesia dan Dunia Islam yang sudah terjalin sampai hari ini. Interkoneksi juga menjadi simpul konseptual untuk membangun dialog dan diskusi antarnegara dan masyarakat. Selain menjalin dialog dengan Barat atau antar pemeluk agama lain, dialog dan diskusi dalam Dunia Islam juga penting atau sama krusialnya satu sama lain. Dialog dan diskusi ini dapat dilakukan dalam banyak kanal, misalnya dalam kanal politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan.

Proyeksi pengaruh dapat dimaknai sebagai kapasitas Indonesia dalam memengaruhi arah kebijakan atau perkembangan Dunia Islam. Dalam konteks hubungan internasional, pengaruh digambarkan sebagai salah satu aspek dari kekuasaan (*power*), “yang digunakan negara untuk mencapai berbagai sasaran (di dalamnya termasuk prestise, sumber daya, keamanan, aliansi dan lain sebagainya)” (Moga et al., 2024, p. 1161). Sejalan dengan ini, pengertian integrasi dalam konteks ‘proyeksi pengaruh’ merupakan kapasitas tertentu yang harus dimiliki oleh Indonesia. Kapasitas negara yang dibutuhkan dalam proyeksi pengaruh ini lebih berkorelasi dengan konteks eksternal.

Beberapa referensi mendefinisikan kapasitas negara sebagai kemampuan negara dalam melaksanakan kebijakan dan mencapai tujuan secara efektif (Herre & Arriagada, 2023). Dalam pengertian yang hampir sama, Acemoglu dan Robinson (2012) mendefinisikannya sebagai kemampuan negara dalam mencapai tujuan.

Sementara itu, pengakuan dapat dimaknai adanya ‘penerimaan’ dari masyarakat Dunia Islam terhadap sentralitas posisi Indonesia. Dalam konteks ini, ‘pengakuan’ dapat menunjukkan *role status* Indonesia di Dunia Islam. Dalam hal ini, *role status* diperoleh dari status sosial yang dimiliki Indonesia melalui interaksi dengan negara lain dan melalui perilaku yang kompeten (He & Feng, 2022). Untuk mendapatkan *role status* ini Indonesia dituntut agar konsisten dalam mendemonstrasikan kompetensi dalam isu tertentu, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang tidak sedikit dengan kontinuitas kebijakan strategis.

Diskursus Dunia Islam

Pada tataran umum, Dunia Islam dapat digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam. Tentu penggambaran ini terlalu sempit dan menafikan kompleksitas Dunia Islam sebenarnya. Referensi tentang istilah Dunia Islam sendiri sulit diidentifikasi. Upaya untuk mengidentifikasikan Dunia Islam hanya dari satu sudut pandang akan berisiko mereduksi aspek signifikan lainnya. Misalnya, mencoba mengidentifikasi Dunia Islam hanya sebagai suatu kawasan, baik dalam konteks geografis maupun demografis. Karena cara itu akan menafikan atau mengingkari realitas bahwa tidak semua penduduk di kawasan tersebut adalah Muslim. Bahkan, jika pun penduduknya Muslim, perbedaan manifestasi teks dan konteks agama Islam juga menantang (Rippin, 2008). Selain itu, menggunakan Dunia Islam sebagai sebuah konsep *catch-all* (yang mencakup semua hal), mengindikasikan bahwa Muslim memiliki perilaku dan kepentingan yang satu atau sama.

Enam Dinasti Besar Islam



Gambar 1.2 Enam Dinasti Besar Islam

Lebih jauh lagi, secara historis, ‘Dunia Islam’ tidak pernah benar-benar di bawah satu ‘pemerintahan’. Setidaknya tercatat enam dinasti besar Islam pasca khulafaur rasyidin, Umayyah (661-750 M dan 756-1031 M), Abbasiyah (750-1258 M), Fathimiyah (909-1171 M), Utsmaniyah (1299-1922 M), Mamluk (1250-1517 M), dan Mughal (1525-1857 M). Dinasti-dinasti tersebut memiliki ideologi politik dan manifestasi Islam yang berbeda-beda dengan karakteristik masing-masing. Bahkan dinasti-dinasti tersebut saling menggantikan dan bersaing satu sama lain. Oleh karenanya, Dunia Islam juga sulit didefinisikan secara politik sebagai suatu kesatuan utuh.

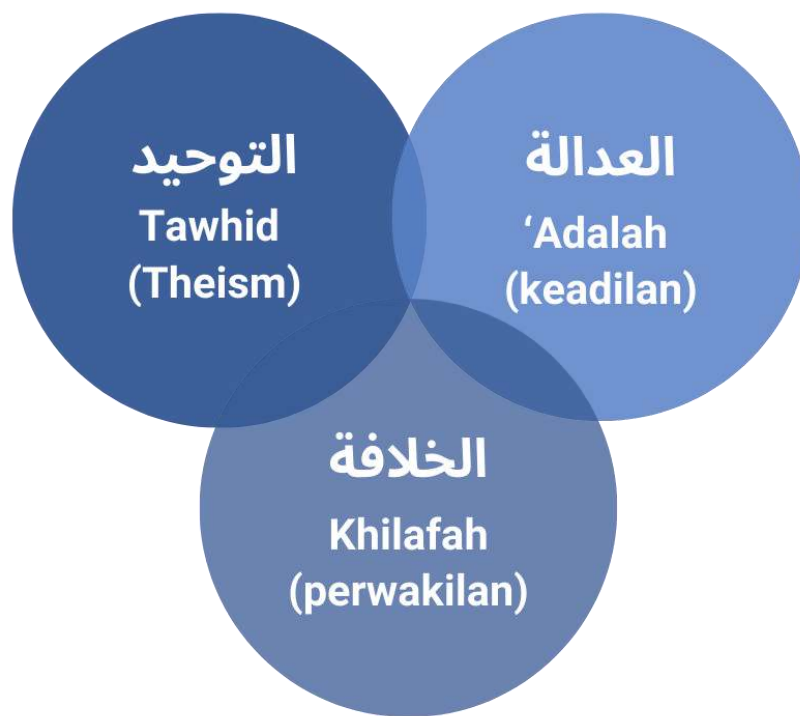
Istilah Dunia Islam juga tidak dapat dipisahkan dari konteks Eropa. Di Eropa, istilah Islam atau Muslim sendiri termasuk istilah ‘baru’ digunakan. Prancis mulai menggunakan istilah tersebut pada 1697 di Prancis, sementara Inggris pada 1818. Sebelumnya, orang-orang Eropa menyebut pemeluk Islam dengan sebutan etnis tertentu, seperti Arab, Turki, atau Saracen (Tolan et al., 2013). Hegemoni Eropa dengan strategi kolonialisme menjadi momen sejarah penting munculnya istilah Dunia Islam.

Dunia Islam dalam Perspektif Teori

Selain tantangan dalam mengidentifikasi atau memberikan definisi akurat terhadap Dunia Islam, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana memosisikan Dunia Islam dalam Hubungan Internasional, tentu terkait tatanan dunia lain, baik yang bersifat *adversary* dan/atau sekedar berbeda semata. Pertanyaan ini mengerucut pada tingkat analisis makna dan unit analisis apa yang dapat dipelajari dalam Dunia Islam.

Dalam tradisi Hubungan Internasional, tingkat analisis terangkum pada tiga tingkatan, yaitu tingkat filosofi, tingkat teori, dan tingkat praktik (Yurdusev, 1993). Sementara unit analisis dapat mencakup, individu, masyarakat atau kelompok individu, dan universal atau kemanusiaan (Yurdusev, 1993). Menurut Waltz (1959), unit analisis atau *image* Hubungan Internasional adalah manusia, negara, dan sistem negara. Singer (1961) membagi unit analisis dalam ‘tingkat’ pengambil kebijakan (individu), nasional, dan sistem.

Dengan menggunakan penjelasan dari Yurdusev (1993), maka Dunia Islam dapat dikategorikan dalam tingkat analisis teori, sedang tingkat analisis filosofinya adalah Islam, dan analisis praktisnya, misalnya hubungan antar negara-negara Islam. Dalam tingkat analisis teori, Dunia Islam dapat dipelajari di antaranya dari aspek *worldview*, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Unit analisisnya dapat melingkupi pemeluknya, negara, kelompok negara Islam atau mayoritas Muslim, sistem politik, dan ekonomi.



Gambar 1.3 Tiga Unsur yang Mempengaruhi Pandangan Dunia Islam

Teori Dunia Islam lekat dengan pandangan terhadap dunia atau *worldview* dan sebagai sistem dunia atau *world system*. *Worldview* Islam dapat dipahami sebagai '*comprehensive conception of the universe and man's relation to it from the Islamic perspective, thereby serving as a basis for one's philosophy or outlook of life*' (Abdullah & Nadvi, 2011, p. 271). Menurut Abdullah dan Nadvi (2011), pandangan Dunia Islam ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu *tawhid* (theism), *khilafah* (perwakilan), dan '*adalah* (keadilan). Ketiga unsur ini kemudian menjadi dasar dalam membentuk tujuan hidup atau *maqashid syariah* (orientasi hidup yang ingin dicapai sebagai individual dan sosial).

Dalam konteks sistem dunia, Dunia Islam dianggap dan jamak dipersepsikan sebagai sebuah sistem dunia yang 'pernah' ada. Wallerstein (Wallerstein, 1974, p. 347) mengartikan sistem dunia adalah '*a social system, one that has boundaries, structures, member groups, rules of legitimation, and coherence*'. Merujuk pada pengertian Wallerstein, beberapa dinasti

besar Islam yang disebutkan sebelumnya menjadi artefak sejarah sistem Dunia Islam. Bahkan dalam kurun waktu tertentu, dunia Islam juga memberikan pengaruh tak kalah fundamentalnya terhadap “dunia lain”. Oleh karena itu, lebih jauh lagi, Voll (1994) meyakini bahwa sistem Dunia Islam dapat diidentifikasi dari *“a distinctive sociomoral symbols for the definition of proper human relationships”*.

Memahami Dunia Islam

Eksplorasi literasi maupun sejarah ini perlu dilakukan karena konsep Dunia Islam dapat dimaknai secara berbeda dari beragam konstruksi pendekatan. Penelitian ini mengajukan dua konstruksi pendekatan, yaitu internasionalis, dan globalis. Variasi konstruksi Dunia Islam ini secara positif menyiratkan kuatnya warisan kekayaan gagasan, ide dan pemikiran yang juga menjadi bukti bahwa Dunia Islam terus berada dalam proses evolusi. Perspektif internasionalis mengidentifikasi tiga konstruksi pendekatan dalam pembahasan diskursus Dunia Islam. Pendekatan tersebut termasuk: pendekatan politiko-sosial, pendekatan geopolitik, pendekatan organisasional. Sedangkan perspektif globalis memaparkan konstruksi genealogis dan pendekatan nilai-nilai kontekstual.

Pendekatan dalam Memahami Dunia Islam



Gambar 1.4 Pendekatan Memahami Dunia Islam

1. Pendekatan Politik-Sosial

Pendekatan ini memandang Dunia Islam dalam konteks internasional sebagai sebuah *society of states* dan *society of Muslim (ummah)* (Dajani, 2014; Voll, 1994). Sebagai sebuah *society of states*, Dunia Islam dilihat sebagai kelompok negara Islam (negara yang berlandaskan syariat Islam) dan negara Muslim (negara dengan penduduk mayoritas Muslim). Perspektif ini berdasarkan pendekatan konstruksi sosial yang bersandar pada argumen bahwa persamaan nilai-nilai dan kepercayaan menjadi faktor utama dalam membentuk identitas pada suatu masyarakat (Onuf, 2013; Wendt, 1999). Dalam konteks ini, meskipun bangsa dan negara-negara bercorak Islam tersebar dan tidak dalam satu struktur politik, negara ini memiliki kesamaan nilai-nilai (*shared values*) yang membentuk identitas sebagai Dunia Islam. Pendekatan ini juga yang dipakai oleh ulama klasik dalam membagi wilayah dunia menjadi *darul Islam*, *darul harb* atau *darul kufar*.

Sebagai *society of Muslim* atau *ummah*, Dunia Islam tidak dibatasi oleh wilayah geografis negara. Interaksi komunitas Muslim dengan masyarakat lainnya di berbagai belahan dunia menjadi representasi Dunia Islam di garis depan. Keberadaan komunitas Muslim dengan jumlah yang cukup signifikan, misalnya di Tiongkok (50 juta jiwa), India (200 juta jiwa), dan Rusia (16 juta jiwa) (World Population Review, 2025) membuat upaya mereduksi Dunia Islam dalam satu konsep *distinctive* yang teralienasi cenderung mengundang perdebatan.

Beberapa penulis misalnya, memandang bahwa *ummah* sinonim dengan Dunia Islam. Hal ini karena *ummah* merupakan kesatuan masyarakat yang tercipta dari persamaan keyakinan, nilai, dan jalan hidup. Meskipun demikian, beberapa penulis lain tidak menyepakati persamaan tersebut. Bahkan, dalam tulisan Anwar Ibrahim (1991), *ummah* merupakan antitesis dikotomi *worldview* Barat, yang berpeluang mengisi narasi pasca Perang Dingin.

2. Pendekatan Geopolitik

Dunia Islam dapat dipandang dari kacamata geopolitik (Akhter, 2023; Melman, 2006; Thaler, 20120046; Tolan et al., 2013). Wilayah geografis ini terutama adalah Jazirah Arab atau wilayah Timur Tengah¹, dan Afrika Utara. Paling tidak terdapat dua alasan umum mendasar yang mendukung pendekatan ini. *Pertama*, secara historis Islam lahir dan berkembang di Timur Tengah. *Kedua*, karena mayoritas negaranya Islam dan mayoritas penduduknya juga Muslim.

Perlu dicatat bahwa Timur Tengah merujuk pada neologisme yang diperkenalkan oleh Thomas Gordon pada tahun 1900, dan mendapat penerimaan luas dengan publikasi dari Alfred Mahan pada tahun 1902

¹ Dari sudut pandang Kritis, penamaan Timur Tengah konstruksi narasi kolonial Eropa, terutama Inggris. Dalam konteks kolonial Inggris, wilayah Timur Tengah berada di tengah-tengah antara Timur Dekat dan Timur Jauh. Wilayah Timur yang dimaksud merujuk pada wilayah yang menjadi 'kekuasaan' Kerajaan Inggris pada masa lalu.

(Koppes, 1976; Melman, 2006). Meskipun pada awalnya pelabelan wilayah ini didasarkan pada luasan wilayah antara Laut Mediterania dan Samudera Hindia (Koppes, 1976), *The Times* mempopulerkan wilayah ini dengan meliputi wilayah kekuasaan Kekaisaran Ottoman (Melman, 2006). Oleh karenanya, identifikasi geografis Timur Tengah sebagai Dunia Islam tidak dapat dihindari.

Adapun secara geopolitik, pengidentifikasian Timur Tengah sebagai Dunia Islam dapat bermakna peyoratif. Timur Tengah bukan hanya label, tapi merupakan konstruksi isolasi yang menyekat Islam hanya di lingkup wilayah itu. Oleh karenanya, Timur Tengah kerap digunakan sebagai barometer politik, ekonomi, keamanan, dan budaya yang menggambarkan 'Islam' secara keseluruhan. Sayangnya, narasi umum Islam dan Timur Tengah cenderung negatif.

Upaya global yang masih dipertahankan sampai saat ini adalah mengondisikan wilayah 'Timur Tengah' sebagai wilayah yang tidak stabil. Maka narasi yang dibangun adalah bahwa Islam bukan agama damai dan pemeluknya saling berperang satu sama lain. Bilgin (2019) pun pernah mengajukan argumentasi bahwa upaya tersebut merupakan strategi *colonial globality* yang merupakan transformasi dari kolonialisme klasik.

3. Pendekatan Organisasional

Pendekatan ini sesungguhnya menampilkan simplifikasi bahwa Dunia Islam dapat diwakili oleh organisasi terbesar negara-negara Islam (Ali & Sultan, 2023; Kayaoglu, 2015; Petersen & Kayaoglu, 2019; Sheikh, 2017). Dalam konteks ini, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dianggap mewakili kepentingan Dunia Islam. Personifikasi OKI sebagai Dunia Islam atau paling tidak mewakili kepentingan Dunia Islam, terlihat dari interaksinya dengan aktor global lain. Kayaoglu (2015) mengidentifikasi ini dari pernyataan aktor global seperti Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lainnya.

Sebagai organisasi terbesar setelah PBB, OKI menjadi platform utama negara-negara Islam dalam menyuarakan sikap anti penjajahan, terutama dalam isu Palestina. Tetapi, OKI juga dikritik sebagai organisasi yang tidak efektif dalam menjalankan misi organisasinya. Beberapa hal yang menjadi penyebab di antaranya adalah problem domestik masing-masing negara anggota, kurangnya dukungan dana, dan perbedaan orientasi politik masing-masing negara anggota. Sehingga, OKI masih belum dapat secara efektif menjadi katalisator yang mengintegrasikan Dunia Islam (Liu & Fan, 2018). Integrasi OKI juga diragukan jika isu Palestina tidak menjadi isu utama, maka keberadaan OKI dapat dipertanyakan.

4. Pendekatan Genealogis

Yang dimaksud dengan konstruksi genealogis dalam pendekatan ini ada usaha untuk memaparkan rangkaian narasi yang membentuk gagasan ‘Dunia Islam’ (Aydin, 2017; Belt, 2009; Dajani, 2014; HURD, 2003). Pendekatan ini merujuk pada perdebatan panjang antar peradaban, antar institusi politik, dan tentunya antar pemeluk keyakinan (terutama Muslim dan Kristiani). Dalam banyak hal, perdebatan ini merupakan respons terhadap pemikiran atau identifikasi Dunia Islam oleh Barat.

Aydin (2017) merunut gagasan Dunia Islam sejak era imperialisme *ummah* sebelum abad ke-19 sampai masa pasca kolonialisme. Menurut Aydin (2017), *term* Dunia Islam sendiri bukan merupakan turunan dari konsep *ummah*. Gagasan ini muncul dari reaksi Muslim terhadap upaya rasisme dan subjugasi imperialis Barat pada abad ke-19. Meskipun bukan menjadi topik debat dalam penelitian ini, pilihan penggunaan *term* Dunia Islam dan Dunia Muslim sendiri dapat menyitir makna yang berbeda. *Term* Dunia Islam berhubungan dengan aspek Islam sebagai ajaran, sedangkan Dunia Muslim lebih bermakna pelaksanaan ajaran Islam oleh pemeluknya (Cook, 2024).

Dalam konteks pasca kolonial, perdebatan ini menyemai kajian tentang konteks ketimuran atau orientalisme dan kebaratan atau

oksidentalisme (Aydin, 2004; Joffé, 2007; Li, 2002; Said, 1977). Bahkan memantik debat kontroversial, misalnya perdebatan tentang benturan peradaban Islam dan Barat (Hafez, n.d.). Lebih jauh, perdebatan ini juga merupakan bagian dari politik dalam mengonseptualisasi Islam dan Barat (Aydin, 2004). Gesekan konseptualisasi ini juga kemungkinan dibentuk oleh residu masa lalu yang menempatkan Dunia Islam maupun negara Islam dalam suatu pengelompokan *adversary* terhadap dunia barat yang kebetulan didominasi oleh negara-negara dengan struktur kekuasaan gereja yang kuat.

5. Pendekatan Kontekstual

Konstruksi terakhir dalam pemaknaan Dunia Islam adalah pendekatan nilai-nilai kontekstual (*contextual values*) (Rehman & Askari, 2010). Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, pendekatan *contextual values* ini memandang Dunia Islam sebagai penerapan nilai-nilai Islam yang dijalankan oleh negara atau pemerintahnya. Pendekatan ini merupakan pendekatan paling tidak lazim dan mungkin kontroversial. Hal ini karena negara-negara berpenduduk mayoritas non-Muslim dapat saja menjadi bagian dari Dunia Islam maupun gerakan yang kebetulan diprakarsai oleh Dunia Islam. Pandangan ini diadopsi oleh *Islamicity Foundation* dengan *Islamicity Indices*-nya.

Dari elaborasi tersebut, maka pemahaman terhadap Dunia Islam sangat tergantung dari konstruksi pendekatan yang dipakai. Hal ini tentunya lumrah dan merupakan kewajaran dalam konteks kajian sosial dan politik. Karena dalam hal ini, diskursus Dunia Islam merupakan konstruksi sosial yang terus dibahas sejalan dengan evolusi dinamisnya dan ekosistem lingkungan yang dihadapinya. Jika pun harus mencoba memformulasi pengertian Dunia Islam yang cukup komprehensif, maka Dunia Islam dapat dipahami sebagai sebuah 'diskursus sosial yang menggambarkan identitas Islam global yang dibedakan dengan diskursus identitas lainnya'.

Krisis Tatanan Liberal

Tatanan dunia, terutama pasca masa Perang Dunia Kedua banyak diakui sebagai tatanan dunia liberal, tatanan hegemoni liberal yang dipimpin oleh Amerika Serikat, atau Tatanan Dunia Amerika Serikat. Tatanan Dunia Amerika Serikat ini menggeser tatanan dunia sebelumnya, yaitu Tatanan Kolonial Inggris, Spanyol, Portugal dan lebih jauh lagi menggantikan Tatanan Dunia Tiongkok. Tatanan Dunia Amerika Serikat ditopang oleh hegemoni norma liberalisme yang menggayut sistem politik, ekonomi, dan keamanan dunia. Tatanan tersebut dipromosikan sebagai tatanan dunia baru yang menjanjikan kestabilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa di dunia. Liberalisme perdagangan, liberalisme sistem keuangan dan jasa, dan peran sentral organisasi internasional, terutama PBB, dan institusi keuangan global Brettonwoods (Bank Dunia, IMF, termasuk WTO), dan aliansi sistem pertahanan menjadi standar kinerja utama Tatanan Dunia ala Amerika Serikat.

Tatanan dunia ini menguntungkan Amerika Serikat dalam berbagai hal. *Pertama*, tatanan tersebut memantapkan Amerika Serikat sebagai negara hegemonik global. Sebagai negara hegemon, keberadaan Amerika dalam berbagai bentuk kehadirannya menjadi seolah-olah diperlukan, meskipun pada kenyataannya lebih banyak karena *proxy setting*. Misalnya, negara-negara di Asia Tenggara memerlukan kehadiran Amerika Serikat untuk mengimbangi ekspansi Tiongkok di kawasan tersebut.

Kedua, tatanan global liberal ini telah berkontribusi dalam memajukan ekonomi Amerika Serikat. Sistem perdagangan liberal global yang awalnya dijanjikan akan memberikan kesejahteraan bagi semua bangsa, terbukti hanya menyejahterakan Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. Sejak disetujuinya GATT, berdirinya WTO dan dijalankannya norma perdagangan liberal, sampai saat ini masih banyak negara yang masuk kategori *least-developed*, *under-developed* alias negara miskin. Negara lainnya pun masih terjebak menjadi *developing states* atau negara sedang

berkembang. Amerika Serikat juga membentuk blok-blok kerja sama perdagangan yang pada akhirnya hanya bertujuan membatasi ruang gerak ekspansi ekonomi Tiongkok.

Ketiga, tatanan liberal global digunakan sebagai alat penekan kekuatan lain yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat. Penggunaan standar pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, misalnya digunakan untuk menekan dan menyudutkan negara-negara oposan Amerika Serikat, utamanya Rusia, Tiongkok, Korea Utara, Iran dan rezim lain yang dianggap mengancam tatanan global Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk membatasi ruang gerak negara-negara tersebut agar tidak ‘berkembang’ menandingi Amerika Serikat.

Keempat, tatanan dunia ini juga memungkinkan untuk memproyeksikan kekuatannya ke seluruh penjuru dunia. Dengan dukungan tatanan global ini, Amerika Serikat mampu menjalankan orientasi pertahanan dan keamanan *containment* dan *forward defence*. Strategi *containment* menjadi *grand strategy* Amerika Serikat dalam mencegah penyebaran komunisme di berbagai wilayah. Sedangkan strategi *forward defence* digunakan untuk ‘melegalkan’ invasi Amerika Serikat ke Irak, Kosovo, Libya, dan Afghanistan.

Bagi negara-negara Islam dan negara mayoritas Muslim, yang sebagian besar masih merupakan negara sedang berkembang, tatanan liberal dunia tersebut tentu tidak dapat dihindari. Untuk tidak terjat dalam kontestasi yang tidak dapat dimenangkan, strategi kebijakan luar negeri, negara-negara tersebut hanya sebatas memiliki opsi *bandwagoning* dan *hedging*. *Bandwagoning* merupakan strategi paling aman dengan melakukan ‘aliansi’ dengan Amerika Serikat daripada berupaya untuk menyeimbangkan kekuatan. Sedangkan *hedging* merupakan strategi ‘mencari aman’ dengan tidak memihak dan menghindari oposisi yang merugikan. Negara Arab kaya minyak, misalnya Arab Saudi dan Qatar lebih cenderung melakukan

bandwagoning, sedangkan negara seperti Indonesia dan Turki memilih untuk *hedging*.

Namun, saat ini kegagalan tatanan dunia yang dipimpin oleh Amerika Serikat ini sedang mengalami krisis. Tatanan liberal global yang telah bertahan selama delapan dekade ini mulai terguncang yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal, mulai goyahnya tatanan liberal ini adalah dengan menguatnya ekonomi beberapa negara yang kemudian bergabung dalam BRICS.

Untuk ‘menyaingi’ hegemoni tatanan liberalisme, BRICS mendirikan *New Development Bank* sebagai alternatif *World Bank*. Secara khusus, Tiongkok sendiri juga mendirikan *Asian Infrastructure Investment Bank*, dan membentuk organisasi perdagangan regional seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership*, dan *Shanghai Cooperation Organization*. Kedua bentuk kerja sama ini merupakan bagian dari proyek besar *Belt and Road Initiative* Tiongkok.

Secara internal, kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang bersifat konservatif setelah terpilihnya Presiden Donald Trump menyebabkan krisis tatanan liberal tersebut. Washington seolah-olah tampak mengisolasi dirinya dari mitra tradisional sendiri. Kebijakan Presiden Trump bahkan dianggap bertolak belakang dengan norma liberal yang selama ini menjadi penyangga tatanan dunia ala Amerika Serikat. Beberapa kebijakan Presiden Trump di antaranya adalah mengeluarkan Amerika Serikat dari beberapa perjanjian internasional yang penting dan memilih membekukan iuran kontribusinya pada beberapa organisasi internasional di bawah PBB.

Presiden Trump misalnya, memutuskan untuk keluar dari perjanjian *Trans Pacific Partnership* (TPP) pada 23 Januari 2017, menghindari dari komitmennya di *Global Compact on Migration* pada 2 Desember 2017, dan lari dari komitmen perjanjian Perubahan Iklim Paris pada Januari 2025. Presiden Trump juga membekukan Amerika Serikat dari keanggotaannya di UNESCO pada 31 Desember 2018, dan dari UNHCR pada 20 Januari 2025.

Teranyar, Presiden Trump juga menaikkan tarif impor untuk barang-barang bagi lebih dari 90 negara dunia.

Dunia Islam sebagai Tatanan *Global Multipleks*

Mulai goyahnya tatanan dunia Amerika Serikat tentu membuka peluang bagi hegemon lain untuk mengisi. Tatanan dunia baru dapat menggantikan tatanan dunia liberal dengan mengajukan norma dan prinsip baru. Namun perlu dicatat bahwa untuk menggantikan tatanan dunia tersebut dibutuhkan kekuatan besar yang mampu menggeser hegemoni Amerika Serikat. Tiongkok merupakan salah satu kandidat utama yang memiliki kemampuan yang mungkin dapat menggeser hegemoni Amerika Serikat. He Yafei (2017), Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok mengungkapkan bahwa, globalisasi (tatanan dunia) sedang berada pada persimpangan jalan karena tiga hal. *Pertama*, keinginan Amerika Serikat untuk mengganti *rule of the game* yang hanya menguntungkan mereka sendiri. *Kedua*, morat-maritnya ekonomi neoliberal yang pada akhirnya membutuhkan solusi. *Ketiga*, munculnya Tiongkok sebagai kekuatan yang berpotensi menjadi *driving force* untuk membentuk sistem dunia baru.

Selain Tiongkok, ada kekuatan alternatif lain yang dapat dipertimbangkan yaitu kekuatan dari Dunia Islam. Saat ini terdapat lima negara Islam yang masuk menjadi anggota BRICS (Indonesia, Mesir, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab) dan Malaysia sebagai negara pengamat. Jika digabung, GDP keenam negara tersebut dapat mencapai lebih dari US\$5,2 triliun. Sedangkan GDP keseluruhan negara anggota OKI adalah US\$9,9 triliun. Nilai GDP ini bisa bertambah jika dihitung dari populasi Muslim global.

Saat ini, tercatat populasi Muslim di seluruh dunia mencapai lebih dari 2 miliar jiwa atau setara dengan 24,1% dari total populasi dunia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, beberapa negara non-Islam, seperti India, Tiongkok, dan Rusia memiliki jumlah populasi muslim yang signifikan. Tentunya, jika populasi Muslim seluruh dunia diperhitungkan, maka jumlah

GDP Muslim global akan berlipat ganda. Populasi Muslim global ini juga memiliki peluang potensi ekonomi signifikan yang dapat diandalkan. Selain itu, potensi sumber daya alam di negara-negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia punya peluang besar dalam meningkatkan posisi Dunia Islam untuk mengisi tatanan dunia baru.

Namun demikian, peluang Dunia Islam dalam menawarkan alternatif tatanan dunia pasca hegemoni Amerika Serikat masih memiliki banyak tantangan. *Pertama*, saat ini angka GDP total negara-negara Islam anggota OKI atau keseluruhan populasi Muslim belum dapat menyaingi nilai GDP Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika Serikat masih menjadi negara dengan GDP terbesar senilai US\$30,5 triliun dan Tiongkok dengan US\$19,2 triliun. Besaran ekonomi, meskipun bukan satu-satunya elemen kekuatan penentu, tetapi elemen ini menjadi tulang punggung hegemon. Bahkan, besaran ekonomi menjadi syarat pertama bagi untuk menjadi kekuatan hegemon.

Kedua, Dunia Islam sendiri masih memiliki tantangan integrasi internal. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, perbedaan ideologi, perbedaan manifestasi ajaran Islam, perselisihan batas wilayah, legasi kolonial, dan kepentingan nasional yang beragam, menjadi faktor ‘disintegrasi’ Dunia Islam. Maka dapat dikatakan bahwa pekerjaan rumah utama Dunia Islam adalah mencari titik temu (*kalimatun sawā’un*) untuk mengintegrasikan negara-negara Islam. Bercermin dari OKI, menjadikan isu Palestina sebagai faktor unifikasi adalah salah satu cara yang dapat digunakan. Tetapi, sebagaimana yang dapat diamati pada saat ini, negara-negara OKI pun tidak selalu bersatu dalam isu-isu lainnya.

Tantangan *ketiga* adalah kemampuan memproyeksikan pengaruh Dunia Islam dan terutama negara-negara Islam, terhadap dunia luar. Sampai saat ini belum ada alat ukur khusus untuk menilai level pengaruh dalam konteks *society of states*, seperti Dunia Islam. Salah satu alat ukur yang dikembangkan oleh Moga et al., (2023) menggunakan enam faktor indeks untuk menilai pengaruh kekuatan suatu negara. Keenam faktor tersebut

adalah luasan dan lokasi geografis, besaran ekonomi, kekuatan militer, pengalaman historis dan budaya nasional, institusi domestik dan keahlian, dan keanggotaan dalam organisasi internasional. Keenam faktor tersebut diukur berdasarkan respons dari publik dengan menggunakan teknik skala *Likert*. Sayangnya sampai saat ini belum ada upaya khusus untuk mengukur proyeksi pengaruh Dunia Islam. Analisis umum yang lazim ditemukan adalah analisis kualitatif yang memberikan interpretasi pengaruh Dunia Islam dari interaksi negara-negara Islam dengan negara lain.

Beberapa tantangan yang teridentifikasi di atas membuat Dunia Islam sukar menawarkan alternatif tatanan global untuk menggeser tatanan liberalisme. Dalam konteks ini, gagasan Amitav Acharya tentang tatanan dunia multipleks alias *multiplex world order* (Acharya, 2014; 2017) patut dipertimbangkan. Menurut Acharya, alih-alih kembali pada era tatanan multipolar, pasca hegemoni Amerika Serikat, dunia akan cenderung membentuk tatanan multipleks. Sebuah tatanan multipleks diartikan sebagai *'multiple modernities, where Western liberal modernity (and its preferred pathways to economic development and governance) is only a part of what is on offer'* (Acharya, 2017, 277).

Dalam tatanan multipleks ini, Acharya menyatakan tidak adanya hegemon tunggal dengan karakteristik, hubungan antar negara saling tergantung, dan terdesentralisasi (menekankan pada pendekatan lokal dan regional) (Acharya, 2014). Ketiadaan atau lunturnya hegemon tunggal juga sejalan dengan asumsi Keohane tentang kerja sama internasional. Menurut Keohane (1984) kerja sama internasional bisa terjadi tanpa adanya hegemon.

Pemaknaan Acharya terhadap tatanan global ini patut dipertimbangkan untuk diterapkan dalam konteks Dunia Islam. Dalam konteks tatanan multipleks ini, Dunia Islam dapat menjadi kompleks tersendiri. Dalam kompleks Dunia Islam ini, norma dan prinsip dalam Islam (*syariah*) menjadi fundamen pembentuk struktur bangunan tatanan Dunia Islam.

Dengan asumsi *size* negara-negara Islam yang hampir samadi tengah tidak adanya negara hegemon, akan menciptakan saling ketergantungan antara satu sama lain. Acharya juga menyatakan bahwa di dalam konteks tatanan multipleks, mode globalisasi masih akan terus berjalan tetapi dengan tidak lagi semata didasari oleh motif perdagangan melainkan motif pembangunan. Selain itu, mode globalisasi akan dimotori oleh koneksi negara Selatan-Selatan. Skema ini tentunya merupakan preferensi penguatan kerja sama ekonomi yang sebelumnya terkunci dalam skema asimetris Utara-Selatan.

Jika kompleks tatanan Dunia Islam menjadi pilihan, maka akan ada beberapa keuntungan. *Pertama*, Dunia Islam akan dapat diidentifikasi sebagai sistem tata kelola hubungan antar negara Islam. Namun, sistem di dalamnya tidak lagi hanya menyederhanakan hubungan antara domain *darul Islam* dan *darul harb* atau *darul kufar* karena *setting* Hubungan Internasional yang dibangun dalam kompleks tatanan Dunia Islam didasarkan pada kesetaraan, keterbukaan, dan bukan pada narasi hegemoni. *Kedua*, dengan identifikasi Dunia Islam tersebut, maka sangat mungkin pula untuk menelisik kepentingannya. Kepentingan utama tatanan Dunia Islam tentu menciptakan dunia yang terinspirasi dari negeri Saba, yaitu *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* (Qur'an 34:15). Kepentingan ini selanjutnya dimanifestasikan misalnya dalam solidaritas antar negara Islam. Dengan tatanan Dunia Islam ini, solidaritas antar negara Islam akan menguat. Hal ini karena setiap negara tidak hanya berpikir untuk memaksimalkan kepentingan negaranya sendiri atau untuk *survive* tetapi juga mengoptimalkan kemaslahatan bersama.



Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Muhammad Anis Matta, dan Wakil Menteri Urusan Politik, Sheikh Khalifa bin Ali bin Issa Al Harthy dalam Pertemuan Konsultasi Politik ke-2 antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Kesultanan Oman di Muscat, Oman.

24 November 2025.



Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Muhammad Anis Matta, mengadakan pertemuan dengan para tokoh umat Islam membahas perkembangan situasi politik dan keamanan di Kawasan Timur Tengah dan global di Jakarta.

29 Juli 2025.

BAGIAN 2

**INDONESIA SEBAGAI
EPISENTRUM DUNIA ISLAM**

BAGIAN II

INDONESIA SEBAGAI EPISENTRUM DUNIA ISLAM

Pemikiran dan Perencanaan Strategis Ke-Indonesiaan, dan Azam Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Wilayah Indonesia, selama berabad-abad, telah menjadi persilangan antar peradaban dan pemikiran. Pada masa Sriwijaya, Nusantara menjadi pusat perkembangan keilmuan agama Buddha. Kemudian, konseptualisasi negara dan politik berkembang dengan graduasi dinamis konsep mandala pada masa Majapahit ketika menjadi episentrum peradaban di Asia Tenggara. Nusantara pada masa Kerajaan-kerajaan Islam berkembang menjadi pintu masuk ke Dunia Islam di sebelah barat. Setelah berakhirnya masa kolonialisme Eropa, Indonesia mencoba untuk menjadi pemimpin dan kekuatan utama dari negara-negara non-blok pada masa awal kemerdekaan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sejarah ini, bukan tidak mungkin Indonesia dapat kembali menjadi episentrum peradaban di Dunia Islam.

Konteks Historis

Jaringan perdagangan antar-kawasan Muslim di nusantara dan Dunia Islam terbangun dan mendorong interaksi budaya, ekonomi, dan politik antara Nusantara dengan Dunia Islam. Pedagang Arab, Gujarat, Persia, dan lain-lain berperan besar dalam penyebaran Islam sekaligus membuka jalur perdagangan dan ekonomi. Dikemukakan oleh Purnamasari et al. (2024), kerajaan-kerajaan seperti Samudera Pasai, Aceh Darussalam, dan Palembang Darussalam memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam melalui perdagangan, pendidikan, dan diplomasi.

Aceh menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara pada Abad ke-16 dan ke-17. Sementara itu, di pesisir utara Jawa, kerajaan berkembang seperti Demak, Cirebon dan Banten dan menjadi pusat peradaban Islam di Jawa menggantikan kekuasaan Majapahit. Perkembangan kerajaan-kerajaan Islam tersebut salah satunya dipengaruhi peran ulama, perdagangan internasional, hingga pertemuan kutub kekuatan asing seperti Belanda dan Portugis.

Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara membangun hubungan dengan negara-negara Islam yang utamanya ada di wilayah Timur Tengah. Kerajaan Aceh membangun hubungan erat dengan Kesultanan Turki Utsmani sebagai dukungan dalam perlawanan terhadap kolonialisme Portugis dan Belanda. Hubungan ini bersifat timbal balik (Göksoy, 2011). Hubungan ini meliputi hubungan diplomasi, militer, dan perdagangan. Mengutip dari Özay (2011), tidak banyak penelitian yang membahas peran Kesultanan Aceh memainkan pengaruh yang menonjol secara global di Dunia Islam. Özay berpendapat bahwa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, Aceh menjadi kekuatan utama di wilayah “periferi” di Dunia Islam yang menjalin hubungan utama dengan pusat Dunia Islam, Turki Utsmani. Kesultanan Aceh menjadi kekuatan yang mendorong meningkatnya pandangan Pan-Islamisme di kawasan Asia Tenggara.

Sementara itu, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, Hindia Belanda tidak pernah menjadi pusat dari peradaban dunia maupun kawasan. Namun, Hindia Belanda menjadi *hub* atau penghubung perdagangan antara Dunia Islam dengan Dunia Timur (*Sinosphere*).

Sulit dipungkiri, VOC bisa menjadi perusahaan terbesar di dunia pada masanya. Nilai kapitalisasi VOC pada puncaknya, jika dikonversi ke dalam nilai saat ini, diperkirakan mencapai US\$7,9 triliun (Yudhistira, 2021). VOC berperan besar mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah di Asia dan menjadikan Amsterdam (bukan Batavia), sebagai pusat keuangan global. Di sini, posisi ini dimanfaatkan oleh penjajah Belanda untuk meraup keuntungan dari Indonesia.

Setelah Indonesia Merdeka, Indonesia berusaha untuk aktif dalam memimpin perdamaian dunia melawan kolonialisme Eropa dengan menjadi salah satu pemimpin di gerakan Non-Blok namun menjadi lebih *low profile* setelah masa Suharto. Diawali dengan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Indonesia, bersama dengan Ghana, Mesir, India, Pakistan, dan Yugoslavia, memimpin pergerakan baru pada saat itu, Gerakan Non-Blok. Sebagai negara baru, Indonesia menjadi negara yang banyak memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan baru pada awal geopolitik dunia. Namun, kondisi perang dingin saat itu membuat Indonesia mau tidak mau mulai menyandarkan diri pada salah satu negara adikuasa, Uni Soviet. Di sini, Indonesia tidak dapat menjadi episentrum dari konstelasi politik global.

Konteks Legal

Politik luar negeri Indonesia berlandaskan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pembukaan UUD 1945 Alinea I menyatakan bahwa Indonesia menolak penjajahan serta menjunjung prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan, “Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Prinsip-prinsip ini merupakan fondasi ideologis tentang bagaimana Indonesia menjalankan politik luar negerinya yang anti kolonialisme dan memberikan dukungan untuk kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia (Asshiddiqie, 2006).

Selanjutnya, Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menegaskan kontribusi negara dalam politik global, yaitu, “Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Bagian ini menunjukkan landasan normatif politik luar negeri Indonesia. Diplomasi ditempatkan sebagai instrumen untuk memperjuangkan kepentingan nasional yang juga bertujuan berkontribusi pada tatanan internasional yang damai dan adil (Asshiddiqie, 2006).

Indonesia menjalankan prinsip *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif dalam urusan politik luar negeri melalui Pasal 11 UUD 1945 (Asshiddiqie, 2006). Di dalam Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa

Presiden dengan persetujuan DPR berwenang menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Artinya, jika pun ternyata diplomasi sudah bukan menjadi jalan yang memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan negara lain maupun komunitas internasional secara umum, maka ketika mengambil keputusan untuk berperang pun akan dilakukan dengan sangat hati-hati.

Kerangka hukum politik luar negeri Indonesia diperkuat melalui UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Republik Indonesia, 1999) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Republik Indonesia, 2000). Kedua undang-undang ini mengatur mekanisme hubungan diplomatik, perjanjian internasional, serta prinsip dasar pelaksanaan politik luar negeri.

Doktrin Kebijakan dan Strategi Luar Negeri

Politik luar negeri Indonesia berakar dari doktrin bebas aktif yang disarikan dari pidato Mohammad Hatta (Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia) pada Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 2 September 1948, berjudul Melayang di Antara Dua Karang (Hatta, 1976). Wakil Presiden Hatta menekankan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi objek pertarungan blok besar (Barat dan Timur), melainkan harus tetap independen (bebas) dan berperan aktif menciptakan perdamaian dunia. Doktrin ini kemudian dijadikan prinsip resmi politik luar negeri Indonesia dan terus menjadi acuan dalam diplomasi kontemporer.

Sejauh ini, Indonesia menurunkan prinsip bebas aktif ke dalam strategi diplomasi yang berfokus pada perlindungan WNI, peningkatan kerja sama ekonomi, partisipasi aktif di organisasi internasional (ASEAN, PBB, G20, dan sebagainya), serta penguatan identitas Indonesia sebagai negara muslim dan demokrasi terbesar di Asia Tenggara, bahkan dunia. Selain itu, Indonesia juga menempatkan politik luar negeri dalam kerangka ketahanan nasional dengan menekankan keterkaitan erat antara diplomasi dan konsep Astagatra

(trigatra: geografi, demografi, kekayaan alam; pancagatra: ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan-keamanan) (Lemhannas, 2020). Perspektif ini melihat politik luar negeri sebagai bagian integral dari strategi menjaga kedaulatan, integritas, dan daya tawar Indonesia di tengah pusaran politik global.

Aspek Geopolitik Indonesia

Geografi, Sejarah, Demografi dan Budaya

Indonesia merupakan negara dengan potensi geografis yang sangat besar. Indonesia memiliki wilayah perairan yang begitu luas membentang dari Samudra Pasifik hingga Samudra Hindia. Sebagai negara bergelar *the largest archipelagic country*, Indonesia terdiri dari 17.380 pulau-pulau (Badan Informasi Geospasial, 2024), dan memiliki potensi sumber daya maritim yang melimpah dan akses ke Kawasan Asia Tenggara dan Oseania. Kondisi geografis Indonesia memungkinkan sektor perikanan Indonesia untuk memproduksi sebesar 23,56 juta ton metrik dengan produksi tangkapan laut (*marine captured*) sebesar 7,8 juta ton metrik pada tahun 2025 (KKP, 2025). Jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar setelah Tiongkok (CRIF, 2025). Laut Indonesia juga menjadi sumber dari berbagai sumber daya alam, seperti timah, nikel, dan tembaga. Hingga tahun 2023 Indonesia telah memproduksi sekitar 137 juta ton bijih nikel, 4 juta ton konsentrat tembaga, dan sekitar 68 ribu ton konsentrat timah (BPS Indonesia, 2025).²

² Data terkini yang diterbitkan pada Januari 2025 oleh BPS adalah data produksi tambang mineral Indonesia pada tahun 2023. Belum terdapat data yang secara spesifik menyebutkan jumlah produksi tambang mineral di area pantai atau pesisir.

Aspek Geografi dan Demografi Indonesia



Negara Kepulauan

Indonesia terdiri dari 17.380 pulau (Badan Informasi Geospasial, 2024)



Jalur Perdagangan Internasional

Selat Malaka dilalui rata-rata 69.081 kapal setiap tahunnya pada 2019-2025 (IMF PortWatch, 2025)



Penduduk Indonesia

Populasi sebesar 284 juta jiwa, 87% beragama Islam (BPS Indonesia, 2025) dan 68% berusia produktif (World Bank, 2024)

Sumber: Dikelola dari berbagai sumber

Gambar 2.1 Aspek Geografi dan Demografi Indonesia

Posisi geografis membuat Indonesia menjadi salah satu dari kawasan dengan jalur pelayaran yang produktif. Selat Malaka yang terletak di antara Pulau Sumatra di Indonesia dan Semenanjung Melayu, menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selat ini membentang dari Laut Andaman melalui Selat Singapura hingga ke Laut Cina Selatan, serta menghubungkan pelaku ekonomi utama di Asia seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan India.

Hingga kini, Selat Malaka telah menjadi jalur laut tersibuk di dunia. Data dari *World Economic Forum*, menunjukkan bahwa, rata-rata 94.000 kapal melewati Selat Malaka setiap tahun atau menggunakan lebih dari 40 pelabuhan yang terdapat di sepanjang jalur ini. Kapal-kapal tersebut mengangkut setidaknya 30% dari seluruh barang yang diperdagangkan di dunia (Feingold & Willige, 2024). Data dari IMF PortWatch menunjukkan, bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2025, rata-rata kapal yang melalui Selat

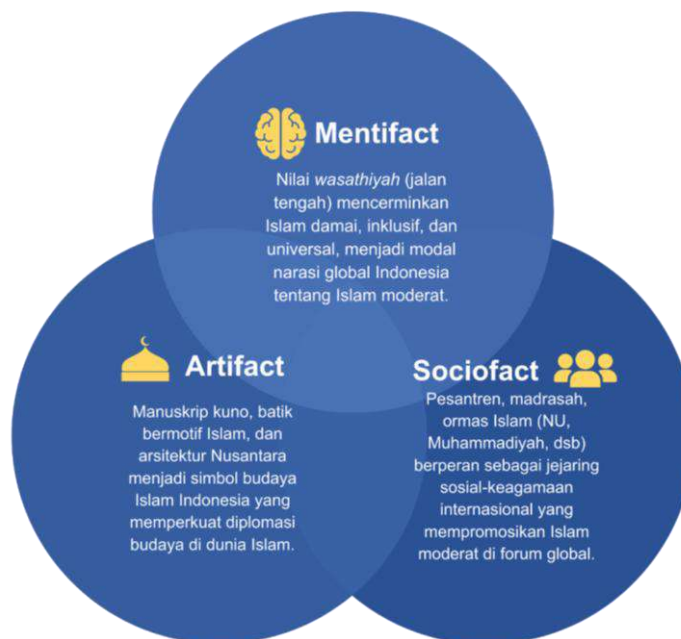
Malaka berjumlah 69.081 kapal, yang meliputi kapal kontainer, kapal barang umum, kapal kargo curah kering, kapal Ro-Ro, dan kapal tangki dengan sebagian besar muatan merupakan sumber daya alam mineral (IMF PortWatch, 2025).³

Kedudukan geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai gerbang Indo-Pasifik yang menghubungkan berbagai jalur pelayaran global. Indonesia pernah memanfaatkan *leverage* sebagai negara maritim besar dengan menjadikan ‘Poros Maritim Dunia’ sebagai agenda besar dari politik luar negerinya. Indonesia telah memegang peran penting dalam *Indian Ocean Rim Association* (IORA), antara lain sebagai Ketua IORA periode 2015–2017, Ketua *Core Group on Fisheries Management* (CGFM) periode 2020–2023, Ketua *Working Group on the Blue Economy* (WGBE) periode 2024–2027, serta menempatkan Duta Besar Salman Al Farisi sebagai Sekretaris Jenderal IORA untuk periode 2022–2024 (Kemlu, 2023).

Secara historis, luasnya maritim Indonesia berpengaruh terhadap penetrasi dakwah Islam dan kekuatan politik yang terpusat di wilayah pesisir (Azman & Supriadi, 2025). Jalur perdagangan laut yang menghubungkan Jazirah Arab, India, dan Tiongkok menjadikan pelabuhan-pelabuhan Nusantara sebagai simpul interaksi ekonomi sekaligus pintu masuk dakwah Islam. Dari sinilah lahir era awal kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh pada abad ke-13, Kesultanan Malaka pada abad ke-15, serta Demak di pesisir utara Jawa pada awal abad ke-16 (Hamka, 2020). Selanjutnya, pusat-pusat kekuasaan maritim lain seperti Banten, Ternate, dan Tidore ikut memainkan peran penting dalam dakwah Islam, hingga kemudian muncul Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16.

³ Perbedaan data antara *World Economic Forum* dengan *IMF PortWatch* mengenai rerata jumlah kapal yang melintasi Selat Malaka disebabkan karena perbedaan dalam jumlah pengukuran. *IMF PortWatch* menggunakan *Automatic Identification System* (AIS) dari kapal untuk menghitung rata-rata tahunan jumlah kapal yang meliputi kapal jenis kontainer, curah kering, barang umum, ro-ro, dan tangki yang melewati titik *chokepoint* selama periode 2019–2024.

Dari segi demografi, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia (Fadhlurrahman, 2025), dengan total lebih dari 284 juta jiwa (BPS Indonesia, 2025). Sekitar 87% penduduk Indonesia atau diperkirakan sebanyak 242 juta orang beragama Islam. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu rumah terbesar bagi Muslim dibandingkan dengan negara Muslim lainnya (Stirling, 2024). Indonesia juga memiliki potensi bonus demografi yang signifikan. Sekitar 68% penduduk Indonesia berada dalam usia produktif (15-64 tahun) (World Bank, 2024). Komposisi demografis tersebut menjadikan Indonesia berpotensi besar baik sebagai pasar domestik maupun sebagai kekuatan kerja produktif. Di samping itu, keberagaman etnis dan budaya juga menjadi karakteristik utama Indonesia. Dengan lebih dari 1200 kelompok suku yang tersebar di seluruh kepulauan (BPS Indonesia, 2024)⁴, Indonesia memiliki keragaman bahasa, tradisi, dan kearifan lokal yang memperkaya identitas bangsa.



Sumber: diolah dari berbagai sumber

Gambar 2.2 Dimensi Budaya Islam di Indonesia

⁴ Data merujuk pada *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan pada Desember 2024. Sedangkan berdasarkan Sensus Penduduk pada tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 1300 suku.

Tiga dimensi budaya Islam di Indonesia, yang mencakup *artefact*, *mentifact*, dan *sociofact* (Huxley, 2010) dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di Dunia Islam. Pada tingkat *artefact*, warisan material seperti manuskrip kuno, tradisi batik dengan motif bernuansa Islam, hingga arsitektur khas Nusantara dapat diproyeksikan sebagai artefak budaya Islam di Indonesia yang memiliki daya tarik dalam diplomasi budaya Indonesia. Pada ranah *mentifact*, nilai-nilai dari praktik Islam di Indonesia seperti moderasi (*wasathiyah*) (Titis Thoriquettyas et al., 2023) dapat menjadi modal Indonesia dalam mengembangkan wacana global tentang Islam yang damai, inklusif, dan universal. Dimensi *sociofact* tercermin dalam praktik lembaga sosial keagamaan seperti pesantren, madrasah, serta organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang memiliki jejaring internasional dan aktif mempromosikan Islam moderat di forum global. Ketiga dimensi ini, apabila diintegrasikan secara strategis, dapat menempatkan Indonesia sebagai aktor kultural utama yang dapat menjembatani peradaban Islam global melalui budaya, pendidikan, dan jaringan masyarakat sipil.

Kapasitas Ekonomi, Teknologi, dan Militer

Indonesia secara bertahap telah mengembangkan kapasitas ekonominya. Bank Dunia menyebut Indonesia sebagai *the largest economy in Southeast Asia* dan berhasil untuk mendapatkan kembali status sebagai *upper middle-income country* (World Bank, 2023). Data dari Bank Dunia juga menunjukkan bahwa tingkat paritas daya beli (PPP) atau daya beli Indonesia berada di peringkat kedelapan terbesar di dunia (World Bank, 2024), sedangkan menurut pengukuran *Lowy Institute*, Indonesia berada pada peringkat kesepuluh pada tahun 2024 (Lowy Institute, 2024)⁵. Lembaga riset *World Economics* memperkirakan PDB Indonesia tahun 2025 mencapai US\$

⁵ Pengukuran kekuatan ekonomi dilakukan berdasarkan PDB menurut PPP, pengaruh internasional, sofistikasi teknologi, dan konektivitas global.

6,22 triliun dalam ukuran PPP, sebesar 44% lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan Bank Dunia dan IMF, dan akan meningkat menjadi US\$ 6,463 triliun pada 2026 (World Economics, n.d.).



Sumber: diolah dari berbagai sumber

Gambar 2.3 Kapasitas Ekonomi Indonesia

Walaupun data tersebut belum dapat menggambarkan secara utuh kapasitas ekonomi Indonesia akibat perbedaan metode dan standar dalam pengukuran. Namun, posisi ekonomi Indonesia dalam ranah global tetap terangkat dengan status daya getar dalam forum-forum ekonomi bergengsi. Indonesia sejak lama merupakan anggota dari *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*. Indonesia telah menjadi anggota dan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi G20 pada tahun 2020, sebuah forum yang merepresentasikan 85% ekonomi dunia. Posisi Indonesia semakin diperkuat dengan bergabungnya Indonesia dengan BRICS pada

tahun 2025 (Araujo & Widiyanto, 2025) dan berupaya untuk akses dengan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) sejak tahun 2024.

Kapasitas industri halal menjadi salah satu faktor yang menguatkan posisi Indonesia di Dunia Islam. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, baik dari sisi konsumsi maupun produksi. Laporan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) 2024/2025 menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga dalam 10 besar negara dengan industri halal terbaik, terutama dalam sektor fesyen, pariwisata, dan obat-obatan serta kosmetik halal (DinarStandard, 2025). Komoditas unggulan Indonesia meliputi produk makanan, vaksin, kosmetik, dan wisata halal menjadi *niche* Indonesia untuk memperkuat daya tawar dalam integrasi ekonomi Islam global (DinarStandard, 2025).

Dalam sektor *modest fashion*, dengan menempati peringkat pertama secara global dalam pengeluaran konsumen Muslim untuk busana santun (DinarStandard, 2025). Ekspor busana santun meningkat menjadi US\$ 632,76 juta hanya dalam periode Januari hingga Juli 2024 (DinarStandard, 2025). Sektor pariwisata ramah Muslim juga mencatatkan posisi strategis, menempati peringkat kedua global dengan nilai pengeluaran mencapai US\$ 11,1 miliar (DinarStandard, 2025). Sektor kosmetik dan farmasi halal mengalami perkembangan pesat dengan pengeluaran kosmetik halal tertinggi mencapai US\$ 5,74 miliar (DinarStandard, 2025). Pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai penyempurnaan regulasi bagi industri kosmetik dan fitofarmaka lokal.

Pada sektor makanan halal yang menjadi sektor dengan total pengeluaran terbesar (mencapai US\$ 159,6 miliar) (DinarStandard, 2025), pemerintah telah mengembangkan kerja sama dengan berbagai negara dalam sertifikasi halal. Di samping itu, keuangan syariah Indonesia menempati peringkat ketiga dan menarik investasi asing terbesar kedua di

antara negara anggota OKI pada 2023. Kemajuan tersebut didukung oleh adanya regulasi baru untuk sukuk daerah (DinarStandard, 2025). Namun demikian, dibandingkan dengan lima sektor halal lainnya, sektor media dan hiburan serta pendidikan Islam masih tertinggal dibandingkan sektor-sektor lain (DinarStandard, 2025).

Kapasitas teknologi Indonesia berkembang pesat dalam dua dekade terakhir dan menjadi variabel dinamis yang menentukan daya saing nasional. Penetrasi Internet di Indonesia yang mencapai 80,66% pada tahun 2025 (APJII, 2025) menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di dunia. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital, yang menurut Google-Temasek-Bain diproyeksikan mencapai nilai US\$ 110 miliar pada 2025, dengan sektor *e-commerce* sebagai kontributor terbesar (Google, Temasek & Bain, 2023). Namun, dari sisi kapasitas inovasi, Indonesia masih menghadapi tantangan. Walaupun ada sedikit kemajuan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, posisi Indonesia di *Global Innovation Index 2024* masih menempati peringkat ke-54 dari 133 negara (WIPO, 2024). Artinya, masih banyak ruang dalam inovasi digital yang perlu dieksplorasi. Pertumbuhan *startup unicorn* lokal seperti GoTo, Traveloka, dan Bukalapak dan *startup* lainnya tidak hanya mempermudah akses ekonomi digital masyarakat, namun juga semakin memperkuat ekosistem teknologi inovatif di Indonesia.

Salah satu inovasi spesifik yang menjadi unggulan Indonesia di bidang teknologi adalah implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Sejak diluncurkan oleh Bank Indonesia pada 2019, QRIS menjadi standar nasional yang terintegrasi dengan berbagai penyedia jasa keuangan, baik bank maupun nonbank. Pada 2023, jumlah *merchant* yang menggunakan QRIS telah melampaui 30 juta, mayoritas adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Ayudiana & Situmorang, 2024). Keunggulan QRIS terletak pada kemampuannya mendorong inklusi keuangan dengan memberikan akses pembayaran digital yang murah dan mudah kepada masyarakat luas.

Daya tarik QRIS memungkinkan Indonesia untuk melakukan kerja sama konektivitas pembayaran lintas negara dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pionir dalam standardisasi sistem pembayaran digital di kawasan.

Kekuatan Militer Indonesia



Sumber: dikelola dari berbagai sumber

Gambar 2.4 Kekuatan Militer Indonesia

Kapasitas militer Indonesia juga menjadi salah satu variabel terikat yang menunjukkan kekuatan Indonesia. Secara historis, Indonesia memiliki kontribusi dalam perdamaian internasional dengan mengirimkan pasukan perdamaian Garuda di Timur Tengah pada 1957 serta pengiriman kontingen TNI dalam berbagai operasi penjaga perdamaian PBB. Namun, Indonesia masih harus meningkatkan kapabilitas militernya sebagaimana yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2025 yang menargetkan ketercapaian kapabilitas militer berdasarkan hitungan dari

Asia Power Index hingga skor sebesar 45 poin (RPJPN, 2024). Saat ini, skor kapabilitas militer Indonesia mencapai 15,7 poin, menempatkan Indonesia pada peringkat 13 pada indikator kapabilitas militer konvensional pada tahun 2024 (Lowy Institute, 2024)⁶ dengan tren peningkatan positif. Di antara sub-indikator yang ada, Indonesia diunggulkan dengan kekuatan dan kesiapan personel dan organisasi yang mumpuni dengan perolehan skor sebesar 23,6 dengan jumlah personel sebanyak 694.700 orang (Lowy Institute, 2024). Walaupun Indonesia telah memiliki kapabilitas militer menengah-atas di Asia, namun, kapabilitas militer Indonesia masih perlu diperkuat dengan modernisasi sistem alutsista dan integrasi kekuatan TNI lintas matra.

Dalam upaya memperkuat kemandirian pertahanan, Indonesia mengembangkan industri militer domestik melalui BUMN strategis seperti PT Pindad, yang memproduksi *Armoured Personnel Carrier* (APC) jenis *Anoa* dan *medium tank* jenis Tank Harimau hasil kolaborasi antara PT. Pindad Indonesia dengan FNSS Savunma Sistemleri dari Turki (PT. Pindad, n.d.), serta PT PAL yang mengembangkan kapal selam dan kapal perang kelas fregat (Kemhan, 2024). Selain itu, pengembangan roket, *drone* tempur, dan teknologi pertahanan berbasis sistem digital menjadi bagian dari strategi modernisasi alutsista nasional. Meskipun sebagian besar sistem persenjataan masih bergantung pada impor, tren industrialisasi pertahanan menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mencapai kemandirian teknologi dan meningkatkan kapasitas militernya. Kombinasi antara kekuatan *manpower*, modernisasi alutsista, serta kemampuan industri pertahanan domestik secara signifikan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam kerja sama pertahanan internasional dan menjaga stabilitas kawasan.

⁶ *Asia Power Index* adalah pengukuran yang digunakan oleh Indonesia dalam menentukan indikator untuk Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan pada Indonesia Emas 2045.

Konteks Perbandingan

Harapan agar Indonesia menjadi negara utama di Dunia Islam sama seperti kepemimpinan kekuasaan Islam di masa lalu seperti kekuasaan Utsmani yang disegani di Eropa membutuhkan kapabilitas yang setara dengan negara *superpower*. Sebuah negara dikatakan *superpower* saat ia memiliki kekuatan ekonomi, militer di atas rata-rata negara lain (Munro, 2025). Dengan kekuatan itu membuat negara ini mampu melakukan berbagai manuver politik baik melalui pendekatan damai maupun agresif dalam memperjuangkan kepentingan luar negerinya.

Politik dunia pasca Perang Dunia Pertama dan Kedua didominasi oleh kekuatan politik barat khususnya Amerika Serikat dan Uni Soviet kemudian dimonopoli oleh Amerika Serikat pasca perang dingin hingga saat ini. Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi kekuatan global di era perang dingin ditopang oleh kekuatan militer dan ekonomi yang dimiliki oleh keduanya ditambah kekuatan industri, teknologi dan aspek budaya atau gagasan yang dimiliki oleh kedua *superpower* ini. Ketidakmampuan Uni Soviet dalam bersaing dalam berbagai dimensi berhadapan dengan Amerika Serikat membuat negara ini tumbang pada akhirnya. Sementara itu, Amerika Serikat tetap bertahan dengan kekuatan *superpower* tunggal saat ini. Meski, berbagai kalangan juga sudah memprediksi naiknya kekuatan Tiongkok, Rusia, termasuk India membuat potensi politik dunia di masa depan menjadi lebih multipolar.

Amerika Serikat menjadi negara *superpower* satu-satunya dapat dilihat dari kekuatan ekonominya yang terbesar dengan GDP sebesar US\$28.78 triliun pada tahun 2024 dan dengan belanja militer terbesar dengan kisaran US\$778 milyar per tahun. Diikuti oleh Tiongkok dengan GDP US\$14.7 triliun dengan belanja militer \$252 miliar dan Rusia dengan GDP US\$1.4 triliun dan belanja militer US\$186 (World Population Review, n.d.).

Dengan kekuatan ekonomi dan militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat itu membuatnya mampu memproyeksikan politik luar negerinya lintas kawasan melalui berbagai bantuan dan kerja sama strategis. Kekuatan itu

pula yang menopang visi politik luar negeri Amerika Serikat seperti dalam upaya menghentikan proliferasi senjata pemusnah massal, mendukung pasar bebas dunia, pemberantasan terorisme, dan kejahatan transnasional, mendorong demokratisasi dan penegakan HAM global, (U.S. Department of State, 2002).

Meski Amerika Serikat banyak dikritik karena berbagai intervensi militer yang ia lakukan di Dunia Islam, upaya konsisten Amerika Serikat dalam membuat berbagai agenda diplomasi publik melalui pendidikan, kegiatan kebudayaan, pertukaran pelajar, serta gagasan demokrasi dan HAM membuat negara ini masih tetap banyak diminati di Dunia Islam khususnya oleh kalangan muda (Rosentiel, 2005; Wike, 2015). Program ini tentunya juga ditopang oleh kreativitas para pengambil kebijakan dan ketersediaan anggaran yang cukup untuk membiayai berbagai agenda tersebut.

Strategi Tiongkok juga sama, dengan kekuatan ekonomi, industri dan teknologi yang dimilikinya negara ini mampu memperkuat pengaruhnya dalam politik internasional melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang diluncurkan di era pemerintahan Presiden Xi Jinping sejak tahun 2013. Melalui proyek yang bernilai sekitar US\$1-8 triliun ini, Tiongkok menjalin kerja sama strategis dengan berbagai negara khususnya dalam bidang investasi pembangunan infrastruktur di sekitar 150 negara lintas benua (Chatzky et al., 2023). Dengan kapasitas itu pula, Tiongkok mampu menjadi penggerak utama dari lembaga BRICS yang memiliki visi menjadi lembaga alternatif terhadap sistem kerja sama ekonomi barat saat ini. Tiongkok juga telah mengikuti strategi Amerika Serikat untuk mendekati publik melalui berbagai program yang relevan.

Proyek BRI telah berhasil menggaet dukungan berbagai negara untuk kepentingan global Tiongkok termasuk dalam menghadapi berbagai upaya agresif Amerika Serikat dalam bidang perdagangan dan isu HAM. Tahun 2019, saat Amerika Serikat berupaya untuk mendiskreditkan Tiongkok di dewan HAM PBB melalui isu Xinjiang dengan mengirimkan surat terbuka yang

ditandatangani 22 negara anggota PBB (France-Presse, 2019), namun mampu dilawan oleh Tiongkok dengan berhasil mengumpulkan dukungan yang lebih banyak, yaitu 37 negara sebagai bentuk dukungan terhadap Tiongkok (Xinhua, 2019). Ini membuktikan bahwa, upaya diplomasi Tiongkok dengan pendekatan kerja sama ekonomi mampu mempengaruhi sikap politik berbagai negara terhadap Tiongkok di PBB.

Dari beberapa contoh di atas terkait negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok menunjukkan bahwa agar dapat berpengaruh secara global membutuhkan kapasitas yang juga besar khususnya kapasitas ekonomi dan militer termasuk juga kekuatan industri, teknologi, sumber daya manusia, dan kepemimpinan (*leadership*) sebuah negara.

Operasionalisasi Sentralitas Indonesia di Dunia Islam

Posisi Indonesia di Dunia Islam dalam Kontestasi Hegemonik

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam memosisikan sentralitas Indonesia di Dunia Islam adalah kontestasi geopolitik yang masih berlanjut antar kekuatan hegemonik hingga saat ini. Kontestasi hegemonik antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia terjadi di beragam *front* geopolitik, termasuk di beberapa wilayah Dunia Islam, seperti di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia-Pasifik. Setelah Perang Dingin usai, kontestasi geopolitik seolah dimenangkan oleh Amerika Serikat dengan penguasaannya efektif di kawasan Timur Tengah dan Asia secara ekonomi, politik, dan militer; dengan pengecualian di Afghanistan dan Kaukasus dengan dinamika yang terjadi di Chechnya. Namun, adanya kejutan geopolitik yang terjadi pada 11 September 2001, perimbangan yang ada di politik internasional mulai mengalami perubahan signifikan. Kebangkitan kekuatan non-Barat mulai mengubah dinamika politik internasional yang semulanya amat dipengaruhi oleh hegemoni Amerika Serikat.

Menghadapi perubahan perimbangan tersebut, negara-negara dalam Dunia Islam memiliki preferensi yang relatif seragam. Pada awal masa setelah terjadinya peristiwa 11 September, mayoritas negara-negara Muslim

‘diarahkan’ oleh Amerika Serikat untuk mengikuti kebijakan politik anti-teror (Wanandi, 2002). Kebijakan politik anti-teror ini diterapkan sebagai sebuah cara untuk mengatur dan menahan pengaruh gerakan radikal dan teror yang berasal dari Dunia Islam untuk dapat dikurangi. Dalam kebijakan yang demikian, negara Muslim berperan sebagai *coalition of the willing*. Hal ini, seperti yang disampaikan oleh Mahmood Mamdani, merupakan strategi Amerika Serikat untuk memetakan kekuatan Muslim yang bersifat ‘baik’ atau ‘buruk’ bagi kepentingan Amerika Serikat di masa tersebut (Mamdani, 2002). Adanya kategorisasi ini sempat membuat Dunia Islam memiliki tendensi pro-Amerika Serikat yang cukup kuat, setidaknya hingga pertengahan jelang akhir tahun 2000-an.

Kecenderungan Dunia Islam untuk membangun koalisi dengan kekuatan non-Barat dimulai ketika terdapat kekecewaan serta kritik yang amat kuat terhadap invasi Amerika Serikat yang berlangsung secara tidak proporsional. Dalam kritik-kritik terhadap dominasi Amerika Serikat dan aliansi negara Barat, beberapa negara Muslim seperti Iran, Pakistan dan beberapa negara Asia Tengah kemudian mulai menguatkan kerja sama dengan Rusia dan Tiongkok dalam sektor politik, budaya dan ekonomi (Aris, 2009). Kejutan geopolitik lainnya terjadi pada Musim Semi Arab yang dikenal juga dengan istilah *ar-Rabi’ al-’Arabiyy*, yang berupaya untuk memajukan hak-hak asasi masyarakat di negara Arab dan memberikan angin segar bagi pemajuan demokrasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (Aljazeera.net, 2020). Namun, adanya kejutan geopolitik (*geopolitical shock*) ini justru membuka kotak pandora yang semulanya tidak pernah terbuka di Dunia Islam manapun. Kotak pandora yang terbuka ini memungkinkan kebangkitan gerakan radikal *vigilant* berbasis keagamaan melakukan upaya untuk mengekspansi pengaruhnya (Dawoody, 2014). Bahkan gerakan radikal *vigilant* berbasis keagamaan yang mengklaim sebagai Negara Islam (di Suriah dan Irak) ini juga mencoba untuk mendefinisikan ulang makna *border* (perbatasan) dan *sovereignty* (kedaulatan) yang selama ini digariskan dengan

logika *Westphalian* (Adraoui, 2017). Tentu saja, upaya ini ditentang secara sinkron oleh negara-negara Muslim, bersama dengan koalisi Barat dan koalisi non-Barat. Kontestasi geopolitik di Timur Tengah pada masa itu mulai nampak dengan adanya keterlibatan Rusia secara militer dan keterlibatan Tiongkok secara politik untuk melakukan intervensi dalam mengembalikan kestabilan dan perimbangan politik di Timur Tengah (Trenin, 2017; Scobell & Nader, 2016).

Di tengah kontestasi tersebut, nampak bahwa Rusia juga sedang memproyeksikan kepentingan geopolitik dan menguatkan klaim kedekatannya dengan Dunia Islam. Rusia menggunakan demografi Muslim dan konteks kedekatan historisnya dengan umat Muslim untuk menguatkan narasi *ahlussunnah waljama'ah* dalam konteks Rusia. Konferensi Grozni yang dilakukan oleh pemerintahan Rusia pada masa itu merupakan sebuah upaya integrasi Rusia dengan Dunia Islam dalam segi penguatan *i'tiqad* dan legitimasi politik Rusia. Dengan menjadikan model keislaman Chechnya bernuansa *tasawuf* dan mengikuti *i'tiqad Asy'ariyyah-Maturidiyyah*, Rusia menjadikan dirinya sebagai salah satu poros dalam dinamika wacana keislaman di era kontemporer (IIFA-AIFI, 2016). Melalui Konferensi Grozni, Rusia juga menggunakan kesempatan tersebut untuk menguatkan kerja sama dengan Al-Azhar dan perguruan tinggi Islam yang sejalan. Dengan penguatan wacana ini, Rusia hendak menguatkan kredibilitasnya di Dunia Islam sebagai aliansi yang kokoh dalam melawan *i'tiqad wahabiyyah* yang dianggap menginspirasi gerakan teror seperti ISIS (Gerilyawan di Irak dan Suriah) yang mengancam integritas politik dan sosial masyarakat Muslim kontemporer (Shagaviev, 2020; Yarlykapov, 2024).

Di waktu yang bersamaan pula, di tengah kompleksitas masalah dengan Turkistan Timur (Uyghur), Tiongkok justru menggunakan momentum krisis untuk mengoptimalkan kerja sama dengan Dunia Islam melalui pemberian beasiswa, program diplomasi publik seperti pertukaran tokoh keagamaan (*eminent persons*) bahkan penjalanan kerja sama antar bisnis

berbasis halal di kedua negara (Ma, 2010; Aswar, Rakhmat & Pahsya, 2022). Tidak seperti Rusia, Tiongkok tidak menggunakan wacana keagamaan sebagai kunci dalam interaksi mereka dengan Dunia Islam. Namun, Tiongkok justru mengulang-ulang kedekatan historis mereka dengan Dunia Islam, serta memperbarui kedekatan historis tersebut dalam komitmen-komitmen kemitraan ekonomi politik yang baru dengan negara-negara di Dunia Islam. Dorongan-dorongan baru dalam hubungan antara negara Muslim beserta dengan Rusia dan Tiongkok menguatkan kemitraan keduanya dalam *platform* kerja sama yang lain, seperti keikutsertaan beberapa negara Muslim dalam forum kerja sama BRICS.

Melihat upaya-upaya baru yang dilakukan oleh Rusia dan Tiongkok, Amerika Serikat saat ini tidak memiliki satu *grand strategy* yang setidaknya bisa dilihat sebagai sebuah strategi spesifik dalam menghadapi Dunia Islam. Pada era Presiden George W. Bush, pemerintahan Amerika Serikat menguatkan *engagement* dengan Dunia Islam melalui program pertukaran, beasiswa, dan serangkaian program diplomasi publik untuk memperbaiki persepsi Dunia Islam terhadap Amerika Serikat (Khan, 2006). Namun, di era Presiden Trump, Amerika Serikat tidak memandang pendekatan normatif sebagai pendekatan yang efektif dalam melakukan pendekatan dengan Dunia Islam. Dengan pengecualian kebijakan *Abrahamic Accord* yang berfokus pada penjalinan hubungan Israel - Dunia Islam yang dimediasi Amerika Serikat, pendekatan yang dilakukan Amerika Serikat kebanyakan bersifat *real politic* yang memberikan penekanan pada supremasi politik dan ekonomi Amerika Serikat di atas segalanya (Lazin, 2023; Snyder, 2024).

Bagaimana Indonesia telah menempatkan diri di tengah kompleksitas kontestasi hegemonik di Dunia Islam Indonesia berupaya beberapa kali menempatkan dirinya secara strategis sebagai poros potensial dalam percaturan politik Dunia Islam kontemporer. Hal ini dapat dilihat dari peran Indonesia yang memiliki peran kunci dalam memelopori kerja sama negara yang baru merdeka dalam kerangka Konferensi Asia-Afrika, yang kemudian

makin dipertebal kerja samanya dalam Gerakan Non-Blok dan dikontekstualisasikan dalam Konferensi Islam Asia-Afrika (Ibatullin, 2015). Aktivisme ini tidak pudar di era Orde Baru dengan dorongan Indonesia yang aktif menguatkan kerja sama antar negara Muslim di tengah genosida Bosnia melalui forum Gerakan Non-Blok dan Organisasi Kerjasama Islam (Suryadinata, 1995). Setelah peristiwa 9/11, Indonesia mulai memperkenalkan gagasan Islam yang berdasarkan pada moderasi dan nilai-nilai seperti *rahmatan lil 'alamin* serta *wasathiyyatul Islam* yang kemudian dikerangkakan dalam berbagai macam wacana, seperti 'Islam Nusantara', 'Humanitarian Islam' dan 'Islam Berkemajuan' oleh organisasi masyarakat Muslim seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dalam perkembangan narasi tersebut, Indonesia berupaya untuk menarasikan ulang pengalaman berkeislaman ala Indonesia untuk menjadi inspirasi bagi masyarakat global. Namun, karena adanya strategi yang kurang efektif, perencanaan yang kurang matang, serta implementasi yang masih tidak koordinatif, wacana ini kemudian menguap begitu saja di tengah dinamika pelaksanaan politik luar negeri Indonesia (Alvian & Ardhani, 2023).

Upaya integrasi peran Indonesia dan optimalisasi sentralitas Indonesia dalam Dunia Islam perlu diupayakan dengan memperbaiki paradigma geopolitik dan menentukan prioritas dalam melakukan *engagement* dengan negara-negara di Dunia Islam. Dalam aspek ini, Indonesia perlu membagi Dunia Islam menjadi dua zona geografi utama, yakni Cekungan Pesisir Luar (*Nearshore Basin*) dan Cekungan Pesisir Dalam (*Distant Shore Basin*). Interaksi masyarakat Muslim Indonesia secara historis telah terbangun dengan intensif melalui jalur-jalur perdagangan maritim sejak era awal keislaman. Berangkat dari modalitas historis dan ekonomi inilah, Indonesia sebenarnya bisa membangun kebijakan strategis untuk membangun kerja sama yang lebih kuat dengan masyarakat Muslim yang berada di kawasan *Nearshore Basin*, seperti komunitas Muslim di Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Rusia dan Asia Tengah. Demografi Islam

di kawasan ini jumlahnya sudah mencapai hampir melewati angka 500 miliar, sehingga interaksi Indonesia dengan Muslim di kawasan *Nearshore Basin* perlu menjadi prioritas utama. Eksistensi kerja sama ekonomi dan sosial yang telah berjalan sejak berabad-abad lampau juga semestinya menjadi batu loncatan dalam mengoptimalkan kepemimpinan dan sentralitas Indonesia di Dunia Islam.

Poros utama Dunia Islam memang berada di *Distant Shore Basin*, di mana wilayah ini memang memerankan peran strategis dalam perkembangan wacana dan sejarah keislaman hingga kini. Meskipun begitu, *diplomatic load* dalam interaksi Indonesia dengan negara-negara di kawasan *Distant Shore Basin* terlampau besar, terutama dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. *Diplomatic load* ini disebabkan oleh adanya permasalahan yang sifatnya *pre-existing*, seperti isu pekerja migran dan isu asimetri dalam kerja sama ekonomi. Indonesia dapat tetap melakukan pendekatan aktif dengan negara-negara di kawasan *Distant Shore Basin*, namun tentu saja dengan memperhatikan *diplomatic load* yang perlu diselesaikan agar peran Indonesia betul-betul berjalan secara optimal di Dunia Islam.



Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Christiawan Nasir, pada Pertemuan Tingkat Menteri Komite Palestina Gerakan Non-Blok (GNB) yang berlangsung di Kampala, Uganda.
15 Oktober 2025.



Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arif Havas Oegroseno, dalam *Commemoration of the 70th Anniversary of the Asian-African Conference: "The Global South in a Shifting World Order: Challenges, Aspirations, and the Road Ahead* di Bandung.
16 April 2025.

BAGIAN 3

RANCANGAN PETA JALAN

BAGIAN III

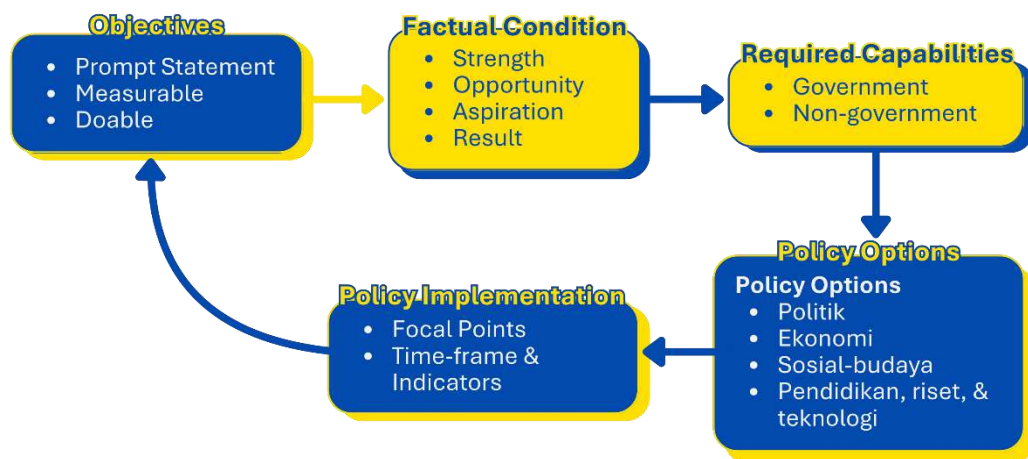
RANCANGAN PETA JALAN

Peta jalan dalam mengintegrasikan Indonesia dengan Dunia Islam ini berisi usulan strategi kebijakan–berdasarkan pada kajian akademik. Kajian akademik yang dimaksud adalah upaya penelaahan kualitatif⁷ dengan menggunakan sudut pandang studi Hubungan Internasional. Desain peta jalan ini dimulai dengan kajian konseptual yang dilakukan sebagai tahap atau fase pertama penelitian. Fase kedua dilanjutkan dengan mendesain proses atau alur kebijakan dalam peta jalan. Paparan dalam dokumen ini akan menjelaskan proses tersebut.

Proses

Sebagaimana yang biasa dilakukan dalam pengambilan kebijakan, kebijakan peta jalan ini menggunakan proses atau tahapan. Tahapan dalam penyusunan peta jalan ini terdiri atas perumusan tujuan, analisis kondisi faktual, identifikasi kapabilitas yang dibutuhkan, pilihan kebijakan, dan implementasi kebijakan. Rangkaian proses ini mengindikasikan bahwa rumusan kebijakan peta jalan ini disusun secara rasional. Proses tersebut dapat digambarkan dalam *flowchart* berikut.

⁷ Penelaahan kualitatif bermakna yaitu pengambilan kesimpulan dari analisis data menggunakan interpretasi dari peneliti yang didasarkan pada keahlian tertentu yang sesuai dengan bidang ilmunya. Hasil dari telaah kualitatif pada umumnya berupa narasi atau deskripsi.



Gambar 3.1 Proses Perumusan Peta Jalan

Tujuan Peta Jalan

Tujuan dari peta jalan ini adalah memberikan usulan strategi kebijakan yang membantu pemerintah dalam mengintegrasikan Indonesia dan Dunia Islam. Sebagai usulan, peta jalan ini bersifat garis besar, dan alternatif. Tujuan primer integrasi Indonesia dan Dunia Islam adalah *memperkuat identitas dan sentralitas Indonesia sebagai negara muslim yang memiliki kapasitas dalam memengaruhi arah perkembangan Dunia Islam*. Tujuan ini menggarisbawahi bahwa konstruksi identitas Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi muslim besar akan menentukan kepentingan nasional Indonesia dalam interaksinya di Dunia Islam. Tujuan ini nanti akan diturunkan menjadi opsi kebijakan yang dibagi dalam empat ranah strategis: politik; ekonomi; sosial budaya; serta pendidikan, riset dan teknologi.

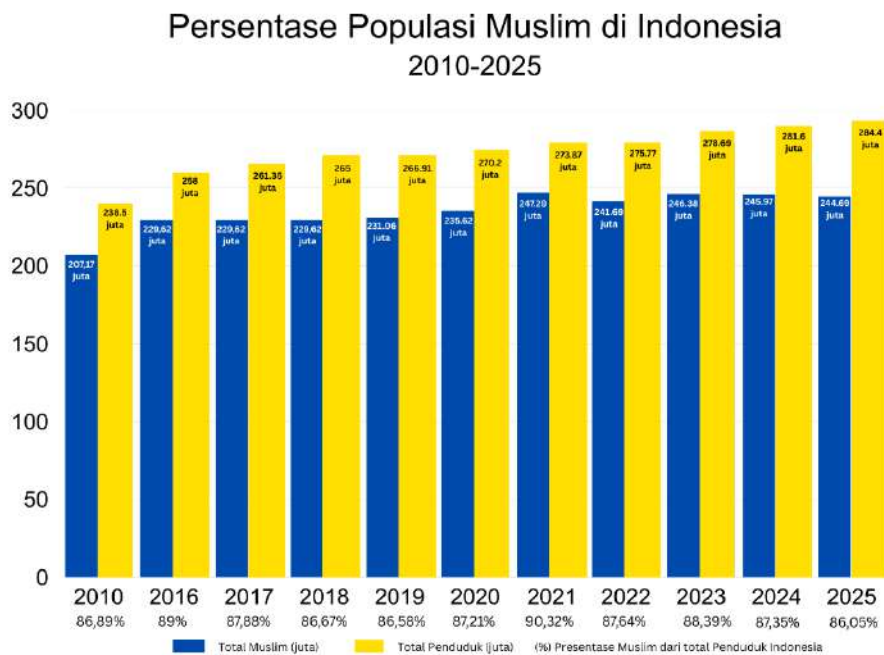
Kondisi Faktual

Kondisi faktual dalam peta jalan ini didasarkan pada hasil kajian konseptual posisi Indonesia dalam konteks Dunia Islam. Analisis kondisi faktual memanfaatkan pendekatan SOAR (*Strength, Opportunities, Aspirations, Results*). Pendekatan ini dipilih karena pendekatannya yang kolaboratif dan positif. Berikut adalah analisis singkat SOAR yang diidentifikasi.

Strength (Kekuatan)

Tangible Strength

1. Jumlah populasi muslim yang besar (salah satu yang terbesar di dunia)



Sumber: Badan Pusat Statistik

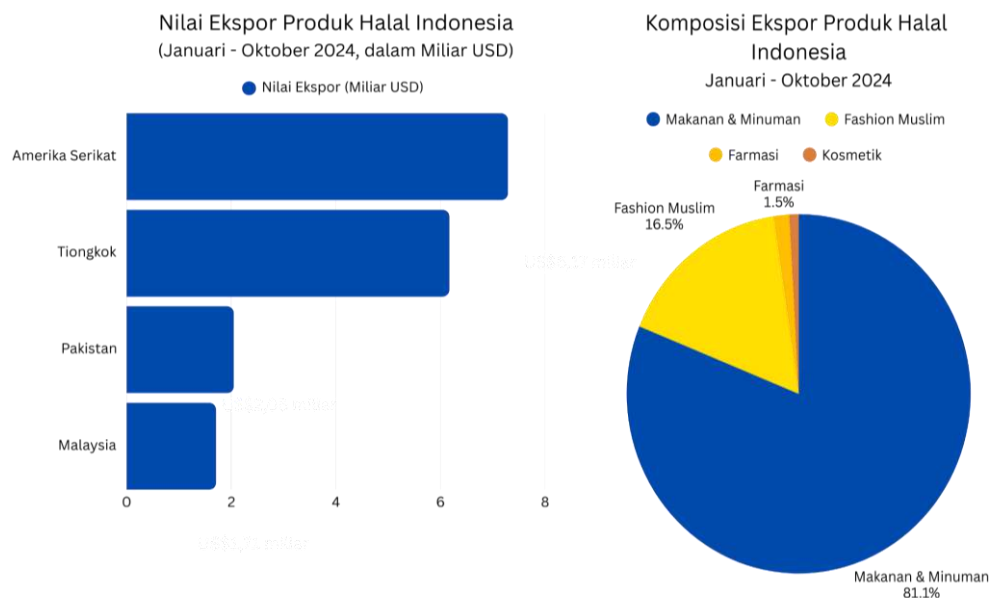
Gambar 3.2 Persentase Populasi Muslim di Indonesia 2010-2025

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia berdasarkan laporan dari *worldpopulationreview.com* (2025) yang diikuti oleh Pakistan dan

India. Jumlah penduduk muslim di Indonesia berjumlah 249,82 juta jiwa, atau setara dengan 87,14% dari total populasi nasional yang mencapai 286,69 juta jiwa menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) (Perdana, 2025). Jumlah muslim yang banyak ini menjadi potensi besar Indonesia memimpin Dunia Islam dari berbagai aspek seperti politik, sosial, ekonomi, teknologi, pendidikan, dan budaya.

2. Negara muslim dengan ekosistem ekonomi yang tangguh

Dalam bidang ekonomi, luas wilayah, letak geografis, dan jumlah populasi menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar besar dunia. Potensi ini membuat Indonesia selalu menjadi incaran pasar dan investasi dari berbagai negara. Indonesia juga merupakan salah satu pusat ekonomi halal global, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2023, nilai pasar halal Indonesia mencapai sekitar US\$279 miliar dan diproyeksikan meningkat tajam menjadi US\$807 miliar pada tahun 2030 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 14,2%. Dukungan kebijakan pemerintah, pertumbuhan kelas menengah, dan pesatnya perkembangan ekonomi digital menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama bagi investor lokal maupun internasional dalam berbagai sektor halal, seperti makanan dan minuman, fesyen muslim, serta pariwisata halal.



Gambar 3.3 Nilai Ekspor Produk Halal Indonesia

Gambar 3.4 Komposisi Ekspor Produk Halal Indonesia

Pada tahun 2024 lalu nilai perdagangan produk halal buatan Indonesia dari Januari hingga Oktober mencapai US\$53,73 miliar, meningkat 0,58% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Negara tujuan utama ekspor produk halal Indonesia meliputi Amerika Serikat (US\$7,29 miliar), Tiongkok (US\$6,17 miliar), Pakistan (US\$2,05 miliar), dan Malaysia (US\$1,71 miliar). Produk halal yang diekspor didominasi oleh: makanan dan minuman halal (81,16%); fesyen muslim/*modest fashion* (16,48%); farmasi (1,48%); kosmetik (0,88%) (Antaranews, 2024).

Indonesia juga aktif melakukan berbagai kerja sama bilateral strategis dengan negara-negara Islam. Salah satunya adalah kemitraan intensif dengan Turki. Sejak 2022, Kementerian Perindustrian bersama KBRI Ankara menyelenggarakan Paviliun Indonesia di OIC Halal Expo Istanbul, mempromosikan lebih dari 100 UMKM bidang makanan, farmasi, kosmetik, tekstil, dan fesyen halal (Yuniarti, 2024). Pada OIC Halal Expo 2023, 18 pelaku usaha Indonesia terlibat dalam pameran, menghasilkan komitmen bisnis saat itu senilai US\$ 670.000. Momentum tersebut berlanjut pada Halal Expo 2024 saat paviliun Indonesia dikunjungi lebih dari 3.000 orang dan menghasilkan

prospek bisnis sekitar US\$ 5,9 juta (Putri, 2024). Selain itu, Turki juga menjadi mitra dalam pembangunan zona industri halal di Kawasan Batam-Bintan-Tanjung Pinang (Gunawan, 2024).

Berdasarkan *State of The Global Islamic Economy Report* (SGIER) 2024/25, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam ekosistem industri halal dunia, setelah Malaysia dan Arab Saudi, dilanjutkan UEA dan Bahrain di peringkat keempat dan kelima. Meskipun Indonesia menduduki posisi ketiga, Indonesia mencatat kenaikan skor tertinggi dibanding tahun 2022, yakni naik 19,8 poin. Sebaliknya, Malaysia yang berada di peringkat pertama justru mengalami penurunan skor sebesar 28,1 poin. Indonesia juga unggul dalam tiga sektor penting yang erat kaitannya dengan manufaktur, yaitu *modest fashion* dengan skor 106,5 dan menempati peringkat pertama dunia, sektor farmasi dan kosmetik halal di posisi kedua dengan skor 85,8, serta sektor makanan halal di peringkat keempat dengan skor 78,8 (Direktorat Perwilayahan Industri, 2025).

Segala upaya yang Indonesia lakukan baik dalam aspek kerja sama dan promosi Industri halal adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produk industri halalnya yang masih berada di peringkat kedelapan sebagai pengeksport produk halal di bawah Tiongkok, India, Brazil, Rusia, Amerika Serikat dan Turki (Bappenas, 2024).

3. Destinasi ramah Muslim

Di bidang pariwisata halal, Indonesia telah membuktikan diri sebagai pemimpin global. Berdasarkan laporan *The Global Muslim Travel Index 2025* (2025), Indonesia menduduki peringkat kelima sebagai destinasi wisata halal terbaik setelah Malaysia, Turki, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Indonesia turun empat peringkat setelah berturut-turut selama dua tahun 2023 dan 2024 menempati posisi pertama. Penurunan peringkat ini bukan disebabkan oleh nilai Indonesia yang menurun, tapi negara-negara lain yang performanya meningkat.

Indonesia memiliki beberapa destinasi wisata unggulan yang diakui dunia dalam konteks wisata halal ini seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Lombok yang menggabungkan situs warisan Islam dengan pilihan rekreasi seperti pantai dan belanja. Makanan halal juga dapat diakses secara luas, dan fasilitas salat tersedia di bandara, pusat perbelanjaan, dan kota-kota besar tempat wisata. Meskipun demikian, Indonesia masih harus bekerja keras untuk terus meningkatkan performanya agar bisa menjadi yang paling unggul dalam bidang ini.

4. Banyaknya lembaga pendidikan Islam

Dalam bidang pendidikan, hingga September 2024, tercatat 87.397 madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 83.351 merupakan madrasah swasta, sementara 4.046 adalah madrasah negeri (Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah, 2024). Sementara itu, perguruan tinggi Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama pada tahun 2025 berjumlah sekitar 907 perguruan tinggi, dengan rincian 848 perguruan tinggi swasta dan 59 perguruan tinggi negeri (Haq, 2025). Jumlah lembaga pendidikan ini membuat posisi Indonesia menjadi salah satu negara Muslim dengan jumlah lembaga pendidikan Islam terbanyak di dunia.

Jumlah lembaga pendidikan tersebut menjadi potensi besar bagi Indonesia untuk menjadi magnet pusat pendidikan Islam dunia, tentunya dengan syarat adanya strategi pemerintah bekerja sama dengan Lembaga pendidikan untuk meningkatkan peminat pelajar dari negara-negara Muslim lainnya. Jumlah pelajar asing di Indonesia masih sangat rendah dengan estimasi 5.628 mahasiswa asing pada tahun 2025 (Zatnika, 2025) dibandingkan dengan Malaysia dengan jumlah 170.000 pelajar asing (Ashraf, 2025). Di antara penyebab dari minimnya jumlah pelajar asing antara lain adalah terbatasnya informasi, minimnya ketersediaan beasiswa, rendahnya

reputasi kampus, serta kendala bahasa yang dihadapi oleh calon mahasiswa asing (Fadhli, 2024).

Dalam konteks pendidikan tinggi, berdasarkan laporan *QS World University Rankings (2025)*, Indonesia masih tertinggal jauh dari universitas-universitas dari negara-negara mayoritas Muslim lain seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Qatar. University Malaya misalnya menempati posisi 58, Universitas King Saudi berada di urutan 143, Universitas Qatar berada di urutan 112. Indonesia sendiri menempati urutan 189 untuk Universitas Indonesia dan posisi 224 bagi universitas Gadjah Mada.

5. Memiliki dua organisasi massa Islam terbesar di dunia

Rumah bagi dua ormas Islam terbesar di dunia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah di antara potensi besar lainnya yang dimiliki oleh Indonesia. NU dan Muhammadiyah, selain memiliki jumlah anggota yang besar dengan masing-masing 150 juta dan 50 juta orang, juga aktif berkontribusi dalam berbagai dinamika politik, sosial, dan keagamaan di Indonesia dan di panggung internasional.

NU dan Muhammadiyah misalnya, aktif berperan dalam berbagai forum dialog lintas agama di tingkat global. Kedua organisasi Muslim terbesar itu tergolong aktif menyuarakan kepedulian dan dukungan kemanusiaan terhadap umat Islam di negara lain seperti di Palestina, Rohingya, Suriah, dan Yaman. Lebih spesifik, Muhammadiyah terlibat aktif dalam proses perdamaian di Afrika Tengah termasuk kontribusi Muhammadiyah dalam mendukung perdamaian di kawasan Thailand Selatan (masyarakat Pattani) dan Filipina (Bangsamoro) (antaranews.com, 2024).

Di sisi lain NU juga aktif mendukung toleransi antar umat beragama global melalui berbagai forum seperti *International Conference of Islamic Scholars (ICIS)* 2016 yang menghimpun para ulama dari Sunni dan Syiah moderat untuk mewujudkan perdamaian dunia; *International Summit of Moderate Islamic Leaders (ISOMIL)* tahun 2019, sebagai wadah ratusan

delegasi ulama dari berbagai negara serta sebagai upaya mencari format terbaik untuk mewujudkan dunia yang berkeadilan (NU Online, 2022). Saat Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan G20 tahun 2022, NU juga menginisiasi pertemuan R20 yang melibatkan tokoh lintas agama dari negara-negara anggota G20 untuk membahas berbagai persoalan kemanusiaan global dan peran vital dari tokoh-tokoh lintas agama (Kompas, 2022).

Para anggota Muhammadiyah dan NU juga menyebar di berbagai negara dan membentuk komunitas cabang seperti PCINU (Pengurus Cabang Internasional NU) dan Pengurus Cabang Internasional Muhammadiyah. Sebaran berbagai jaringan itu membuka peluang penyebaran gagasan Muslim Indonesia di berbagai negara dengan lebih mudah. Contohnya adalah Imam Shamsi Ali, salah satu anggota Muhammadiyah yang dikenal sebagai tokoh lintas agama yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan dan dakwah di Amerika Serikat.

Lebih lanjut, Indonesia juga memiliki tokoh-tokoh pemikir terkemuka yang sudah dikenal luas oleh masyarakat internasional seperti K.H. Abdurrahman Wahid, K.H. Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, Prof. Amien Rais dan Prof. Din Syamsuddin dari Muhammadiyah, termasuk juga Prof. Dr. Azsyumardi Azra, dan Prof. Quraish Shihab. Tokoh-tokoh ini dengan karya-karya dan gagasan-gagasan yang mereka miliki bisa diterjemahkan ke bahasa Internasional khususnya Inggris dan Arab agar dapat berkontribusi lebih menyebarkan pemahaman Islam berdasarkan cara pandang dan pengalaman tokoh-tokoh Muslim di Indonesia. Indonesia dapat belajar dari tokoh Islam Prof. Syed Muhammad Naquib Al-Attas yang memiliki berbagai karya pemikiran Islam yang telah diakui oleh kalangan akademisi dan pemikir secara internasional. Di Indonesia sebenarnya juga di masa lampau telah memiliki warisan intelektual dari para ulama Nusantara yang menuliskan berbagai karyanya dalam bahasa Arab seperti Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Yasin al-Fadani,

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, dan Syekh Sulaiman ar-Rasuli al-Minangkabawi.

Intangible Strength

Negara demokratis Muslim terbesar

Dalam bidang politik, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India (Buchholz, 2024). Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi negara demokrasi melalui reformasi undang-undang, penghapusan dualisme militer, dan pelaksanaan pemilu yang jujur dan transparan. Selain itu, Indonesia juga menjamin kebebasan berbicara, dan berserikat. Hal ini berdampak besar terhadap dinamika keberislaman di Indonesia dengan munculnya berbagai gagasan yang saling berdialektika di Indonesia baik dari gagasan yang lahir dari lokalitas Indonesia; atau yang terinspirasi dari gerakan-gerakan transnasional dari Timur Tengah; maupun modernis dari kampus-kampus Barat.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius yang membuatnya disoroti oleh pemeringkat demokrasi dunia seperti *Economist Intelligence Unit* (2025). Faktor-faktor yang disebut memberi pengaruh penting terhadap tantangan itu antara lain, represi terhadap kelompok-kelompok oposisi; perubahan undang-undang pemberantasan korupsi yang dianggap melemahkan institusi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi); netralitas kekuasaan dalam pemilu dan pembatasan hak-hak bersuara rakyat terhadap kekuasaan. Semua itu terjadi semasa pemerintahan sebelumnya dan memberikan tugas pembenahan cukup serius kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti dilakukan saat ini. Gejala tantangan demokrasi ini sebenarnya adalah gejala global yang juga dialami oleh Amerika Serikat dan India sebagai negara demokrasi terbesar dunia melalui rezim Presiden Donald Trump di Amerika Serikat dan Perdana Menteri Narendra Modi di India. Meski terjadi penurunan,

kualitas demokrasi Indonesia tetap lebih baik dari negara-negara Muslim yang lain. Artinya, pengalaman Indonesia sebagai negara demokratis tetap menjadi potensi untuk menjadi bahan pelajaran bagi negara-negara muslim lain.

Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif

Dalam konteks politik luar negeri, Indonesia adalah negara yang cukup aktif dalam mendukung terciptanya iklim politik dunia yang lebih baik, baik di lingkup ASEAN, OKI, dan PBB. Pada level ASEAN, Indonesia aktif mendukung penyelesaian konflik di Rohingya, Thailand, dan Filipina. Sementara pada level OKI, Indonesia aktif dalam merespons berbagai konflik yang terjadi di Timur Tengah khususnya terkait persoalan Palestina. Selama perang Gaza pada tahun 2023, Indonesia menjadi salah satu yang paling aktif menyuarakan dukungan terhadap Palestina di berbagai forum termasuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Peran aktif Indonesia ini oleh Amitav Acharya (2010) dinilai melebihi peran-peran yang dilakukan oleh negara-negara besar di Asia seperti Tiongkok, Jepang dan India: *for a country which is neither the strongest military nor the economic power even in its own immediate region (even the tiny Singapore scores more on both counts), Indonesia has done more regional role-playing as a mediator and facilitator in Asian conflicts than the region's major powers, i.e., China, Japan and India* (Acharya, 2010: 2).

Di level PBB dan global, Indonesia saat ini menjadi Ketua Dewan HAM 2024-2026 dan ini adalah periode keenam sejak tahun 2006. Selain itu, Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB selama empat periode. Indonesia juga aktif berkontribusi sebagai pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Hingga April 2021, ada 2.795 personel aktif, di mana 158 di antaranya adalah perempuan. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara penyumbang perdamaian terbesar ke-8 (UN, 2025).

Dalam konteks pertarungan antara negara-negara besar saat ini seperti Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat, Indonesia masih tetap

mempertahankan sikap politik luar negerinya yang independen sembari tetap aktif menyuarakan sikap dan pandangannya terhadap berbagai dinamika yang terjadi secara global.

Opportunities (Kesempatan)

1. Kebangkitan Ekonomi Syariah Global

Ada beberapa kesempatan dalam perkembangan perekonomian Islam secara luas. *Pertama*, ekspansi pasar global telah tumbuh sekitar US\$1,62 miliar pada tahun 2012 hingga US\$2,29 triliun pada tahun 2023 (Hashem, 2024). *Kedua*, aset keuangan Islam telah meningkat lebih dari dua kali lipat dari sekitar US\$1.34 triliun pada 2012 meningkat menjadi hampir US\$4 triliun pada 2026 dengan ekspektasi mencapai US\$5,96 triliun pada 2026 (Soliman, 2025). Beberapa sektor yang mengalami peningkatan adalah investasi, *merger*, dan akuisisi yang utamanya terdapat di Indonesia, Malaysia dan Uni Emirat Arab (Liaqat, 2023).

Ketiga, ekonomi dan gaya hidup halal, utamanya pada sektor makanan dan minuman, diramalkan akan mencapai angka US\$1,89 triliun pada tahun 2027 (Liaqat, 2023). Selain makanan, industri gaya hidup yang berkembang lainnya meliputi farmasi, kosmetik, dan pariwisata memiliki pertumbuhan yang baik dengan dukungan dari pemerintah (Bin Ghalaita, 2019). *Keempat*, perekonomian Islam tengah memimpin perekonomian di beberapa belahan dunia dengan aktor utamanya Malaysia, Arab Saudi, Indonesia dan Uni Emirat Arab. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan industri halal karena adanya dukungan besar dari pemerintah (Hashem, 2024; Liaqat, 2023).

Kelima, transformasi dan inovasi digital menjadi tantangan sekaligus kesempatan dalam pengembangan perekonomian. Di beberapa belahan dunia, kita dapat menyaksikan perkembangan aplikasi *blockchain*, pariwisata berbasis *Artificial Intelligence (AI)*, hingga percepatan proses sertifikasi halal

telah membuat berjalannya perekonomian Islam menjadi semakin efisien (Liaqat, 2023).

2. Peluang Indonesia menjadi juru damai dan promotor toleransi di tengah berbagai tantangan Dunia Islam (Islamofobia, konflik, diskriminasi)

Dewasa ini, Dunia Islam sedang menghadapi tantangan yang cukup menjadi halangan perkembangannya. Pertama, di Dunia non-Islam (khususnya Dunia Barat), Islamofobia masih menjadi isu dan bahkan di Amerika Serikat naik sekitar 30% setelah Perang Israel-Gaza (Shafa, 2025). Tantangan kedua adalah konflik, peperangan, dan terorisme. Terorisme global meningkat 11% dari tahun 2024 ke 2025, dengan serangan terparah dilakukan oleh *Islamic State* dan *Tehrik-e Taliban*, termasuk dengan makin banyaknya serangan terorisme dilakukan oleh individu terutama di Eropa (*Institute for Economics & Peace*, 2025).

Kemudian, stabilitas regional menjadi isu berikutnya yang berkesinambungan dari isu sebelumnya. Konflik dan perang di kawasan dapat menyebabkan beberapa permasalahan seperti pengungsi hingga ancaman perang dunia. Terakhir, isu yang dapat mempengaruhi perkembangan integrasi masyarakat muslim adalah permasalahan diskriminasi terhadap umat Muslim. Diskriminasi ini dapat mempengaruhi kehidupan Muslim di negara-negara non-Muslim, utamanya negara-negara Barat. PBB telah memberi pernyataan bahwa kondisi Islamofobia saat ini sudah mencapai posisi yang mengkhawatirkan (OHCHR, 2024).

3. Peluang atas Kekosongan Kepemimpinan di Dunia Islam: Belum ada negara Islam dominan yang mampu memimpin secara moral dan diplomatik

Kita melihat belum ada satu negara Islam yang dapat menjadi pemimpin bagi negara-negara Islam lainnya. Berabad-abad kolonialisme dan penjajahan Eropa di Dunia Islam. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan kondisi di mana negara-negara dominan dalam politik Internasional seperti Arab Saudi dan Iran terjebak di dalam ketidaksetujuan antara mereka sendiri. Upaya telah dilakukan melalui OKI dan aliansi lainnya, hanya saja belum ada satu negara yang dapat memimpin negara lain (Jan, 2020).

Ketiadaan kepemimpinan ini juga diwarnai oleh perbedaan mazhab dan warna keislaman. Seperti Iran, Houthi dan Hizbullah dengan warna syiah mereka, atau Arab Saudi dengan Wahhabisme-nya, persatuan belum terasa dalam menghargai akidah dan fikih yang berbeda (Khan, 2023). Perbedaan sistem politik, dari teokrasi hingga demokrasi hadir di Dunia Islam, termasuk perbedaan ekonomi antara negara-negara Arab Teluk yang memiliki penduduk sedikit, namun pendapatan berbeda. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia yang relatif tidak memiliki masalah serius dengan berbagai negara mayoritas muslim. Indonesia bisa menjalin hubungan baik dengan negara-negara mayoritas muslim Arab dengan tetap menjalin kerja sama dengan Iran.

Aspirations (Aspirasi/Harapan)

1. Menjadi pemimpin dan *agenda setter* Dunia Islam

Menjadi pemimpin maknanya bukan dalam konteks keketuaan di komunitas-komunitas negara-negara mayoritas Muslim lintas negara, tapi dalam aspek kemampuan *leadership* gagasan. Dalam konteks ini yang dibayang adalah Indonesia yang mampu untuk mengarahkan sebagai *agenda setter* di antara negara-negara Muslim dalam menyikapi berbagai persoalan di Dunia Islam seperti masalah politik, resolusi konflik, ekonomi, dan sebagainya.

Pengakuan Dunia Islam terhadap *leadership* Indonesia telah ditunjukkan dalam beberapa agenda di Dunia Islam seperti pada tahun 2016 ketika presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dipercaya oleh

Sekretaris Jenderal (Sekjen) OKI untuk menjadi salah satu anggota *Wise Persons Council* (WPC) OKI bersama Turki (Presiden Abdullah Gul), dan Nigeria (Presiden Abdulsalami Abubakar). Ketiga tokoh ini dipilih karena memiliki kredibilitas untuk meningkatkan peran OKI dalam penyelesaian sengketa secara damai dan pencegahan konflik melalui diplomasi preventif, promosi dialog, dan mediasi. Pemilihan Indonesia ke dalam WPC merupakan bentuk pengakuan atas peran aktif Indonesia dalam mendukung resolusi konflik di Dunia Islam dan keberhasilan dalam program kontra terorisme dan radikalisme (Sidqi, 2023). Pada tahun 2016 juga, Indonesia pernah dipercaya menjadi tuan rumah bagi pertemuan darurat OKI terkait dengan pelanggaran Israel terhadap masjid al-Aqsa dan perluasan pemukiman ilegal Israel di Palestina (*Organization of Islamic Cooperation*, 2016).

Tahun 2019, Indonesia pernah memprakarsai dan memimpin negara-negara anggota OKI pada tahun 2019 dalam mengadopsi rencana aksi untuk memerangi Islamofobia, diskriminasi agama, intoleransi, dan kebencian terhadap Muslim. Usulan Indonesia ini berawal dari kekhawatiran meningkatnya insiden kekerasan terhadap Muslim khususnya peristiwa tragedi di *Christchurch*, Selandia Baru, pada Maret 2019. Indonesia juga menjadi tuan rumah pertemuan pertama kelompok kerja ini. Dengan inisiatif ini, Indonesia mendapatkan pujian dari negara-negara anggota OKI lainnya (The Jakarta Post, 2019).

2. Menjadi pusat pendidikan, sains dan teknologi di Dunia Islam

Dengan jumlah penduduk yang besar, lembaga pendidikan yang jumlahnya banyak khususnya perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi Islam menjadi modal besar bagi Indonesia untuk menjadi kiblat pendidikan sains dan teknologi di Dunia Islam. Integrasi Indonesia dengan Dunia Islam dapat diraih melalui kerja sama riset, pertukaran akademik, dan pengembangan pusat keunggulan (*center of excellence*) yang berfokus pada inovasi, keilmuan berbasis syariah, serta pengembangan teknologi yang

relevan dengan kebutuhan umat Islam global. Dengan kekhasan keislaman Indonesia yang moderat dan bersifat merangkul, Indonesia dapat mengambil peran dalam merumuskan metode pendidikan Islam yang adaptif dengan perkembangan zaman serta berasaskan pada karakteristik Islam yang moderat.

3. Mendominasi potensi ekonomi Dunia Islam

Melihat tren positif Indonesia melalui indikator SGIE (*State of the Global Islamic Economy*) 2024-2025, Indonesia memiliki potensi besar mengambil alih kepemimpinan dalam bidang ekonomi Islam yang saat ini masih dipegang oleh Malaysia dan Arab Saudi. Dalam jangka 10 tahun terakhir saja, Indonesia berhasil terus meningkat dari urutan ke-11 menjadi urutan ketiga pada tahun 2023-2025. Lebih detail, Indonesia telah menduduki posisi pertama dalam indikator *modest fashion* (busana muslim), tempat kedua dalam pariwisata ramah Muslim, dan tempat kedua dalam farmasi dan kosmetik. Indonesia juga berada di peringkat keempat dalam makanan halal, keenam dalam keuangan Islam, dan ketujuh dalam media dan rekreasi. Dalam hal investasi, Indonesia telah melampaui negara-negara anggota OKI lainnya dalam jumlah kesepakatan dengan nilai US\$ 1,6 miliar pada tahun 2023. Hal ini berarti dalam jangka 10 tahun ke depan, Indonesia punya peluang untuk terus menambah keunggulan dalam ekonomi Islam global (Dinar Standard, 2025)

Results (Hasil)

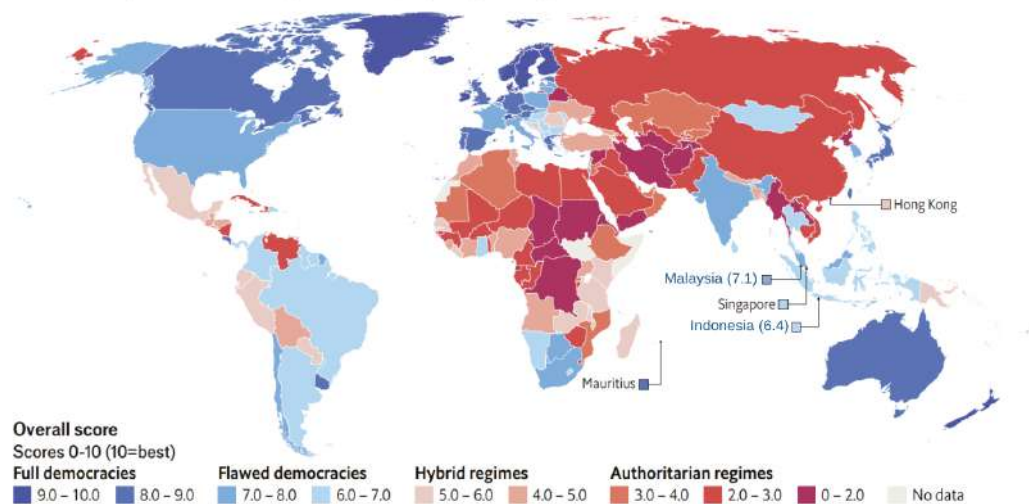
1. Masuk kategori 'menengah atas' dalam *Islamicity Indices*

Dalam indeks tahun 2024, Indonesia masih berada di posisi ke-56. Meskipun demikian, dibanding negara-negara Muslim lainnya, Indonesia relatif cukup baik dengan posisi ketiga setelah Malaysia dan Uni Emirat Arab. Ini berarti Indonesia telah berjalan pada *track* yang benar menuju 10 besar dalam *Islamicity Index* (*Islamicity Indices*, 2024). Hasil yang diharapkan dalam upaya strategi integrasi Indonesia untuk Dunia Islam adalah masuk ke dalam

kategori 'menengah atas' dalam *Islamicity Indices*. Pada tahun 2029 diharapkan Indonesia dapat menduduki peringkat 50 besar *Islamicity Indices* dan terus naik sebanyak 5 peringkat setiap 5 tahun, sehingga pada tahun 2045 Indonesia masuk ke dalam 35 besar *Islamicity Indices*.

2. Menaikkan nilai *Democracy Index*

Democracy Index 2024, global map by regime type



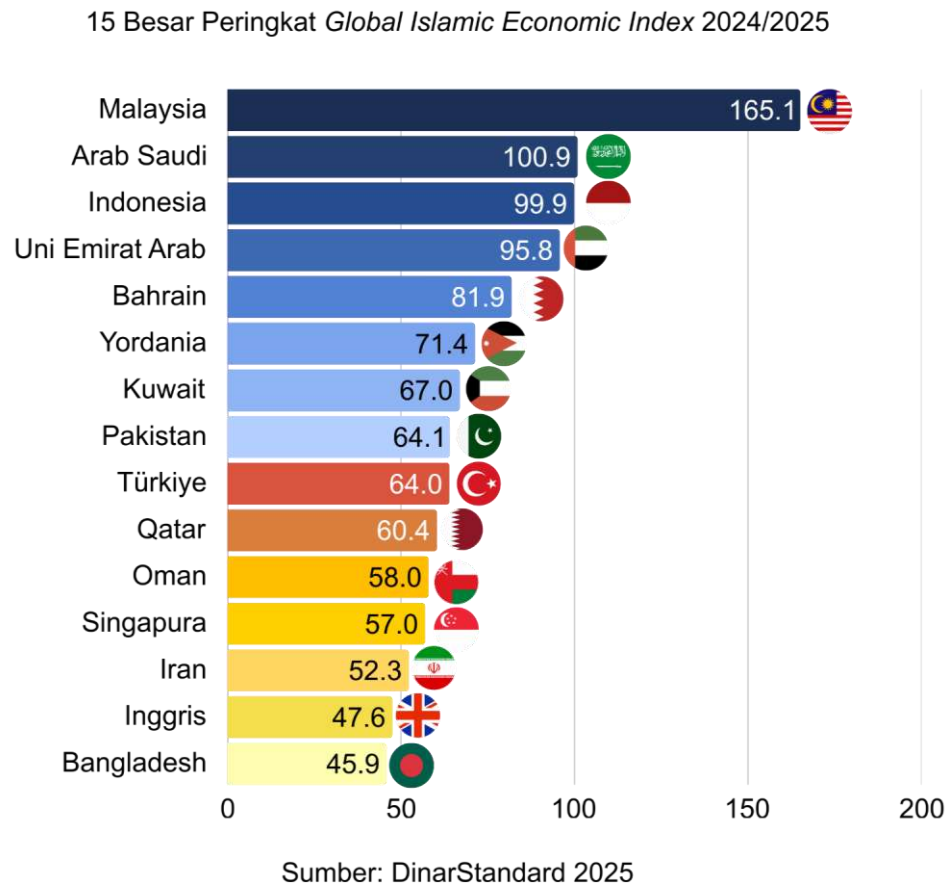
Sumber: The Economist Intelligence Unit (EIU)

Gambar 3.5 *Democracy Index* 2024

Indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2024 mencapai 6,44 dari 10 poin (Our World in Data, 2025). Dari 181 negara yang diukur, Indonesia menduduki peringkat ke-64. Sementara itu, Malaysia yang memiliki demografi yang paling dekat kemiripannya dengan Indonesia berada di atas Indonesia pada peringkat ke-47 dengan 7,11 poin. Meskipun secara umum peringkat Indonesia masih relatif rendah, tetapi jika dilihat dari sudut pandang Dunia Islam, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Malaysia.

Dengan dibuatnya rekomendasi kebijakan ini, diharapkan Indonesia dapat menaikkan indeks demokrasinya. Indonesia diharapkan secara berkala naik menuju poin 7 (*flawed democracy*) pada tahun 2045. Dengan demikian, jika secara konsisten poin indeks demokrasi Indonesia terus meningkat sampai setelah tahun 2045, Indonesia akan menuju poin 8 sebagai negara *full functioning democracy*.

3. *Ranking 1 dalam ekonomi Islam global (state of the global Islamic economy)*



Gambar 3.6 Peringkat *Global Islamic Economic Index* 2024/2025

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, Indonesia telah berhasil menempati posisi ketiga yang sebelumnya pada posisi kesebelas dalam *State of the Global Islamic Economy (SGIE)* 2024-2025. Posisi ketiga ini berada di bawah Malaysia sebagai peringkat pertama dan Arab Saudi pada peringkat kedua. Dengan menjalankan rekomendasi kebijakan ini, diharapkan Indonesia dapat menaikkan peringkat secara bertahap hingga dapat menduduki posisi pertama menggantikan Malaysia.

4. Minimal terdapat 25.000 mahasiswa asing di Indonesia

Jumlah pelajar asing di Indonesia masih sangat rendah dengan estimasi 3.896 mahasiswa asing pada tahun 2021. Sementara itu, Malaysia memiliki sekitar 130.000-170.000 mahasiswa asing. Dengan menerapkan rekomendasi kebijakan ini diharapkan jumlah mahasiswa asing di Indonesia meningkat dengan target pertambahan mahasiswa asing sebanyak 1.000 per tahun. Dengan demikian, pada tahun 2045 jumlah mahasiswa asing di Indonesia meningkat sebanyak 25.000.

5. Meningkatnya mobilitas cendekiawan dan ulama perempuan Indonesia

Hingga saat ini belum ada data pasti tentang mobilitas ulama dan cendekiawan muslim perempuan Indonesia di dunia global, terutama yang memang berfokus dalam membawa perspektif dan nilai Islam Indonesia yang ramah dan adil gender. Dengan penerapan rekomendasi kebijakan ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan upaya *faith-based diplomacy* di Dunia Islam.

Salah satu upayanya adalah dengan mendorong peran aktif cendekiawan dan ulama perempuan muslim untuk memperkaya diskursus mengenai Islam yang moderat dan progresif, serta menjadi pen jembatan di ranah internasional dengan Dunia Islam dan komunitas muslim di seluruh dunia. Upaya ini akan diukur dengan meningkatkan jumlah cendekiawan dan ulama perempuan yang mendapatkan rekognisi internasional dengan target satu orang cendekiawan atau ulama perempuan setiap tahunnya. Dengan demikian, pada tahun 2045 terdapat setidaknya 20 orang cendekiawan dan/atau ulama perempuan yang mendapatkan rekognisi internasional.

Required Capabilities

Kepemimpinan Indonesia di Dunia Islam dapat diwujudkan melalui peningkatan kapabilitas, baik bagi aktor pemerintah maupun nonpemerintah.

Pemerintah, khususnya Kemlu RI dan diplomat yang memiliki fungsi vital dalam menjalankan hubungan luar negeri Indonesia, perlu melakukan sejumlah peningkatan kapabilitas, baik bagi lembaga maupun personel yang ada di dalamnya.

Kapabilitas Aktor Pemerintah

1. Kapabilitas institusional melalui perubahan nomenklatur bidang Staf Ahli Kemlu

Untuk mempersiapkan kepemimpinan Indonesia di Dunia Islam, kapabilitas institusional pemerintah Indonesia perlu ditingkatkan. Struktur kelembagaan Kemlu RI selama ini lebih menekankan kepada pembentukan Staf Ahli. Staf Ahli adalah pejabat setingkat eselon I (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya) yang bertugas memberikan telaahan atau rekomendasi kepada Menteri mengenai isu-isu strategis sesuai bidang keahliannya (Perpres RI Nomor 68 Tahun 2019). Dengan kata lain, Staf Ahli berperan sebagai penasihat senior bagi Menteri dalam merumuskan kebijakan strategis. Posisi Staf Ahli biasanya diisi oleh pejabat karier senior dengan pengalaman dan kompetensi mendalam di bidang tertentu, sehingga mampu melihat isu secara komprehensif.

Keberadaan Staf Ahli diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, yang antara lain menyebutkan bahwa tugas Staf Ahli adalah memberikan rekomendasi atas isu strategis dan jumlahnya dalam satu kementerian paling banyak lima orang (Perpres RI Nomor 68 Tahun 2019). Mengingat bahwa saat ini Kemlu telah memiliki lima Staf Ahli yang meliputi lima bidang, yaitu Politik, Hukum, dan Keamanan, Diplomasi Ekonomi, Sosial-Budaya & Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (diaspora), Hubungan Antarlembaga, dan Manajemen (Kemlu RI, 2025), maka dari itu, perlu adanya perubahan nomenklatur salah satu bidang dan menambahkan integrasi Dunia Islam sebagai salah satu isu strategis.

Adanya Staf Ahli yang juga membidangi Dunia Islam akan meningkatkan *knowledge-base* dan kapasitas analitis Kemlu terhadap isu-isu Islam global. Selama ini, perhatian terhadap diplomasi di kalangan negara Muslim tersebar di berbagai unit. Staf Ahli dapat mengonsolidasikan berbagai informasi tersebut menjadi masukan strategis tingkat tinggi. Kedua, Staf Ahli dapat merumuskan strategi diplomasi kebudayaan Islam Indonesia. Indonesia dikenal memiliki tradisi Islam jalan tengah yang dapat ditonjolkan dalam diplomasi *soft power*. Ketiga, Staf Ahli ini dapat memperkuat peran Indonesia di OKI dan organisasi Islam lainnya dengan memastikan Indonesia selalu proaktif mengajukan inisiatif dan menyiapkan posisi strategis Indonesia di OKI.

2. Kapabilitas literasi agama Islam bagi para diplomat dan pengalaman representasi di Dunia Islam

Berdasarkan Peraturan MenpanRB No. 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat, diplomat memiliki enam tugas utama yang meliputi: *representing, protecting, negotiating, promoting, reporting, dan managing* (Peraturan MenpanRB No. 4 Tahun 2018). Dalam menjalankan fungsi *representing*, diplomat diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan yang memenuhi kualifikasi secara administratif, namun, kapabilitas yang berkaitan dengan Dunia Islam, seperti memiliki pemahaman tentang Islam, baik gagasan maupun praktik berislam di wilayah yang ditempatkan, seperti diplomat dengan latar belakang ulama, pemimpin jamaah, santri, memiliki pengetahuan keagamaan interdisipliner, memiliki jejaring yang luas, serta kemampuan berbahasa.

Peningkatan kapabilitas diplomat dapat dilakukan melalui pelatihan literasi agama (Mandaville & Silvestri, 2015), yang meliputi: *pertama*, pemahaman tentang agama serta demografi agama. Hal ini mencakup pengetahuan tentang ajaran pokok agama, sejarah, serta pemahaman mengenai tokoh maupun lembaga yang berkaitan. *Kedua*, kapasitas analitis

untuk memahami bagaimana agama dapat dilihat relevan dalam memahami berbagai isu dan topik dalam praktik diplomasi, termasuk untuk topik-topik yang sebelumnya tidak berkaitan dengan Islam. *Ketiga*, pemahaman tentang tokoh-tokoh agama, organisasi agama, dan aktor agama lainnya yang relevan dengan Dunia Islam.

Di samping literasi agama Islam, kapabilitas Indonesia untuk menjadi pemimpin di Dunia Islam juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan fungsi *representing* di Dunia Islam, yaitu dengan memperbanyak penempatan staf atau personil Indonesia untuk menjadi perwakilan di organisasi-organisasi internasional. Indonesia perlu mendorong partisipasi warga negaranya sebagai staf pada Sekretariat OKI maupun lembaga-lembaga di bawah OKI (misalnya *Islamic Development Bank*, ISESCO), serta aktif mengisi posisi utusan atau pejabat di forum multilateral Islam. Kehadiran diplomat dan ahli Indonesia di tubuh organisasi-organisasi tersebut akan mempererat integrasi Indonesia dalam komunitas Islam global sekaligus memberi peluang menyuarakan kepentingan nasional dari dalam.

3. Kapabilitas pemerintah untuk membangun identitas kompetitif dan diplomasi ekonomi

Pada aspek ekonomi dan budaya, pemerintah harus memiliki kapabilitas untuk membangun jenama yang menunjukkan *niche* Indonesia. Dalam membangun jenama Indonesia yang kompetitif, setidaknya terdapat enam aspek yang butuh untuk dikembangkan, yaitu pariwisata, *brands* (produk dan jasa), kebijakan, investasi dan imigrasi, budaya dan warisan peninggalan (*heritage*), dan masyarakat (Anholt, 2006). Penguatan identitas kompetitif dapat dilakukan dengan mengorkestrasi kerja sama lintas-sektor. Misalnya, dalam perumusan jenama pariwisata halal, berbagai pihak perlu untuk dilibatkan, baik dari pemerintah; pusat maupun daerah, dan nonpemerintah seperti ulama, sejarawan, budayawan, industri, dan masyarakat. Reputasi harus dibangun berdasarkan kualitas nyata dari

kebijakan, produk, layanan, dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, jika Indonesia ingin dikenal sebagai pusat halal dunia, maka pemerintah tidak cukup hanya meluncurkan kampanye promosi, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan halal, mutu produk, kesiapan SDM, dan nilai-nilai budaya yang dikomunikasikan benar-benar mencerminkan keunggulan substantif.

Selain kemampuan untuk merumuskan apa yang menjadi keunggulan bagi Indonesia, untuk memajukan posisi Indonesia dalam industri halal global, pemerintah harus memiliki kapabilitas untuk memaksimalkan diplomasi ekonominya. Di antara lima bentuk dari diplomasi ekonomi yang dikenalkan oleh Okano-Heijmans, Indonesia perlu memaksimalkan kapabilitas dalam domain diplomasi komersial, perdagangan, finansial, dan insentif (*inducement*). Kapabilitas yang dimaksud mencakup kemampuan institusional untuk merancang dan melaksanakan promosi ekspor halal secara sistematis, memperluas akses pasar produk halal Indonesia melalui perjanjian dagang bilateral, serta meningkatkan investasi asing dalam ekosistem industri halal nasional. Pemerintah Indonesia juga harus mampu mendorong terbentuknya kerja sama perdagangan dan pengakuan sertifikasi halal secara timbal balik (*mutual recognition*) melalui forum multilateral seperti OKI.

Selain itu, Indonesia juga perlu mengembangkan kapabilitas dalam memanfaatkan aspek *financial diplomacy* dan *inducements* sebagai bagian dari pendekatan ekonomi yang lebih luas. Pemerintah harus mampu memobilisasi instrumen keuangan syariah, seperti sukuk halal atau pembiayaan berbasis wakaf, untuk mendukung proyek-proyek pengembangan industri halal, baik di dalam negeri maupun sebagai bentuk kerja sama pembangunan dengan negara-negara Muslim berpendapatan rendah. Pemerintah juga dapat menggunakan kapasitas diplomatik dan teknokratik dalam menyalurkan bantuan teknis, seperti pelatihan sertifikasi halal di negara-negara yang belum memiliki standarisasi halal yang kuat, pertukaran ahli, dan riset yang berkaitan dengan industri halal.

4. Kapabilitas diplomasi Indonesia

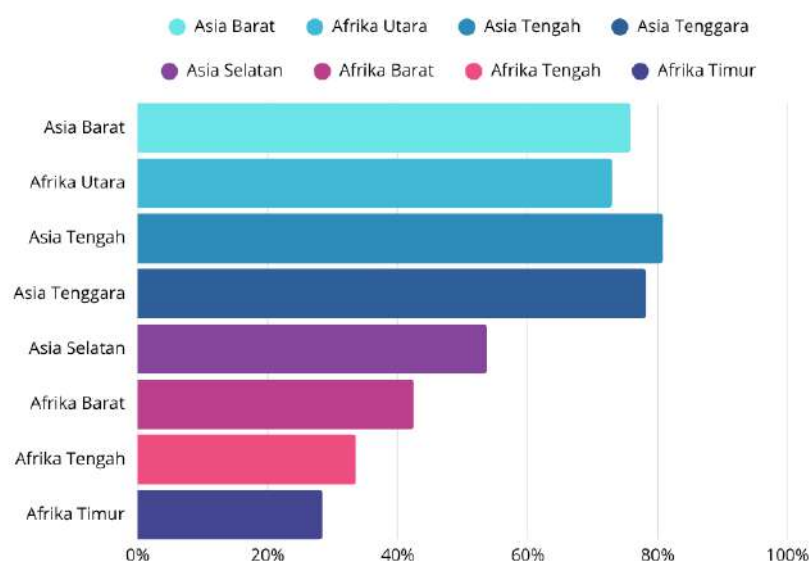
Kapabilitas diplomatik Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam Asia Power Index 2024, dengan skor *diplomatic influence* mencapai 61,54 atau meningkat sebesar 5,1 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini menempatkan Indonesia di peringkat keenam, melampaui Australia. Peningkatan ini sebagian besar dipicu oleh keberhasilan Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023, yang memperkuat perannya dalam forum multilateral kawasan (Lowy Institute, 2024). Target jangka panjang Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2024-2045 adalah mendorong skor *diplomatic influence* hingga mencapai kisaran 75–80 pada tahun 2045 (RPJPN, 2024). Target ambisius ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan diplomasi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat pengaruh Indonesia di tingkat global.

Pencapaian Indonesia tidak terbatas pada peningkatan skor diplomatik. Dalam aspek kekuatan multilateral, Indonesia menempati peringkat ketiga secara keseluruhan dan peringkat kedua dalam keanggotaan forum-forum multilateral, yang menandakan pengaruh dan keterlibatan aktif Indonesia dalam organisasi internasional. Selain itu, Indonesia menjadi negara dengan aktivitas diplomasi bilateral dan multilateral tertinggi kedua di kawasan Asia, dengan 89 dialog bilateral dan 84 dialog multilateral pada tahun 2023 (Lowy Institute, 2024). Jumlah kedutaan besar Indonesia secara global berada di peringkat ketujuh, begitu juga dengan jumlah konsulat regional. Meski demikian, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam hal kontribusi modal ke PBB Indonesia berada di peringkat kedelapan dan keselarasan suara dalam sidang Majelis Umum PBB pada peringkat kesebelas (Lowy Institute, 2024).

Peningkatan pengaruh diplomatik Indonesia secara lebih menyeluruh, terutama dalam konteks kepemimpinan di Dunia Islam dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tidak hanya dengan ketercapaian target dalam

indikator pengaruh diplomatik, Indonesia juga dapat mengembangkan kapabilitas untuk mengenalkan dan menyebarkan gagasan dan narasi positif tentang Indonesia di dunia digital bagi publik di Dunia Islam. Menurut Statista, rata-rata penetrasi internet di negara-negara di dunia telah mencapai 67.9%, dengan rincian penetrasi internet di kawasan yang merupakan bagian dari Dunia Islam sebagai berikut:

Figur 1. Penetrasi Internet di Kawasan Dunia Islam Tahun 2025



Sumber: Statista

Gambar 3.7 Penetrasi Internet di Kawasan Dunia Islam Tahun 2025

Indonesia perlu mengembangkan kapabilitas dalam diplomasi digital. Pemerintah Indonesia, khususnya Kemlu RI, selama satu dekade telah aktif menggunakan media sosial dan secara resmi mengadopsi diplomasi digital sebagai bagian dari strategi diplomasi pada tahun 2017. Namun, diplomasi digital Indonesia, pada praktiknya, selama ini lebih sering menjangkau publik domestik dibandingkan dengan publik internasional.

Menurut Bjola, terdapat tiga elemen kunci yang dapat dilakukan untuk menjamin diplomasi digital yang efektif. *Pertama, agenda setting*, yaitu bagaimana pemerintah mengatur narasi unggulan tentang Indonesia di media

sosial dan menjadikannya lebih *salient* bagi publik global. *Kedua*, yaitu *presence expansion*, atau memperluas kehadiran Indonesia di ruang publik digital, khususnya bagi publik asing, dengan menyasar audiens tertentu, menggunakan bahasa yang dapat diakses oleh masyarakat Dunia Islam, serta meningkatkan jumlah akun dan intensitas unggahan di media sosial yang disesuaikan dengan algoritma dan preferensi audiens di kawasan tersebut. *Ketiga*, melalui *conversation generating*, bagaimana interaksi antarpemerintah dengan publik di ruang-ruang digital menghasilkan interaksi yang dua arah (Bjola, 2025), sehingga mampu menghadirkan percakapan yang semakin menampung aspirasi positif tentang Indonesia.

Kapabilitas Aktor Non Pemerintah

1. Kapabilitas ulama Indonesia untuk melakukan diplomasi berbasis agama (*Faith-Based Diplomacy*)

Narasi kekhasan, citra, dan nilai Islam di Indonesia untuk kemudian diejawantahkan dalam diplomasi Indonesia menjadi kebutuhan yang tidak dapat dielakkan sehingga aktor nonpemerintah baik dari organisasi Islam maupun ulama idealnya memiliki kemampuan untuk melakukan *faith-based diplomacy* atau diplomasi berbasis agama. Diplomasi berbasis agama adalah diplomasi jalur kedua dalam *multi-track diplomacy* yang melibatkan pejabat dari LSM, pemimpin agama, ataupun warga sipil yang berakar dari nilai dan tradisi agama, dan orientasi spiritual (Cox dan Philpott, 2003). Menurut Johnston dan Cox, diplomasi berbasis agama dilihat secara spesifik sebagai upaya rekonsiliasi yang tidak hanya bertujuan untuk meniadakan konflik. Namun, memulihkan relasi sehingga terjadi hubungan yang sehat dan saling menghormati (*mutual respect*) antara pihak yang terlibat (Johnston dan Cox, 2003).

Menurut Thompson, terdapat empat kualitas utama yang dibutuhkan oleh seorang *faith-based diplomat* yaitu keimanan dan transendensi, ketekunan dan kesabaran, dapat menyadari dan mempertimbangkan otoritas

spiritual yang tepat, dan memiliki kesadaran tentang pluralisme agama (Thompson, 2015). Sementara itu, menurut Johnston dan Cox, terdapat lima kapabilitas yang harus dimiliki oleh *faith-based diplomat* yaitu adanya ketergantungan pada prinsip-prinsip spiritual dalam menciptakan perdamaian, memiliki otoritas spiritual, hati yang pluralistik, dapat menggunakan pendekatan yang transenden dalam resolusi konflik, dan memiliki kemampuan bertahan dalam situasi yang sulit (Johnston & Cox, 2003).

Pemerintah perlu mengembangkan jejaring ulama, baik ulama nasional maupun ulama diaspora yang dapat menjalankan fungsi *faith-based diplomacy* di luar negeri. Mobilitas ulama yang memiliki kapabilitas kunci dari seorang diplomat yang memiliki otoritas keilmuan dan mampu menjembatani perbedaan, mampu menjadi representasi otentik wajah Islam Indonesia, dan mendapatkan rekognisi atau diterima secara meluas. Namun demikian, secara kuantitas patut diakui bahwa jumlah ulama Indonesia yang dikenal dan dirujuk secara meluas masih kurang, sehingga rekognisi ulama menjadi poin penting yang perlu ditingkatkan.

2. Kapabilitas industri untuk melakukan penjenamaan dan ekspansi pasar di Dunia Islam

Kapabilitas industri halal nasional untuk melakukan penjenamaan dan ekspansi pasar sangat menentukan posisi Indonesia dalam industri halal global. Indonesia berada di peringkat ke-3 dengan tiga sektor yang menjadi unggulan, yaitu sektor keuangan, pariwisata, dan fesyen (DinarStandard, 2025). Di samping ketiga sektor tersebut, sektor farmasi dan kosmetik Indonesia juga diunggulkan dengan adanya Bio Farma dengan industri vaksinnya serta Paragon dengan industri kosmetiknya. Perumusan jenama perlu dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan industri mulai dari BUMN hingga UMKM sehingga dapat

dihasilkan jenama yang konsisten, terpadu, otentik (menggambarkan kekhasan Indonesia), mudah dikenali, serta *timeless*.

Ekspansi pasar tentu saja tidak hanya bergantung pada kekuatan dari jenama, namun juga memerlukan strategi ekspansi dan penetrasi pasar yang baik. Laporan SGEI 2024/2025 menunjukkan bahwa, di antara sepuluh negara eksportir produk halal ke negara-negara OKI, hanya tiga negara yang merupakan anggota dari OKI, yaitu Turki, Uni Emirat Arab, dan Indonesia, dengan Indonesia berada di peringkat kesembilan (DinarStandard, 2025).

Sektor industri halal di Indonesia perlu mengetahui secara spesifik segmentasi pasar berdasarkan regional, misalnya, Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah, Afrika Utara, dan negara-negara lainnya. Segmentasi pasar dilakukan dengan mempertimbangkan preferensi masyarakat setempat, regulasi halal, serta daya beli dari masyarakat. Di samping itu, ekspansi pasar juga dapat dilakukan dengan memperluas kemitraan dengan pelaku industri di negara-negara yang potensial. Tidak hanya menyasar mereka untuk menjadi konsumen, namun bersama-sama membangun kerja sama untuk berkolaborasi untuk memperbesar kapasitas produksi. Di samping itu, industri Indonesia perlu memperkuat pemasaran yang tidak hanya menargetkan masyarakat pasar domestik saja, namun, perlu mempertimbangkan strategi pemasaran yang menarik dan menunjukkan keunggulan Indonesia, terlibat dalam berbagai forum internasional serta aktif dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pembangunan di negara-negara berkembang.

Pilihan dan Implementasi Kebijakan

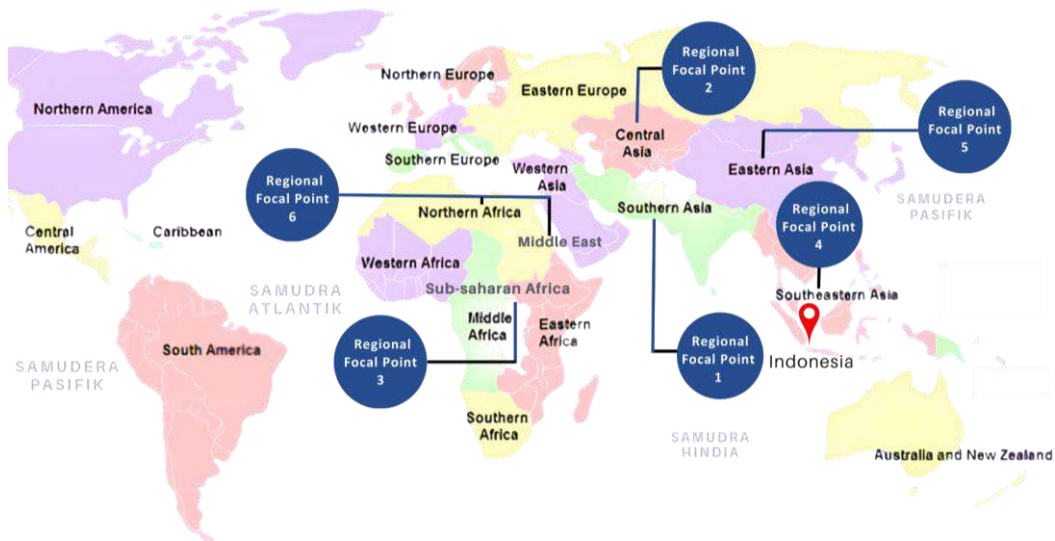
Berdasarkan pertimbangan di atas serta penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), penelitian ini mengidentifikasi empat ranah strategis yang akan dibahas lebih lanjut sebagai bagian dari opsi kebijakan, yaitu: politik, ekonomi, sosial-budaya,

serta pendidikan, riset, dan teknologi. Penomoran yang digunakan tidak mencerminkan urutan prioritas, melainkan untuk mempermudah identifikasi.

Dari pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya dari penelitian ini, terlihat bahwa Indonesia tampak seperti telah hadir pada isu-isu di Dunia Islam. Namun hingga saat ini, Indonesia masih banyak tertinggal dari negara-negara Islam lainnya atau bahkan non-Islam pada industri halal khususnya. Dalam peperangan antara Gaza dengan Israel, utamanya setelah tahun 2024, kurang bersuara dalam forum-forum internasional. Pasca dimulainya Perang Israel-Gaza, negara tetangga seperti Malaysia telah menyatakan secara terang dukungan penuh pada Palestina sejak tahun 2024 (Anwar, 2025). Sementara itu, Indonesia hingga tahun 2025 masih menyatakan bahwa normalisasi dengan negara Israel adalah suatu kemungkinan meskipun memang, mengedepankan solusi dua negara (Anwar, 2025).

Seperti yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, Indonesia sudah pernah mengambil peran-peran aktif di dalam OKI. Pada tahun 2016, Indonesia, pada saat itu diwakili oleh Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, telah menempati posisi *Wise Person Council* untuk meningkatkan peran OKI dan Dunia Islam. Kemudian pada tahun yang sama Indonesia telah berinisiatif untuk mengadakan Pertemuan Darurat Al-Aqsa. Pada tahun 2019, Indonesia mendorong negara-negara OKI untuk mengadopsi rencana aksi untuk menangani islamofobia, intoleransi, dan kebencian terhadap Islam.

Dasar: Menentukan Fokus pada Dunia Islam



Gambar 3.8 Regional Focal Points

Dalam upaya untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan Peta Jalan Integrasi Indonesia dan Dunia Islam, kami berpandangan bahwa ada beberapa *focal points* (titik fokus utama) yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan agar strategi kebijakan tersebut dapat berjalan secara terukur dan efektif. *Focal points* ini dibagi menjadi dua bagian, yakni *regional focal points* dan *issue focal points*. *Regional focal points* yang dimaksud adalah bahwa kebijakan integrasi Indonesia dan Dunia Islam perlu berfokus terlebih dahulu pada beberapa wilayah prioritas yang menjadi bagian integral dalam Dunia Islam. *Regional focal points* ini diperhitungkan dari beberapa aspek, yakni (1) aspek sentralitas wilayah dalam dinamika sosial-politik Islam, (2) warisan budaya dan peradaban Islam di wilayah tersebut, (3) interkonektivitas wilayah tersebut dalam Dunia Islam dan arsitektur politik-ekonomi global secara umum, dan (4) keterkaitan historis dan sosial-budaya wilayah tersebut dengan Indonesia. Berangkat dari keempat aspek tersebut, kami menyusun bahwa ada empat wilayah yang harus menjadi *focal points* dalam upaya mengintegrasikan dan memaksimalkan peran Indonesia di Dunia Islam.

Wilayah pertama adalah kawasan Asia Selatan, sebagai kawasan tetangga terdekat Indonesia yang memiliki populasi Muslim yang signifikan dan dipercayai juga mempengaruhi dinamika keislaman di masa-masa yang akan mendatang. Menurut beberapa proyeksi statistik, jumlah populasi Muslim di negeri-negeri yang berada di kawasan Asia Selatan akan meningkat hingga dalam total 683 juta di tahun 2030 (Pew Research Center, 2011). Peningkatan ini akan terlihat secara signifikan di negara-negara seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Dengan status ekonomi negara-negara tersebut yang masih *emerging* dan *developing*, tentunya peningkatan jumlah populasi Muslim ini membawa isyarat yang jelas bahwa populasi muslim akan memainkan peran politik, sosial dan ekonomi yang signifikan di Asia Selatan.

Konektivitas populasi Muslim di Asia Selatan dengan dunia melalui eksistensi diaspora di benua-benua seperti Amerika dan Eropa juga penting untuk dipertimbangkan dalam menilai signifikansi potensi Asia Selatan (Chambers & Herbert, 2015). Selain itu, kedekatan historis yang berkelanjutan antara komunitas Muslim di Asia Selatan dengan komunitas Muslim di Indonesia menjadi elemen penting yang perlu diperhitungkan. Kedekatan yang berkelanjutan ini dibangun tidak hanya melalui ikatan-ikatan yang sifatnya institusional dan formal belaka, namun juga melalui inisiatif masyarakat sipil dan hubungan organik antar jamaah di dua kawasan. Hal ini bisa dilihat dari mobilitas komunitas *Jama'ah Tabligh* yang mengadakan pertukaran sosial-keagamaan dalam kegiatan *khuruj* (kegiatan dakwah di luar daerah) dan *ijtima'* (perkumpulan keagamaan) di Indonesia dan negara-negara di Asia Selatan (Noor, 2012). Interaksi Asia Selatan juga menjadi penting karena adanya jejaring historis melalui *spice route* (jalur rempah) yang terbangun secara natural sejak lama. Ke depannya, Indonesia dapat menjadi model yang baik dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah, serta pengawalan isu demokrasi dan hak-hak asasi manusia, terutama untuk negara seperti Pakistan dan Afghanistan.

Wilayah kedua adalah kawasan Asia Tengah, sebagai kawasan Dunia Islam yang memiliki peranan signifikan dalam membentuk sejarah peradaban dan sistem politik Islam. Selain Tajikistan yang memiliki konteks budaya Persia yang amat kental, mayoritas dari negara-negara Asia Tengah adalah negara-negara yang secara etnis memiliki asal etnis bangsa Turk dan rumpun bahasa Turk. Persamaan tata sosial dan nilai budaya antara negara-negara Asia Tengah membuat kawasan ini sering kali disebut juga sebagai *Türk Dünyası* atau Dunia Turki. Di akhir Perang Dingin, negara-negara di kawasan Asia Tengah sama-sama mengeksplorasi kembali jati diri dan potensi laten mereka melalui pembentukan ragam institusi, seperti Organisasi Negara-Negara Turki (*Türk Devletler Teşkilatı*) dan lembaga-lembaga sejenis (Mustofaev, 2022). Upaya untuk menjadi independen dari pengaruh hegemon dengan inisiatif regional sejenis inilah yang membuat Asia Tengah menjadi salah satu wilayah yang perlu dijadikan fokus oleh Indonesia dalam upaya integrasi Indonesia ke Dunia Islam.

Asia Tengah menjadi penting karena beberapa faktor utama. *Pertama*, Asia Tengah merupakan wilayah yang menghubungkan Asia dan Eropa, serta menjadi bagian penting dalam proyek Jalur Sutra Baru yang diinisiasi oleh Tiongkok dan beberapa negara lainnya di level yang lebih kecil. Banyak proyek-proyek krusial dalam kerangka *Belt and Road Initiative* dan inisiatif sejenis yang telah dijalankan sejak satu dekade lalu. *Kedua*, Asia Tengah memiliki koneksi historis yang signifikan dengan Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan keterkaitan sanad intelektual dan nasab genealogis antara ulama Indonesia dan ulama Asia Tengah. Salah satu bukti yang bisa dilacak secara konkret adalah bahwa salah satu ulama terbesar di Indonesia, yakni Sunan Ampel, merupakan putra langsung dari Syaikh Ibrahim al-Samarqandi (biasanya dikenal juga dengan nama Maulana Ibrahim Asmoroqondi) yang berasal dari Uzbekistan (Mukaffa, 2017).

Selain itu, beberapa sumber mengindikasikan bahwa sebagian dari raja dan ulama-ulama di kawasan Nusantara juga memiliki sumber sanad

intelektual dan nasab genealogis yang bertemu pada figur Syaikh Jumadil Qubra yang berasal dari Bukhara (Van Bruinessen, 1994; Suparto, Halid & Mamat, 2019; Kholmuminov, 2022). Adanya penyegaran dalam hubungan sejarah yang eksis, ditambah dengan adanya jejak positif Presiden Soekarno dalam pemugaran Mausoleum Imam Bukhari di Bukhara, menjadi landasan untuk meneguhkan Asia Tengah sebagai *regional focal points* bagi integrasi Indonesia dalam Dunia Islam (Anggoro, 2024).

Afrika Sub Sahara juga perlu dipertimbangkan sebagai salah satu *regional focal points* dalam upaya Kemlu RI untuk mengintegrasikan Indonesia ke Dunia Islam. Secara demografis, Afrika Sub Sahara diproyeksikan memiliki populasi sebanyak 385,9 juta orang (Pew Research Center, 2023). Dengan latar belakang sejarah kolonialisme yang panjang serta dinamika ekonomi yang amat dinamis, kawasan Afrika Sub Sahara masih menjadi salah satu kawasan yang dapat memberikan potensi besar bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama dalam konteks integrasi Indonesia dan Dunia Islam. Sebagian besar komunitas Muslim di negara-negara kawasan Afrika Sub Sahara juga memiliki keragaman dalam bahasa, budaya dan tata krama yang dipengaruhi oleh dinamika prakolonial, kolonial, dan poskolonial. Sehingga, sering kali komunitas Muslim di kawasan Afrika Sub Sahara memiliki kredensial multikultural dan toleran, di mana ini menjadi titik temu antara Muslim Asia Sub Sahara dan Muslim Indonesia (Adogame, 2007).

Kredensial poskolonial juga menjadi titik konvergensi yang penting antara Afrika Sub Sahara dan Indonesia, di mana negara-negara Muslim di kedua wilayah telah menjalin kerja sama multisektor dalam kerangka kerja sama Selatan-Selatan Triangular. Secara potensi ekonomi, ada banyak hal yang belum dieksplorasi dengan maksimal, utamanya dalam potensi pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam dan mineral, perbankan syariah dan ekonomi hijau. Dalam aspek resolusi konflik, model-model perdamaian yang eksis di Indonesia bisa juga dioptimalkan dan disesuaikan untuk diterapkan di negara-negara kawasan Afrika Sub Sahara yang

menghadapi konflik dan radikalisme, seperti Nigeria, Republik Demokratik Kongo dan Afrika Tengah.

Sebagai salah satu wilayah yang paling awal dimasuki oleh Islam adalah Asia Timur dan Asia Tenggara, kedua wilayah ini menjadi dua wilayah yang dieksplorasi secara optimal oleh Indonesia. Konektivitas natural dalam aspek sosial-budaya dan ekonomi di antara Indonesia dan kedua wilayah tersebut merupakan modalitas penting dalam membangun integrasi Islam dan komunitas Muslim di Asia Timur dan Asia Tenggara. Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia perlu memaksimalkan peran dalam beberapa sektor, terutama dalam isu penelitian halal, pendidikan tradisional dan pendidikan tinggi Islam, pengoptimalan peran Indonesia sebagai mediator bagi masyarakat Islam dalam konflik di Asia Tenggara serta tujuan-tujuan yang berfokus pada isu kemanusiaan. Dalam konteks Asia Timur, Indonesia perlu lebih banyak mengoptimalkan diplomasi berbasis keagamaan di wilayah-wilayah di mana Islam masih menjadi agama minoritas dengan berfokus pada pengiriman ulama dan pengembangan institusi pendidikan keagamaan Islam, dengan penekanan narasi keberislaman yang bernuansa Indonesia dan berpengalaman Indonesia.

Timur Tengah dan Afrika Utara diletakkan sebagai *regional focal point* terakhir, karena wilayah ini sering kali menjadi fokus dalam kegiatan-kegiatan diplomasi Indonesia di kawasan Dunia Islam secara umum. Investasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara sudah mencapai tahap yang *exhaustive*, sehingga Indonesia perlu merancang ulang program-program yang selama ini ditujukan untuk mengintegrasikan ide-ide keislaman di Indonesia dengan Timur Tengah dan Afrika Utara. Dalam kaitannya dengan hal ini, Indonesia sudah mengalami *diplomatic fatigue* yang dikarenakan karena beban tugas-tugas diplomatik yang sudah berat di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, yakni (1) adanya perlindungan Warga Negara Indonesia yang menjadi pekerja migran, (2) penanganan isu kedaruratan sosial-politik, (3) prioritas terhadap diplomasi

ekonomi yang berkonsekuensi terhadap kalibrasi kepentingan, dan (4) narasi dan posisi Indonesia yang masih dianggap sebagai periferi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Peletakan Timur Tengah dan Afrika Utara ini bukan bermakna dearabisasi atau menganggap bahwa kawasan ini bukan kawasan sentral Dunia Islam, namun sebagai upaya untuk merefleksikan dan mereposisi Indonesia di *core* Dunia Islam sebelum melakukan *engagement* lebih intensif dengan wilayah ini.



Gambar 3.9 Issue Focal Points

Penjelasan berikut memberikan gambaran empat ranah strategis yang meliputi: politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pendidikan, riset, dan teknologi.

Politik: Memperkuat kepemimpinan Indonesia sebagai *agenda setter* dalam kerja sama internasional, terutama dalam organisasi kerja sama negara-negara Islam.

1. Memperkuat representasi Indonesia di OKI dan D-8: Melalui pembuatan badan tersendiri yang memfokuskan pada Dunia Islam.

Berdasarkan pada beberapa pengalaman dan pembahasan-pembahasan sebelumnya, ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil: Memperkuat representasi Indonesia di OKI dan D-8, melalui keberadaan staf ahli yang memfokuskan pada Dunia Islam. Contoh ini dapat dilihat di beberapa negara, salah satunya pada pola representasi pada Dunia Islam yang dimiliki oleh *Secretary of State* di Amerika Serikat. Staf ahli ini mengurus seluruh urusan Indonesia dengan Dunia Islam dengan penyesuaian dengan nilai-nilai keislaman. Dengan adanya staf ahli tersebut, fokus terhadap Dunia Islam serta kebijakan-kebijakan yang diramu dan disesuaikan dapat dipastikan peta jalannya secara lebih konkret dan menjamin keberlanjutan dari isu tersebut.

Staf ahli untuk Dunia Islam sangat penting karena mewujudkan komitmen Indonesia untuk membina pemahaman dan kerja sama yang lebih baik dengan masyarakat Muslim di seluruh dunia. Dengan terlibat langsung dengan para pemimpin masyarakat sipil, pemuda, cendekiawan, dan pebisnis dari berbagai populasi Muslim, staf ahli tersebut dapat membantu membangun kepercayaan dan menghilangkan kesalahpahaman yang mungkin menghambat hubungan diplomatik atau kemitraan global. Inisiatifnya tidak hanya mendorong dialog, inklusivitas, dan rasa saling menghormati, tetapi juga mendukung proyek-proyek kolaboratif yang bertujuan untuk mengatasi tantangan bersama seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kohesi sosial. Dalam dunia yang semakin terhubung di mana mispersepsi dan ketegangan dapat berdampak internasional, Staf ahli memainkan peran penting dalam memajukan kebijakan luar negeri Indonesia, mempromosikan kebebasan beragama, dan melawan ekstremisme dengan mendukung keterlibatan yang positif dan inklusif dengan Dunia Islam.

2. Menempatkan diplomat-diplomat yang telah mengikuti pelatihan dalam literasi Dunia Islam pada forum-forum Islam atau di negara-negara Islam. (Dengan tujuan menyelaraskan sudut pandang negara Islam bahwa Indonesia adalah bagian dari Dunia Islam)

Menyambung opsi kebijakan sebelumnya, penempatan diplomat-diplomat yang telah mengikuti pelatihan dalam literasi Dunia Islam pada forum-forum Islam atau di negara-negara Islam menjadi opsi yang tidak kalah penting. Pelatihan dan penempatan ini memiliki tujuan menyelaraskan sudut pandang negara Islam bahwa Indonesia adalah bagian dari Dunia Islam. Sebagai bagian dari representatif pemerintah Indonesia, mereka bertugas untuk menjadi penguat terdepan penjenamaan Indonesia di dalam forum-forum Islam internasional.

Penempatan diplomat-diplomat yang telah mengikuti pelatihan dalam literasi Dunia Islam pada forum-forum Islam atau di negara-negara Islam sangat penting bagi politik luar negeri Indonesia karena hal ini dapat meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia di kancah internasional, khususnya di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sejarah, budaya, nilai, dan dinamika politik Dunia Islam, para diplomat Indonesia mampu membangun komunikasi yang lebih efektif, memperkuat kepercayaan, dan memperluas jaringan kerja sama strategis. Selain itu, literasi yang baik tentang isu-isu kontemporer di Dunia Islam memungkinkan para diplomat untuk lebih responsif terhadap tantangan dan peluang, seperti isu Palestina, Islamofobia, ataupun penguatan ekonomi syariah. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia tidak hanya sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tetapi juga sebagai pemain aktif dan kredibel dalam memperjuangkan kepentingan bersama di tingkat global, serta mendorong terciptanya perdamaian dan toleransi antarbangsa.

3. Pengembangan infrastruktur kemanusiaan yang bersifat material dan nonmaterial di Dunia Islam (fokus wilayah: Afrika Subsahara, Asia Selatan)

Pengembangan infrastruktur kemanusiaan (*humanitarian infrastructure*) yang bersifat material dan nonmaterial juga dapat menjadi prioritas dan potensi penting dalam upaya integrasi Indonesia dan Dunia Islam. Indonesia telah memiliki modalitas penting dalam pengawalan isu-isu kemanusiaan serta konstruksi infrastruktur kemanusiaan yang digunakan untuk merespons krisis-krisis kemanusiaan. Indonesia telah memiliki kapasitas yang mumpuni dan memadai dalam melakukan respons dan mitigasi krisis kemanusiaan. Infrastruktur kemanusiaan yang disiapkan hadir dalam beragam bentuk di berbagai wilayah di dunia, seperti Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara dan juga kamp pengungsi di Rohingya yang diinisiasi oleh beragam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia.

Selain itu, banyak lembaga swadaya masyarakat di Indonesia, seperti *Muhammadiyah Disaster Management Centre* (MDMC), *Pos Keadilan Peduli Umat-Human Initiative* (PKPU HI), dan *Medical Emergency Rescue Committee* (MER-C) yang telah mengembangkan *best practices* yang dapat menjadi modal dalam pengembangan masyarakat tangguh bencana dan rekonstruksi masyarakat pascabencana. Lembaga-lembaga tersebut juga telah dikenal oleh lembaga internasional antarpemerintah dan lembaga internasional nonpemerintah serta negara-negara target donor, seperti Suriah, Lebanon, Afghanistan, Bangladesh serta negara yang berada dalam kategori *least-developed countries* yang berada dalam Dunia Islam. Ke depannya, Indonesia perlu membangun satu *centre of excellence*, sejenis pusat pelatihan dan pendidikan bagi aktivis dan pekerja kemanusiaan, untuk menyinergikan kapasitas semua lembaga di atas yang kedepannya dapat membentuk kerangka kerja dan kolaborasi kerja yang lebih baik lagi di antara para aktor.

Selain dalam isu respons krisis kemanusiaan, Kemlu RI juga perlu mempertimbangkan integrasi dan lokalisasi hak asasi manusia dalam masyarakat Muslim. Tentu hal ini memiliki sensitivitas yang cukup tinggi, namun pengembangan integrasi ini harus melibatkan kalangan ulama dan pakar untuk melakukan lokalisasi atas norma hak asasi manusia yang perlu diperkenalkan. Sebagai contoh, Indonesia perlu mengembangkan model pendidikan yang sesuai untuk negara-negara Muslim yang memiliki tingkat serapan pendidikan yang masih rendah bagi perempuan, seperti Afghanistan dan Somalia. Model pendidikan Islam tradisional yang dikembangkan di pesantren bisa menjadi salah satu prototipe dalam pengembangan model tersebut.

Ekonomi: Mendominasi ekonomi Dunia Islam terutama dalam pasar dan industri halal.

- 1. Melakukan diplomasi ekonomi dan perdagangan yang ditunjang oleh penguatan infrastruktur perekonomian dalam negeri agar dapat membuka pasar domestik dengan Dunia Islam serta membentuk zona ekonomi Islam terintegrasi di beberapa wilayah Dunia Islam (fokus wilayah: Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika Subsahara)**

Kemudian, pembentukan zona ekonomi Islam terintegrasi di beberapa wilayah Dunia Islam perlu juga didorong oleh pemerintah Indonesia. Beberapa wilayah di negara Islam memiliki *primordial and pre-modern economic linkage* yang sudah eksis sejak masa lalu, bahkan sejak sebelum Islam. Eksistensi *economic linkage* ini menghubungkan bangsa-bangsa yang telah ada secara ekonomi, sosial, budaya dan politik melalui pertukaran komoditas seperti rempah, beras, dan kelapa hingga pertukaran ilmu pengetahuan seperti manuskrip. Keberadaan *linkage* ini juga dikaji oleh pemerintah Indonesia melalui kajian terhadap konsepsi *Jalur Rempah*

Nusantara yang berangkat dari kajian soal *spice route* oleh Reid (1994) dan Sidebotham (2011).

Salah satu contoh *pre-modern economic linkage* yang eksis adalah *linkage* antara wilayah Thailand Selatan, Malaysia Utara dan Sumatera Timur (Sutherland, 1995; Ayub, 2025). Adanya keterkaitan antar kalangan masyarakat, pebisnis hingga kaum ningrat di tiga wilayah ini membuat upaya integrasi ekonomi, sosial, dan budaya secara eksklusif perlu dilakukan secara spesifik. Dengan memetakan potensi integrasi ekonomi wilayah secara spesifik, Indonesia dapat mengawal agenda-agenda pemajuan kualitas ekonomi, sosial dan budaya di wilayah-wilayah tersebut secara konsekuen. Peran signifikan dalam pembentukan zona ekonomi Islam terintegrasi yang berada dalam Jalur Rempah Nusantara dapat membantu Indonesia untuk meningkatkan *leverage*-nya sebagai *key economic actor* di Dunia Islam.

Dalam mengimplementasikan *regional focal points* dan *issue focal points*, Kemlu RI dapat mengorkestrasikan beberapa lembaga pemangku kepentingan terkait di Indonesia untuk bekerja sama dalam mewujudkan integrasi Indonesia dalam Dunia Islam. Aktor yang pasti terlibat dalam aspek ini adalah kementerian dan lembaga dalam lingkup pemerintah, di mana akan ada beberapa K/L yang akan memerankan peran signifikan, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Sosial (Kemensos). Selain itu, aktor lain yang perannya menjadi sangat urgen untuk dilihat adalah komunitas *jam'iyah* Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Persatuan Islam (Persis), dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi tersebut memiliki modalitas sosial dan legitimasi yang kuat, baik di domestik maupun global. Organisasi-organisasi

ini juga dapat menjadi model bagi organisasi keislaman sejenis di negara-negara di Dunia Islam.

Selain itu, aktor lain yang perannya juga penting untuk dilihat adalah peran aktor bisnis. Bisnis halal yang berasal dari Indonesia, seperti Paragon Technology and Innovation, Mayora Indah, Indofood, dan Japfa Comfed telah menjadi 30 bisnis halal teratas menurut indikator yang disusun oleh OKI (BPJPH, 2023). Yang terakhir, aktor yang juga perlu dilibatkan adalah aktor lembaga sosial kemanusiaan dan lembaga *think-tank* serta universitas. Lembaga kemanusiaan yang berpengalaman seperti PKPU, Dompet Dhuafa, dan MER-C perlu dilibatkan secara terus-menerus dalam kerja-kerja diplomasi kemanusiaan Indonesia di Dunia Islam. Begitupun pula peran *think tank* dan universitas, yang tentunya perlu terus menjadi mitra wicara bagi pemerintah Indonesia dalam pencarian potensi-potensi yang dapat mengoptimalkan integrasi Indonesia dan Dunia Islam.

Dalam aspek waktu, pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan waktu implementasi kebijakan adalah RPJMN dan RPJPN yang telah disusun secara sistematis oleh Bappenas. Program-program yang disusun di atas dengan terminologi *regional and issue focal points* juga disusun dengan mempertimbangkan RPJMN dan RPJPN. Jika program ini menjadi komitmen politik bagi eksekutif tanpa mempertimbangkan perbedaan dalam visi dan prioritas politik, maka program ini bisa berjalan dalam empat fase: 2025-2029, 2029-2034, 2034-2039, dan 2039-2045. Di fase pertama (2025-2029), Kemlu RI sebagai *main stakeholder* melakukan perencanaan, koordinasi awal, serta *feasibility studies* dengan institusi terkait untuk mengawal implementasi kebijakan.

Di fase kedua (2029-2034), Kemlu RI dengan melakukan koordinasi bersama Staf ahli untuk Dunia Islam pemangku kepentingan terkait agar dapat segera melakukan *pre-implementation planning* dan *field assessment* dengan lembaga-lembaga terkait serta mengontak negara dan/atau pihak donor untuk dapat menyiapkan segera hal-hal yang diperlukan untuk

melakukan implementasi kebijakan. Fase ketiga yang berlangsung tahun 2034-2039 merupakan fase implementasi kebijakan, sedangkan fase keempat yang berlangsung dari 2039-2045 merupakan fase evaluasi kebijakan dan persiapan implementasi kebijakan tahap kedua. Dalam mengukur keberhasilan program, ada beberapa indikator yang akan digunakan untuk melihat hal tersebut, seperti *Islamicity Index* yang mengukur kesesuaian norma-norma ekonomi dan politik dengan nilai Islam, indikator demokrasi seperti yang tercantum dalam *Variables of Democracy* (Vdem), *State of Global Islamic Economy* untuk mengukur integrasi ekonomi Indonesia dan ukuran ekonomi Indonesia dalam Dunia Islam, serta jumlah mahasiswa asing (baik yang aktif maupun alumni) yang menjadi mahasiswa di institusi pendidikan Islam negeri dan swasta di Indonesia.

2. Memimpin sektor industri ekonomi kreatif halal dan perbankan syariah di Dunia Islam (fokus wilayah: Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan)

Selain *regional focal points*, Kemlu RI juga perlu menentukan lima *issue focal points* untuk dapat memaksimalkan upaya integrasi Indonesia dengan Dunia Islam. Isu pertama yang perlu difokuskan dalam aspek ini adalah pengembangan kepemimpinan Indonesia dalam sektor industri ekonomi kreatif halal dan perbankan syariah/perbankan Islam di Dunia Islam. Hal ini sesuai dengan salah satu program yang termaktub di dalam RPJMN 2025-2029, yang menegaskan bahwa pemerintah hendak mencapai perekonomian nasional yang ‘progresif, inklusif dan berkelanjutan’ dan mewujudkan ‘transformasi ekonomi hijau’. Industri ekonomi kreatif halal dan perbankan Islam merupakan isu yang dapat terus dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dalam memajukan diplomasi ekonomi Indonesia di Dunia Islam. Dalam beberapa indikator, seperti *Islamic Finance Index*, Indonesia berada di peringkat satu. Dalam indikator lainnya, seperti *State of*

Global Islamic Economy Report, saat ini Indonesia juga berada di peringkat empat. Populasi Indonesia yang mayoritas Muslim berperan besar dalam membentuk ekosistem ekonomi Islam yang dinamis. Pengembangan kerja sama kemitraan antarnegara Muslim seperti Malaysia, Qatar, dan Turki dan juga institusi keuangan global Islam seperti *Islamic Development Bank* perlu diberikan prioritas utama dalam mendukung upaya-upaya untuk pengembangan ekosistem ekonomi kreatif halal yang bersinergi dengan sektor perbankan syariah atau perbankan Islam.

Berkembangnya perekonomian Islam dunia harus pemerintah jadikan kesempatan untuk ekspansi perekonomian Indonesia ke negara-negara lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Indonesia perlu melirik pasar produk halal, investasi langsung dari negara-negara Islam, atau pengembangan aset-aset secara Islami di Indonesia dan di luar Indonesia. Pemerintah harus serius menyokong pengembangan produk-produk halal, sertifikasinya, hingga pemasarannya ke luar negeri. Sebagaimana yang kita sudah lihat bahwa BPJPH dengan berunding dengan USFDA (*United States Food and Drug Administration*) Hal ini adalah awal yang baik bagi Indonesia untuk secara serius menjadi produsen produk-produk halal.

Kemudian dalam pengembangan produk-produk halal, Indonesia masih belum sekuat Malaysia dalam sertifikasi, meskipun diakui di beberapa negara seperti Jepang. Indonesia masih membahas perjanjian kerja sama dalam sektor halal dengan Jepang di tahun 2024, ketika Malaysia telah lebih dulu menandatangani kerja sama dengan Jepang pada tahun 2018 (Astro Awani, 2018; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2024). Apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam perjanjian perdagangan dengan *U.S. Department of Agriculture* (USDA) contohnya, adalah langkah yang baik bagi penguatan ekspor Indonesia dalam ekspor-impor makanan halal bagi komunitas muslim (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2025). Indonesia perlu mengedepankan perjanjian bilateral maupun multilateral

untuk menyokong pergerakan komoditas halal dari Indonesia ke negara-negara lainnya, termasuk negara-negara Islam.

Sosial dan Budaya: Memperkuat citra masyarakat dan budaya Muslim Indonesia melalui diplomasi multijalur (multitrack diplomacy).

1. Membuat program penjenamaan negara yang berfokus pada gambaran "Indonesia adalah Bagian dari Dunia Islam". (Melalui diplomasi publik, atau kanal-kanal digital pemerintah dan Kemlu RI, perlu kerja sama dengan aktor-aktor terkait seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, atau lembaga lainnya yang terkait dalam aspek: pariwisata, merek produk dalam negeri, kebijakan terintegrasi, investasi asing, imigrasi, pelestarian warisan budaya, hingga urusan kemasyarakatan)

Indonesia perlu membangun *branding* sebagai negara dengan mayoritas Islam dan memiliki budaya keislaman serta infrastruktur perekonomian Islam. *Branding* yang dapat dilakukan adalah mengiklankan Indonesia sebagai muslim yang toleran dan ramah. Pencitraan ini bertujuan untuk mendapatkan perhatian dari negara-negara Islam dan masyarakat Muslim yang tinggal di negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Akan tetapi, pencitraan ini perlu didukung oleh perbaikan kondisi toleransi dan hubungan yang harmonis antarnegara.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu menjalankan strategi-strategi penjenamaan langsung maupun daring. Penjenamaan langsung dapat dilaksanakan mengenai pengadaan pameran pertunjukan, pemutaran film, yang terkait dengan Islam di Indonesia. Kolaborasi juga dapat dilaksanakan dengan universitas-universitas di negara tujuan atau lembaga lainnya yang terkait. Sedangkan, untuk strategi daring dapat menggunakan kanal-kanal media konvensional maupun media sosial dengan mengikuti tren yang

berlaku di negara tujuan. Penggunaan strategi daring juga dapat diselaraskan dengan strategi penjenamaan langsung.

Selain itu, pemerintah dapat memperkuat penjenamaan melalui pembangunan dan pengembangan *Islamic Center* berstandar internasional di sejumlah kota strategis. *Islamic Center* ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang diplomasi budaya, pusat studi Islam Nusantara, lokasi pameran, konferensi, pertunjukan seni, serta destinasi wisata edukatif yang menggambarkan identitas Indonesia sebagai bagian dari dunia Islam. Kehadiran *Islamic Center* semacam ini dapat menjadi simbol nyata dari upaya penjenamaan dan sekaligus sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam Indonesia yang moderat, inklusif, dan berakar kuat pada tradisi lokal.

Sebagai bentuk proporsi Kemlu RI kepada masyarakat, pembangunan *Islamic Center* Indonesia di luar negeri dapat difasilitasi melalui diplomasi budaya, kerja sama pemerintah setempat, serta penguatan jejaring komunitas diaspora. Kemlu RI berperan mengamankan perizinan, kemitraan internasional, dan promosi global, sehingga *Islamic Center* tersebut dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat Indonesia, ruang interaksi global, serta wahana peningkatan citra dan peluang ekonomi bagi pelaku budaya dan UMKM halal dari dalam negeri.

2. Meningkatkan dukungan finansial dan penguatan kolaborasi dengan mitra internasional dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya serta memperkuat dukungan dan kolaborasi dalam perlindungan warisan alam, sosial-budaya dan sejarah (fokus wilayah: Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah)

Adanya krisis perlindungan warisan sosial-budaya di Dunia Islam dapat mengancam integritas dan jejak sejarah peradaban Islam, seperti serangan yang terjadi terhadap Situs Warisan Dunia UNESCO di Timbuktu

oleh ISIS (Pérez-León-Acevedo, 2017; Dachlan, 2018). Dalam aspek ini, pemerintah Indonesia dapat membangun mekanisme dan sistem pendanaan yang dapat mendukung perlindungan terhadap warisan sosial-budaya dan warisan alam yang terancam oleh adanya konflik dan/atau perubahan iklim. Salah satu inisiatif yang telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia adalah inisiatif *Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia* (DREAMSEA) yang diprakarsai oleh PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) UIN Syarif Hidayatullah dan CSMC (*Center for Studies of Manuscript Culture*) Universitas Hamburg. Inisiatif yang berfokus pada perlindungan dan digitalisasi naskah-naskah manuskrip Islam ini merupakan contoh dari upaya perlindungan warisan sosial-budaya.

Adanya perlindungan terhadap warisan ini dapat menguatkan narasi di Dunia Islam bahwa Indonesia layak untuk dipertimbangkan sebagai aktor yang dapat memimpin ragam inisiatif di Dunia Islam. Perlindungan atas warisan ini juga dapat meredefinisi posisi Indonesia di Dunia Islam, karena bukti-bukti warisan tersebut menggambarkan relevansi historis Indonesia sejak masa lampau dan membuktikan sumbangsih Indonesia pada peradaban Islam sejak berabad-abad lamanya. Melalui dukungan finansial dan proyek terhadap warisan budaya tersebut, Indonesia juga bisa membentuk ulang wacana tentang Dunia Islam dan peran Indonesia dalam Dunia Islam dengan bukti-bukti sejarah yang konkret.

Pendidikan, Riset, dan Teknologi: Menguatkan budaya riset, teknologi dan kajian ke-Islaman dengan mengembangkan lembaga pendidikan yang berkelas dunia (world class university).

- 1. Menguatkan kolaborasi dengan aktor nonpemerintah untuk melakukan diplomasi publik berbasis dialog antaragama** (Melibatkan institusi pendidikan, kementerian kebudayaan, kementerian agama, pemuka agama, atau masyarakat umum), serta **meningkatkan kapasitas**

dan pengembangan kemitraan perguruan tinggi Islam Indonesia di tingkat global (fokus wilayah: Afrika Subsahara, Asia Tengah, Asia Selatan)

Sejarah perguruan tinggi Islam di Indonesia sudah dimulai sejak konsepsi Perguruan Tinggi Islam dimulai pada awal tahun 1930-an, di mana pada masa itu para ulama dan penggerak masyarakat di Indonesia mulai memikirkan perguruan yang dapat melatih sarjana-sarjana Islam yang dapat mendidik masyarakat dan membangun bangsa Indonesia ke depannya. Wacana ini menemukan wujudnya pada tahun 1945, ketika Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) mendeklarasikan berdirinya Sekolah Tinggi Islam yang seterusnya disebut dengan Universitas Islam Indonesia (Muhammad, 2019).

Berdirinya Universitas Islam Indonesia ini menjadi embrio bagi berkembangnya jejaring perguruan tinggi agama Islam negeri yang berada di bawah pengelolaan dan pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pengembangan jejaring perguruan tinggi agama Islam negeri yang berlangsung secara cepat di tahun 1980-an hingga 1990-an menjadi modalitas besar bagi pengembangan corak kesarjanaan Indonesia yang mengkaji studi-studi keagamaan dan studi Islam dalam perspektif lokal yang sangat khas (*distinctive*). Modalitas ini kemudian menunjukkan hasil yang menjadikan wacana keislaman ala Indonesia menjadi wacana yang mulai diperhitungkan dalam dinamika keislaman global, setidaknya dalam lingkup akademik dan perguruan tinggi. Upaya penguatan kemitraan perguruan tinggi melalui beasiswa dan pertukaran staf serta pengajar ini tentunya bisa dilengkapi dengan upaya untuk globalisasi institusi pendidikan Islam tradisional (pesantren) dan menjadikan pesantren sebagai ujung tombak dalam diplomasi pendidikan Indonesia di Dunia Islam. Dengan jejaring internasional yang dimiliki oleh perguruan tinggi Islam di Indonesia, sudah selayaknya Kemlu RI perlu memanfaatkan potensi perguruan tinggi Islam dan pesantren untuk memaksimalkan integrasi Indonesia dan Dunia Islam.

2. Memberikan beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswi untuk melanjutkan studi di Indonesia, utamanya dari negara-negara Islam (perlu bersinergi dengan kementerian pendidikan dan/atau kementerian-kementerian terkait serta institusi-institusi pendidikan di Indonesia)

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sudah memiliki beberapa beasiswa yang ditujukan bagi mahasiswa asing yang ingin belajar di Indonesia, seperti Beasiswa Kementerian Negara Berkembang, Beasiswa Darmasiswa, atau Beasiswa TIAS, atau beasiswa yang menekankan pada Studi Islam di Indonesia.

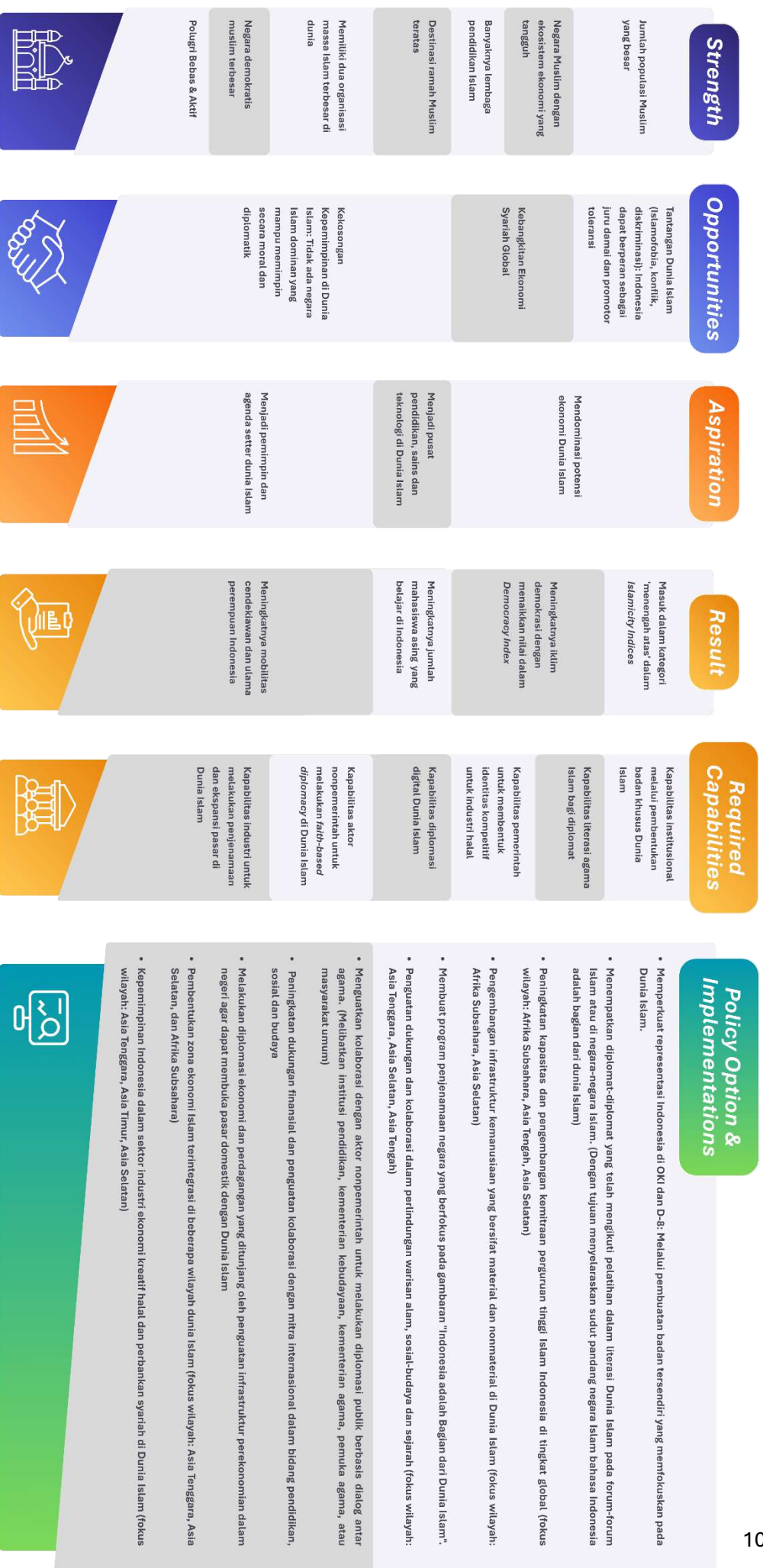
Indonesia juga telah memiliki program beasiswa bagi dunia Islam yaitu *“the Indonesian AID Scholarship for Islamic Community Development (INSANI)”*. Beasiswa ini merupakan hibah di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) untuk memperkuat diplomasi pembangunan Indonesia di Dunia Islam melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Negara penerima beasiswa dipilih berdasarkan kriteria strategis, yaitu anggota OKI yang tergolong *Least Developed Countries* (LDCs), memiliki populasi Muslim signifikan, dan hubungan diplomatik aktif dengan Indonesia.

Pada tahun 2025, INSANI menargetkan 17 negara penerima yang berpenduduk mayoritas dan minoritas Muslim, yaitu Bangladesh, Yaman, Burkina Faso, Mauritania, Somalia, Sudan, Mozambik, Maladewa, Azerbaijan, Iran, Aljazair, Irak, Libya, Maroko, Palestina, Suriah, dan Tunisia. Program ini memberikan 40 beasiswa penuh (10 doktoral dan 30 magister) di bidang Studi Islam, Ilmu Politik, Kebijakan Publik (Perubahan Iklim), Ekonomi, Keuangan Berkelanjutan, dan Pendidikan.

INSANI merupakan instrumen *soft power* untuk memperkuat pengaruh dan kepemimpinan Indonesia di Dunia Islam, dengan menonjolkan nilai-nilai Islam universal yang moderat, toleran, dan *rahmatan lil ‘alamin*. Melalui jalur pendidikan, Indonesia menampilkan diri sebagai pusat pembelajaran Islam

modern dan inklusif, sekaligus mitra solidaritas bagi negara-negara Muslim berkembang. INSANI menjadi sarana dalam memperluas jejaring, membangun kepercayaan, dan menegaskan peran Indonesia sebagai promotor perdamaian dan kemajuan umat Islam global.”

Menyediakan beasiswa bagi mahasiswa internasional dari negara-negara Islam untuk belajar di Indonesia sangatlah penting karena tidak hanya memperkuat peran Indonesia sebagai pusat pendidikan Islam global, tetapi juga mendorong pemahaman lintas budaya dan kolaborasi ilmiah di Dunia Islam . Beasiswa seperti yang ditawarkan oleh Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) membuka akses ke program akademik lanjutan dalam studi Islam, membina generasi pemimpin baru yang dibekali dengan pengetahuan intelektual, spiritual, dan budaya yang mendalam yang berakar pada tradisi Islam Indonesia yang kaya. Pertukaran akademik ini mendorong keberagaman dan solidaritas intelektual, memungkinkan mahasiswa untuk terlibat dalam tantangan keagamaan, sosial, dan politik kritis yang dihadapi komunitas Muslim di seluruh dunia. Lebih lanjut, belajar di Indonesia, negara yang dikenal dengan Islam moderat dan masyarakatnya yang pluralistik, membantu membentuk lulusan yang dapat memperjuangkan nilai-nilai toleransi, koeksistensi damai, dan pembangunan inklusif di negara asal mereka. Beasiswa semacam ini juga membangun hubungan antar masyarakat yang langgeng yang mendukung upaya diplomasi dan diplomasi budaya Indonesia, memperkuat kekuatan lunak di Dunia Islam dan di luar negeri.



Gambar 3.10 Analisis SOAR dan Pilihan Kebijakan

Pencapaian Kunci (*Key Milestones*)

Peta jalan ini mengajukan beberapa capaian kunci atau *key milestones* yang didasarkan pada identifikasi SOAR dan identifikasi kapabilitas. Capaian kunci dibagi dalam beberapa periode yang disesuaikan dengan periode RPJMN dan mengacu pada sasaran utama visi 3 RPJPN 2045. Pernyataan sasaran utama visi 3 yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Capaian kunci juga menggunakan indikator pengukuran yang telah banyak diterima secara global.

Indikator tersebut di antaranya adalah *Islamicity Indices*, *Democracy Index*, dan *State of the Global Islamic Economy. Baseline* yang digunakan adalah hasil laporan indikator-indikator tersebut pada tahun 2023 atau 2024. Penentuan target capaian kunci *Islamicity Indices* menggunakan asumsi kenaikan 5 peringkat pada setiap periodenya. Dengan menggunakan *baseline* tahun 2024, diharapkan pada tahun 2045, Indonesia dapat masuk dalam 35 negara teratas. Hal ini akan menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya negara mayoritas populasi Muslim, tapi juga telah menerapkan nilai-nilai Islam dengan baik.

Pencapaian kunci kedua menggunakan ukuran *Democracy Index* dari *Economist Intelligence Unit* (EIU). Capaian kunci ini untuk menggambarkan iklim demokrasi di Indonesia. Iklim demokrasi yang kondusif akan menyemai kestabilan politik, mendorong kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat negara. Sayangnya, selama 17 tahun sejak tahun 2006, capaian *Democracy Index* Indonesia berakhir stagnan di angka 6,53 pada tahun 2023. Padahal, Indonesia pernah mencapai skor 7,03 pada tahun 2015, meskipun masih dalam kategori *flawed democracy*. Oleh karena itu, capaian kunci yang diproyeksikan pada tahun 2029 adalah di angka 6,5 dan naik secara gradual hingga 7,5 pada tahun 2045.

Dalam konteks aspirasi Indonesia menjadi pusat pendidikan, sains, dan teknologi di Dunia Islam, peta jalan ini belum menemukan indikator mapan seperti dua indikator di atas. Sebagai ukuran capaian kunci,

ditargetkan Indonesia dapat memiliki jumlah mahasiswa asing dalam jumlah yang signifikan. Pada saat ini belum ada data yang pasti jumlah mahasiswa asing, terutama yang berasal dari negara-negara dalam Dunia Islam. Dengan gambaran jumlah mahasiswa asing yang kurang dari 10.000, capaian kunci pada tahun 2029 diusulkan sebanyak 10.000 mahasiswa.

Sedangkan pada tahun 2045, capaian kunci yang ditargetkan adalah sebanyak 25.000 mahasiswa. Indikator terakhir yang digunakan adalah skala peringkat dari laporan *State of the Global Islamic Economy*. Dengan menggunakan *baseline* laporan tahun 2024, Indonesia diproyeksikan dapat mencapai peringkat pertama. Selanjutnya, Indonesia harus dapat mempertahankan posisi tersebut dengan memastikan peningkatan skala ekonomi industri halal.

Gambar 3.11 Capaian Kunci 2029-2045



Penutup

Rancangan Peta Jalan Integrasi Indonesia dan Dunia Islam ini memberikan gagasan langkah kebijakan yang dapat diambil pemerintah. Rancangan tersebut diawali dengan merumuskan makna dari integrasi yang dimaksud. Pemaknaan tersebut digunakan sebagai acuan dalam perumusan tujuan dari peta jalan. Dalam konteks proses, peta jalan ini meliputi komponen: tujuan integrasi, observasi dan identifikasi kondisi faktual Indonesia, identifikasi kapabilitas yang dibutuhkan, pilihan kebijakan, dan implementasi kebijakan. Diharapkan rancangan Peta Jalan Integrasi Indonesia dan Dunia Islam ini dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terkait Dunia Islam.



Dalam rangka memperingati *International Day of Solidarity with the Palestinian People*, Kementerian luar Negeri menyelenggarakan *Walk for Palestine* yang diikuti pegawai Kementerian Luar Negeri, para perwakilan negara asing, dan organisasi internasional di Jakarta.

29 November 2025.



Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Muhammad Anis Matta pada Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (OKI) di Jeddah untuk menyikapi rencana Israel melakukan pendudukan permanen dalam skala besar di Palestina dan aneksasi Gaza.

25 Agustus 2025.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR

PUSTAKA

USTAKA

Daftar Pustaka

- A Ponco, A. (2024, September 21). Makam Imam Al-Bukhari, Masjid Biru, dan Warisan Soekarno untuk Dunia Islam. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/makam-al-bukhari-masjid-biru-dan-jejak-warisan-soekarno-untuk-dunia-islam>
- Abdullah, M., & Nadvi, M. J. (2011). Understanding the Islamic World-View. *The Dialogue*, 4(3), 268–289.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Publishers.
- Acharya, A. (2014). *The End of American World Order*. Polity Press.
- Acharya, A. (2015). *Indonesia Matters: Asia's Emerging Democratic Power*. World Scientific. <https://doi.org/10.1142/9298>
- Acharya, A. (2017). After Liberal Hegemony: The Advent of a Multiplex World Order. *Ethics and International Affairs*, 31(3), 271–285.
- Adogame, A. (2007). Sub-Saharan Africa. *Religion, globalization, and culture*, 527-548
- Adraoui, M. A. (2017). Borders and sovereignty in Islamist and jihadist thought: past and present. *International Affairs*, 93(4), 917-935
- Akhter, M. (2023). Muslim Peripheries: A World Regional Perspective. *Dialogues in Human Geography*, 13(3), 367–371. <https://doi.org/10.1177/20438206231191738>
- Ali, T., & Sultan, H. (2023). Emerging Role of the Organization of Islamic Cooperation in the Global Governance since 1969. *Cogent Arts and Humanities*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2202052>

Aljazeera.net. (2020, November 23). Ba'da 10 sanawat 'ala intiqalihi.. hal fasyly ar rabi' al araby. Wa ma baqa minhu? Aljazeera.net. <https://www.aljazeera.net/politics/2020/11/23/%>

Alvian, R. A., & Ardhani, I. (2023). The Politics of Moderate Islam in Indonesia: Between International Pressure and Domestic Contestations. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 61(1), 19-57.

Anwar, L. A. (2025, May 2). *Pernyataan Prabowo soal Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel Jadi Polemik*. <https://www.kompas.id/artikel/pernyataan-prabowo-soal-hubungan-diplomatik-indonesia-israel-jadi-polemik>

Anholt, S. (2006). *Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions*. Springer.

Antaranews. (2024, December 20). *Indonesia's halal product trade reaches \$53.73 billion in 2024*. Antara News. <https://en.antaranews.com/news/338790/indonesias-halal-product-trade-reaches-5373-billion-in-2024>

Antaranews.com. (2024, August 15). *NU dan Muhammadiyah berbagi kisah dalam upayanya wujudkan perdamaian*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4263899/nu-dan-muhammadiyah-berbagi-kisah-dalam-upayanya-wujudkan-perdamaian>

APJII. (2025). *Survei Internet APJII 2025. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia - Survei*. <https://survei.apjii.or.id/>

Araujo, G., & Widiyanto, S. (2025, January 7). *Indonesia joins BRICS bloc as full member, Brazil says*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/indonesia-join-brics-bloc-full-member-brazil-says-2025-01-06/>

- Aris, S. (2009). The Shanghai Cooperation Organisation: 'Tackling the three evils'. A regional response to non-traditional security challenges or an anti-Western bloc?. *Europe-Asia Studies*, 61(3), 457-482
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. Retrieved from https://pusdik.mkri.id/materi/materi_24_KONSTITUSI%20DAN%20KONSTITUSIONALISME%20INDONESIA%20-
- Ashraf, S. (2025, November 1). *International Student Statistics in Malaysia in 2025*. <https://en.your-uni.com/blog/international-student-statistics-in-malaysia>
- Astro Awani. (2018, November 27). *Malaysia, Jepun meterai perjanjian kerjasama halal* | Astro Awani. Astro. <https://www.astroawani.com/berita-bisnes/malaysia-jepun-meterai-perjanjian-kerjasama-halal-192133>
- Aswar, H., Rakhmat, M., & Pashya, M. (2022). China's Public Diplomacy to Build a Positive Image among the Muslim Community in Indonesia. *Dialogia*, 20(1), 60-83
- Aydin, C. (2004). The Politics of Conceptualizing Islam and the West. *Ethics and International Affairs*, 18(3), 89–96. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7093.2004.tb00479.x>
- Aydin, C. (2017). *The Idea of the Muslim World*. Harvard University Press.
- Ayub, Tengku. (2025, June 7). *Personal communication*.
- Ayudiana, S., & Situmorang, B. (2024). Pengguna QRIS didominasi oleh UMKM - ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/4236307/pengguna-qris-didominasi-oleh-umkm>
- Azman, Z., & Supriadi, S. (2025). *The History Of Islamization In Indonesia: Its*

Dynamics And Development. El-Ghiroh, 23(1), 67–82.
<https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v23i1.1092>

Badan Informasio Geospasial. (2024). Sipulau. Sipulau Website.
<https://sipulau.big.go.id/>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024, November 28). *Indonesia-Jepang Bahas Penguatan Kerja Sama Jaminan Produk Halal | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*.
<https://bpjph.halal.go.id/detail/indonesia-jepang-bahas-penguatan-kerja-sama-jaminan-produk-halal>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025, May 25). *BPJPH RI Strengthening Cooperation on Export-Import of Halal Products with USDA and USMEF | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
<https://bpjph.halal.go.id/en/detail/bpjph-ri-strengthening-cooperation-on-export-import-of-halal-products-with-usda-and-usmef>

Bappenas. (2024, July 7). *Export Value of Halal Products from Various Countries—Jiwa Muda Indonesia*.
<https://www.jiwamudaindo.com/export-value-of-halal-products-from-various-countries/>

Belt, D. (2009). Islamism in Popular Western Discourse. *Policy Perspectives*, 6(2), 1–20.

Bilgin, P. (2019). Colonial Globality, Postcolonial Subjectivities in the Middle East. In D. Jung & S. Stetter (Eds.), *Palgrave Studies in International Relations: Vol. Part F4804* (pp. 85–103). https://doi.org/10.1007/978-3-319-90734-5_5

Bin Ghalaita, J. (2019). *The rise of the Islamic economy | World Finance*. World

Finance. <https://www.worldfinance.com/banking/the-rise-of-the-islamic-economy>

Bjola, C., & Holmes, M. (2015). *Digital diplomacy*. New York: Taylor & Francis.

BPJPH. (2023, December 4). BPJPH Apresiasi 15 Perusahaan Produk Halal Indonesia Dominasi Top 30 OIC Halal Products Companies 2023. Halal.go.id. <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-apresiasi-15-perusahaan-produk-halal-indonesia-dominasi-top-30-oic-halal-products-companies-2023>

BPS Indonesia. (2025, June 30). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun—Tabel Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa.html>

BPS Indonesia. (2025). Produksi Barang Tambang Mineral—Tabel Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTA4lzl=/produksi-barang-tambang-mineral.html>

Buchholz, K. (2024, February 14). *Infographic: The World's Biggest Democracies*. Statista Daily Data. <https://www.statista.com/chart/31744/biggest-democracies>

Chambers, C., & Herbert, C. (2015). *Imagining Muslims in South Asia and the Diaspora*. London: Routledge.

Chatzky, A., McBride, J., & Berman, N. (2023, February 2). China's Massive Belt and Road Initiative | Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive-belt-and-road-initiative>

Cook, M. (2024). *A History of the Muslim World: From its Origin to the Down of Modernity*. Princeton University Press.

- Cox, B., & Philpott, D. (2003). Faith-based diplomacy: An ancient idea newly emergent. *The Brandywine Review of Faith & International Affairs*, 1(2), 31-40.
- CRIF. (2025, January 16). Indonesia's Marine and Fisheries Sector: Abundant Resources, Yet Technologically Lagging Behind Other Nations. <https://www.id.crifasia.com/resources/industry-insights/indonesias-marine-and-fisheries-sector-abundant-resources-yet-technologically-lagging-behind-other-nations/>
- Dachlan, R. A. (2018). *Constructing Victims of Heritage Destruction: Lessons from the Al Mahdi Reparations Order* (MPhil dissertation).
- Dajani, A. M. (2014). The Islamic World, 1893-1908. *Victorial Periodicals Review*, 47(3), 454–475. <https://doi.org/10.4324/9781003330691-2>
- Dawoody, A. (2014). The Arab Spring of 2011: A Perspective. In *Public Administration and Policy in the Middle East* (pp. 319-340). New York, NY: Springer New York
- Dephub. (2018). Empat Puluh Persen Jalur Perdagangan Dunia Melewati Indonesia Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. <https://dephub.go.id/post/read/empat-puluh-persen-jalur-perdagangan-dunia-melewati-indonesia>
- DinarStandard. (2025). State of The Global Islamic Economic Index (SGIE) 2024-25 Report. Salaam Gateway. <https://salaamgateway.com/reports/the-state-of-the-global-islamic-economy-sgie-202425-report-2>
- Direktorat KSKK Madrasah on Instagram: Infografis. (2024, September 24). Instagram. https://www.instagram.com/pendidikan_madrasah/p/DASdWMaPaGD/

- Direktorat Perwilayahan Industri. (2025, September 25). *Potensi dan Peluang Besar, Menperin Optimistis Indonesia Jadi Pusat Industri Halal Dunia*.
<https://kpaii.kemenperin.go.id/id/news/potensi-dan-peluang-besar-menperin-optimistis-indonesia-jadi-pusat-industri-halal-dunia>
- Fadhlurrahman, I. (2025, January 9). Daftar Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia Januari 2025, Indonesia Peringkat Berapa?
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/f7e2b32e3aff4e7/daftar-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-januari-2025-indonesia-peringkat-berapa>
- Feingold, S., & Willige, A. (2024, February 15). These are the world's most vital waterways for global trade. World Economic Forum.
<https://www.weforum.org/stories/2024/02/worlds-busiest-ocean-shipping-routes-trade/>
- France-Presse, A. (2019, July 11). More than 20 ambassadors condemn China's treatment of Uighurs in Xinjiang. The Guardian.
<https://www.theguardian.com/world/2019/jul/11/more-than-20-ambassadors-condemn-chinas-treatment-of-uighurs-in-xinjiang>
- GFP. (2025). 2025 Indonesia Military Strength. Global Fire Power.
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=indonesia
- Girsang, V. I. (2025, March 5). *EIU Research: Indonesia's Democracy Rated as "Flawed" After 2024 Elections—News En.tempo.co*.
<https://en.tempo.co/read/1982814/eiu-research-indonesias-democracy-rated-as-flawed-after-2024-elections>
- Global Muslim Travel Index 2025. (2025).
<https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2025.html>

- Gunawan, C. (2024, August 21). Peluang Baru Investasi, Turki Jajaki Pengembangan Industri Halal di FTZ Batam-Bintan. *gokepri*. <https://gokepri.com/peluang-baru-investasi-turki-jajaki-pengembangan-industri-halal-di-ftz-batam-bintan/>
- Hafez, K. (n.d.). *The Islamic Worlds and the West: An Introduction to Political Cultures and International Relations*. In 2000. Brill. https://doi.org/10.1163/9789047400370_010
- Hall, K. R. (2010). *A History of Early Southeast Asia: Maritime Trade and Societal Development, 100–1500*. Bloomsbury Publishing PLC.
- Hamka. (2020). *Sejarah Umat Islam: Pra-Kenabian hingga Islam di Nusantara*. Gema Insani.
- Haq, F. A. (2025, July 23). Perbandingan Jumlah Perguruan Tinggi Kemenag dan Kemendiktisaintek 2024. GoodStats. <https://goodstats.id/article/perbandingan-perguruan-tinggi-di-bawah-kemenag-dan-kemendikbudristek-HDaBg>
- Hashem, H. (2024, January 3). *A decade's journey: Mapping the Islamic economy & path ahead | Salaam Gateway - Global Islamic Economy Gateway*. Salaam Gateway. <https://salaamgateway.com/story/a-decades-journey-mapping-the-islamic-economy-path-ahead>
- Hatta, M. (1976). *Mendayung di antara dua karang*. Jakarta: Yayasan Idayu. (Pidato asli 2 September 1948 di Sidang KNIP). Retrieved from <https://theasrudiancenter.files.wordpress.com/2013/09/hatta-mendajung-antara-dua-karang.pdf>
- He, K., & Feng, H. (2022). Role Status and Status-sSaving Behaviour in World Politics: The ASEAN Case. *International Affairs*, 98(2), 363–381. <https://doi.org/10.1093/ia/iiab232>
- Hurd, E. S. (2003). *Appropriating Islam: The Islamic Other in the Consolidation*

of Western Modernity. *Critique: Critical Middle Eastern Studies*, 12(1), 25–41. <https://doi.org/10.1080/1066992032000064174>

Huxley, J. (2010). *Evolution: The Modern Synthesis*. MIT Press.

Ibatullin, A. F. (2015). First Islamic Conferences of Asia and Africa Countries and the Role of the USSR. *Vestnik RUDN. International Relations*, 15(4), 182-190

Institute for Economics & Peace. (2025). *Islamic State & Affiliates Global Results Global Terrorism Index 2025 Measuring The Impact of Terrorism The Sahel Trends in Terrorism Quantifying Peace and its Benefits*. <http://visionofhumanity.org/resources>

IIFA-AIFI. (2016). Bayan hawl al-Mu'tamar alladzi 'aqdu fi Grozny 'ashimatu Asy-Syisyan bi 'unwan: man Hammu ahlus Sunnah?. *Majma'ul Fiqhul Islam Ad-Dauliy*. <https://iifa-aifi.org/ar/4424.html>

IMF PortWatch. (2025). Port Monitor: Malacca Strait. <https://portwatch.imf.org/pages/5f51a0d85ac44a6bad02561e25899c4a>

ISC. (2024, March 10). *ISC IWUR 2023 Released*. <https://isc.ac/en/news/2254/isc-iwur-2023-released>

Islamicity Indices. (2024). *Latest Indices: 2024 – Islamicity Indices*. <https://islamicity-index.org/wp/latest-indices-2024/>

Jan, F. (2020, January 11). *The Failed Pursuit of Unity in the Muslim World | Responsible Statecraft*. <https://responsiblestatecraft.org/2020/01/10/the-failed-pursuit-of-unity-in-the-muslim-world/>

Joffé, G. (2007). Confrontational Mutual Perceptions and Images: Orientalism and Occidentalism in Europe and the Islamic World. *International*

Spectator, 42(2), 161–177.
<https://doi.org/10.1080/03932720701406340>

Kawsar, N. H. (2025, July 7). *State of the Global Islamic Economy 2025*. DinarStandard. <https://www.dinarstandard.com/post/sgier-2024-25>

Kayaoglu, T. (2015). *The Organization of Islamic Cooperation: Politics, Problems, and Potential*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315751467>

KemenPAN-RB. (2018). Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat. Jakarta: KemenPAN-RB.

Kemhan. (2024, November 16). Kapal Tempur Canggih Buatan Dalam Negeri, Fregat Merah Putih ke-2 Resmi Memasuki Tahap Konstruksi. <https://www.kemhan.go.id/2024/11/16/kapal-tempur-canggih-buatan-dalam-negeri-fregat-merah-putih-ke-2-resmi-memasuki-tahap-konstruksi.html>

Kemlu. (2023). Kerja Sama Regional: Indian Ocean Rim Association (IORA). Portal Kemlu. [https://kemlu.go.id/kebijakan/kerja-sama-regional/indian-ocean-rim-association-\(iora\)?type=publication](https://kemlu.go.id/kebijakan/kerja-sama-regional/indian-ocean-rim-association-(iora)?type=publication)

Khan, L. A. (2006). Forcing Them to Be Free: Bush's Project for the Muslim World. *Global Dialogue*, 8(1)

Khan, M. (2023, July 17). *Unity in the Muslim World: Challenges and Pathways to Progress - Stratheia*. Stratheia. <https://stratheia.com/unity-in-the-muslim-world-challenges-and-pathways-to-progress/>

Kholmuminov, F. Z. (2022). Samarkand scholars who introduced Islam to Indonesia. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 11(9), 43-49

KKP. (2025). Produksi Perikanan | KKP RI. Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia: Produksi Perikanan.

<https://portaldata.kkp.go.id/portals/data-statistik/prod-ikan/tbl-statis/d/44>

KNEKS. (2023, June 6). *Indonesia Peringkat Pertama Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia*. <https://kneks.go.id/berita/569/indonesia-peringkat-pertama-destinasi-wisata-halal-terbaik-dunia?category=1>

Kompas, T. H. (2022, October 22). *R20, NU, dan Perubahan Global*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/20/r20-nu-dan-perubahan-global>

Koppes, C. R. (1976). Captain Mahan, General Gordon, and the Origins of the Term ‘Middle East.’ *Middle Eastern Studies*, 12(1), 95–98. <https://doi.org/10.1080/00263207608700307>

Lazin, F. A. (2023). President Donald Trump's Abraham Accords initiative: Prospects for Israel, the Arab states, and Palestinians. *Politics & Policy*, 51(3), 476-487

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2020). *Pembinaan bela negara untuk ketahanan nasional*. Jakarta: Lemhannas RI. Retrieved from <https://www.wantannas.go.id/storage/bela-negara/pembinaan-bela-negara-untuk-ketahanan-nasional-2020.pdf>

Li, X. (2002). Dichotomies and paradoxes: The West and Islam. *Global Society*, 16(4), 401–418. <https://doi.org/10.1080/0953732022000016117>

Liaqat, I. A. (2023, December 3). *State of the Global Islamic Economy Report*. Dinar Standard. <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>

Lowy Institute. (2024). *Military capability data—Lowy Institute Asia Power Index*. Lowy Institute Asia Power Index 2024. <https://power.lowyinstitute.org/data/military-capability/>

- Ma, L. (2010). China's cultural and public diplomacy to countries in the Middle East. *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, 4(2), 32-43
- Mamdani, M. (2002). Good Muslim, bad Muslim: A political perspective on culture and terrorism. *American anthropologist*, 104(3), 766-775.
- Mandaville, P., & Silvestri, S. (2015). Integrating religious engagement into diplomacy: Challenges and opportunities. *Issues in Governance Studies*, 67, 1-13.
- Melman, B. (2006). The Middle East / Arabia: "The Cradle of Islam." In P. Hulme & T. Youngs (Eds.), *The Cambridge Companion to Travel Writing* (pp. 105–121). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/ccol052178140x.007>
- Moga, T. L., Bureiko, N., Gheorghiu, A., & Ibănescu, B. C. (2024). Testing a Six-Factor Model on Perceived State Power and Influence: The Case of Romania. *Europe - Asia Studies*, 76(8), 1163–1184. <https://doi.org/10.1080/09668136.2023.2275524>
- Muhammad, Suwarsono. (2019). *UII WAY: MENJADI ISLAMI, INDONESIAWI DAN MONDIAL*. UII Press.
- Mukaffa, Z. (2017). A new account on the portrait of Ibrahim Asmarakandi and his sufism approach in Islamization of Java. *Journal of Indonesian Islam*, 11(1), 175-200
- Munro, A. (2025, February 25). Superpower | Definition, Examples, & Facts | Britannica. <https://www.britannica.com/topic/superpower>
- Mustofaev, M. (2022). The organization of Turkic States: a new approach to global and regional challenges. *Perceptions: Journal of International Affairs*, 27(1), 105-120.

Noor, F. A. (2012). *Islam on the move: the Tablighi Jama'at in Southeast Asia* (p. 240). Amsterdam University Press.

NU Online. (2022, July 21). *Dicalonkan untuk Nobel Perdamaian Dunia, Inilah Sederet Kiprah NU di Kancah Internasional*. NU Online. <https://nu.or.id/nasional/dicalonkan-untuk-nobel-perdamaian-dunia-inilah-sederet-kiprah-nu-di-kancah-internasional-oHGjg>

OHCHR. (2024, March 15). *UN experts warn Islamophobia rising to “alarming levels”* | OHCHR. United Nations. <https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2024/03/un-experts-warn-islamophobia-rising-alarming-levels>

Okano-Heijmans, M. (2013). *Economic diplomacy: Japan and the balance of national interests* (Vol. 9). Martinus Nijhoff Publishers

Onuf, N. G. (2013). *Making Sense, Making Worlds: Constructivism in Social Theory and International Relations*. In *Making Sense, Making Worlds: Constructivism in Social Theory and International Relations*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203096710>

Organization of Islamic Cooperation. (2016). *Extraordinary Islamic Summit on Palestine and Al-Quds to be Held in Jakarta on 6-7 March 2016*. *Extraordinary Islamic Summit on Palestine and Al-Quds to Be Held in Jakarta on 6-7 March 2016*. https://www.oic-oci.org/topic/ampg.asp?t_id=10951&t_ref=4304&lan=en

Our World in Data. (2025, March 5). *Democracy Index 2024: What’s wrong with representative democracy?* OurWorldInData.org. Retrieved July 19, 2025, from <https://ourworldindata.org/grapher/democracy-index-eiu>

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang organisasi kementerian negara*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Perdana, R. K. (2025, September 1). *Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama pada Semester I/2025*. Data Indonesia: Data Indonesia for Better Decision. Valid, Accurate, Relevant. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-semester-i2025>
- Pérez-León-Acevedo, J. P. (2017). International Criminal Justice rendered concerning the attack against Timbuktu Mausoleums and Mosque: Focus on religion-related considerations. *Oxford Journal of Law and Religion*, 6(1), 180-186.
- Petersen, M. J., & Kayaoglu, T. (2019). The Organization of Islamic Cooperation and Human Rights (M. J. Petersen & T. Kayaoglu, Eds.). Penn. https://doi.org/10.18485/iipe_ioscw.2022.2.ch14
- Pew Research Center. (2011, January 27). Region: Asia-Pacific. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/religion/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-regional-asia/#:~:text=The%20Muslim%20population%20in%20South,2010%20and%2028.1%25%20in%201990.>
- Pew Research Center. (2025, June 9). Pew Research Center. [https://www.pewresearch.org/religion/2025/06/09/muslim-population-change/#:~:text=The%20rate%20of%20Muslim%20growth,369%20million%20\(up%2034%25\).](https://www.pewresearch.org/religion/2025/06/09/muslim-population-change/#:~:text=The%20rate%20of%20Muslim%20growth,369%20million%20(up%2034%25).)
- PT. Pindad. (n.d.). PT. Pindad (Persero)—Kendaraan Khusus. Retrieved August 20, 2025, from <https://pindad.com/special-vehicles>
- Rehman, S. S., & Askari, H. (2010). How islamic are islamic countries? *Global Economy Journal*, 10(2). <https://doi.org/10.2202/1524-5861.1614>
- Reid, S. (1994). *Inventions and trade: The silk and spice routes*. James Lorimer

& Company

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45358/uu-no-37-tahun-1999>

Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Download/33384/UU%20Nomor%2024%20Tahun%202000.pdf>

Rippin, A. (2008). *The Islamic World* (A. Rippin, Ed.). Routledge.

Rosentiel, T. (2005, November 10). Arab and Muslim Perceptions of the United States. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/global/2005/11/10/arab-and-muslim-perceptions-of-the-united-states/>

Said, E. (1977). *Orientalism*. Penguin Book. <https://doi.org/10.2307/jj.8501059>

Salaam Gateway. (2025). *State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/25 Report*. Salaam Gateway - Global Islamic Economy Gateway. <https://salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE24>

Scobell, A., & Nader, A. (2016). *China in the Middle East: The wary dragon*. RAND corporation.

Shagaviev, D. (2020). The Ahl al-Sunnah wa-l-Jama 'ah and the Grozny Fatwa. In *The Concept of Traditional Islam in Modern Islamic Discourse in*

Russia (pp. 57-86)

Sheikh, F. (2017). Who Speaks for the Islamic World? Religion, Identity and the Organisation of Islamic Cooperation. *Politics, Religion & Ideology*, 18(1), 117–121. <https://doi.org/10.1080/21567689.2017.1298296>

Shafa, A. (2025, May 9). *Gaza conflict and rise in antisemitism and Islamophobia*. Vision of Humanity. <https://www.visionofhumanity.org/gaza-conflict-leads-to-rise-in-antisemitism-and-islamophobia/>

Sidebotham, S. E. (2011). *Berenike and the ancient maritime spice route* (Vol. 18). Univ of California Press.

Sidqi, A. M. (2023). Apakah OKI Masih Relevan bagi Polugri Indonesia. *JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.70836/jh.v8i1.4>

Silvestri, S., & Mayall, J. (with Freedman, L.). (2015). The role of religion in conflict and peacebuilding. British Academy.

Singer, J. D. (1961). The Level-of-Analysis Problem in International Relations. *World Politics*, 14(1), 77–92.

Snyder, R. S. (2024). Realist or Just Anti-Liberal? Trump's Foreign Policy in Retrospect. *International Journal*, 79(1), 79-95

Statista. (2025, February 13). Global internet penetration rate by region 2025. Statista. <https://www.statista.com/statistics/269329/penetration-rate-of-the-internet-by-region/>

Stirling, K. C. (2024, March 28). 5 facts about Muslims and Christians in Indonesia. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/03/28/5-facts->

about-muslims-and-christians-in-indonesia/

Soliman, A. (2025, January 18). *The Rise of the Global Islamic Economy: A Trillion-Dollar Opportunity* | LinkedIn. LinkedIn.
<https://www.linkedin.com/pulse/rise-global-islamic-economy-trillion-dollar-abdelrhman-soliman-u5dzf/>

Suparto, S., Halid, H., & Mamat, S. A. B. (2019). Bani Alawiyyin in Indonesia and the Malay World: network, development and the role of institution in transmitting the peaceful mission of Islam. *Journal of Indonesian Islam*, 13(2), 267-296

Suryadinata, L. (1995). Islam and Suharto's foreign policy: Indonesia, the Middle East, and Bosnia. *Asian Survey*, 35(3), 291-303

Sutherland, H. (1995). Believing is seeing: perspectives on political power and economic activity in the Malay world 1700–1940. *Journal of Southeast Asian Studies*, 26(1), 133-146.

Thaler, D. (20120046). Chapter Title: The Middle East: The Cradle of the Muslim World. In A. M. Rabasa, C. Benard, P. Chalk, C. C. Fair, T. Karasik, R. Lal, & D. Thaler (Eds.), *The Muslim World After 9/11* (pp. 69–146). RAND Corporation.

The Jakarta Post. (2019, September 26). *OIC adopts action plan for fighting Islamophobia—Thu, September 26, 2019*. The Jakarta Post.
<https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/26/oic-adopts-action-plan-fighting-islamophobia.html>

Thompson, L. (2015). Religion and Diplomacy.
<https://doi.org/10.1163/1871191X-12341306>

Titis Thoriquattyas, Ahmad Munjin Nasih, & Achmad Sultoni. (2023). Rethinking The Religious Moderation through Intellectual History's Lens: Mentifact, Sociofact, and Artefact. *Journal of Islamic History and*

Manuscript, 2(2), 121–136. <https://doi.org/10.24090/jihm.v2i2.7814>

Tolan, J., Veinstein, G., Laurens, H., & Marie, J. (2013). *Europe and the Islamic World: A History*. Princeton University Press.

Tolan, J., Veinstein, G., Laurens, H., & Marie, J. (2013). *Europe and the Islamic World: A History*. Princeton University Press.

Top Universities. (2025, July 7). *QS World University Rankings 2026: Top global universities*. Top Universities. <https://www.topuniversities.com/world-university-rankings>

Trenin, D. (2017). *What is Russia up to in the Middle East?*. John Wiley & Sons

U.S. Department of State. (2002). *Department of State National Interests and Strategic Goals*. U.S. Department of State. [//2009-2017.state.gov/s/d/rm/rls/perfrpt/2002/html/18996.htm](https://2009-2017.state.gov/s/d/rm/rls/perfrpt/2002/html/18996.htm)

UN. (2025). *The United Nations in Indonesia | Perserikatan Bangsa—Bangsa di Indonesia*. <https://indonesia.un.org/id/about/about-the-un>

Van Bruinessen, M. (1994). Najmuddin al-Kubra, jumadil kubra and jamaluddin al-Akbar: Traces of kubrawiyya influence in early Indonesian Islam. *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde*, (2de Afl), 305-329

Voll, J. O. (1994). Islam as a Special World-System. *Journal of World History*, 5(2), 213–226.

Wallerstein, I. (1974). *The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. University of California Press.

Walker, A.-M. (2025). *Malaysia on track to attract 250,000 foreign students by 2025 | Global Student Living*. GSL Global. <https://gslglobal.com/2025/02/14/malaysia-on-track-to-attract-250000-foreign-students-by-2025/>

- Wanandi, J. (2002). A global coalition against international terrorism. *International Security*, 26(4), 184-189.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. In *Perspectives on World Politics: Third edition*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/cbo9780511612183.002>
- Wike, R. (2015, June 23). 1. America's Global Image. Pew Research Center.
<https://www.pewresearch.org/global/2015/06/23/1-america-global-image/>
- WIPO. (2024). Global Innovation Index (No. 17; Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship). World Intellectual Property Organization.
- World Bank. (2023). The World Bank In Indonesia: Overview [Text/HTML]. Indonesia Overview: Development, News, Research, Data.
<https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>
- World Bank. (2024). World Bank Open Data. World Bank Open Data.
<https://data.worldbank.org>
- World Economics. (n.d.). World Economics | Economic data for the benefit of investors. World Economics. Retrieved August 19, 2025, from
<https://www.worldeconomics.com/Processors/Economics-Countries-GrossDomesticProduct.aspx?Country=Indonesia>
- World Population Review. (n.d.). World Superpowers 2025. World Population Review. Retrieved 17 August 2025, from
<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/world-superpowers>
- Worldpopulationreview.com. (2025). *Muslim Population by Country 2025*. Worldpopulationreview.Com.
<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>

- Xinhua. (2019, July 13). Spotlight: Ambassadors from 37 countries issue joint letter to support China on its human rights achievements—Xinhua | English.news.cn. http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/13/c_138222183.htm
- Yafei, H. (2017, April 26). China's Role in Steering the Future of Globalization. Chinadaily. <https://www.chinadaily.com.cn/a/201704/26/WS59bb8aefa310d4d9ab7e9deb.html%0AThe>
- Yarlykapov, A. (2024). Islamic Networks in Russia: The Transformation of the Local Ummah in a Global Context. Политикологија религије, 18(2), 339-357
- Yurdusev, A. N. (1993). "Level of Analysis" and "Unit of Analysis": A Case for Distinction. Millennium - Journal of International Studies, 22(1), 77–88.
- Zatnika, I. (2025, October 7). *Mahasiswa Asing Capai 5.628 Orang, Favoritnya Kampus Multibahasa*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/790467/mahasiswa-asing-capai-5628-orang-favoritnya-kampus-multibahasa->

Policy Output

**Mengintegrasikan Indonesia dan Dunia Islam:
Arah, Kerangka, dan Peta Jalan**



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Program Studi
Hubungan Internasional